

ekstensia

VOLUME 2 TAHUN II, JULI 1995



n dan
anusia

M1
EKS

REFLEKSI

DARI SEBUAH PERJALANAN

**Membangun Ketangguhan Profesi
Penyuluh Pertanian**

ekstensia

majalah penyuluh pertanian

Diterbitkan berdasarkan
SK. Menteri Pertanian No. 755/Kpts/KP. 150/10/94

Pelindung *Sekretaris Jenderal
Departemen Pertanian*

Pengarah *H. Rochajat Harun*

Tim Penyunting
Ketua *Zahir Zachri*
Sekretaris *Agus Hariyadi*
Anggota *Godlim Panggabean*
Andi Sumarga
Ranny Mutiara
Basuki Setiabudi
Bram Joko Santoso
Ratna Andaya
Sri Hartati
Yulia Tri Sedyowati

Perwajahan *El Suherly*
Suparman
Suhermanto
Dwihayanti
A. Erniati

**Administrasi dan
Distribusi** *IG.K. Swastika*
Yaya Sofyan
Riza Fakhrizal
Asep Sukandar
Sarnidi

Alamat **Pusat Penyuluhan Pertanian**
Jl. Harsono RM No. 3
Gedung A Lantai III, Jakarta 12550
Telp. 7804116, 7806131
Pesawat 2316, 2310

Salam Jumpa.

Di Tahun Emas Republik yang kita cintai ini, *ekstensia* selaku majalah para penyuluh pertanian ingin mengisinya dengan telaahan terhadap dua figur pembangunan pertanian kita yang bergerak di garis paling depan, yakni para penyuluh pertanian dan para petani-nelayannya.

Kemana orientasi profesi penyuluh pertanian kita ini akan diarahkan, dan upaya apa saja yang telah dan akan dilakukan untuk mewujudkannya ?

Kali ini *ekstensia* menurunkan *Ranny Mutiara*, *Godlim Panggabean* dan *Zahir Zachri* melalui rubrik JENTERA-nya mencoba melacak jejak sang ujung tombak dan menguak masa depannya kemana dia akan beranjak. Kerut-merut di seputar sistem angka kredit jabatan fungsional penyuluh pertanian ternyata akan ditinjau kembali dan disempurnakan. Sebuah peluang telah terbuka untuk menata kembali upaya membangun kehandalan penyuluh pertanian kita ke arah profesionalisme yang lebih mantap.

Menerawang masa datang tentang sosok pelaku utama pembangunan pertanian kita, sosok petani-nelayan yang bagaimanakah yang akan tampil di masa datang ? Rubrik CAKRAWALA, sesuai dengan sifat keluasannya, mencoba membentangnya melalui tulisan *Sajogjo* dan *Herman Soewardi*, pakar-pakar sosiologi pedesaan kita. Selain tengadah untuk menjamah masa depan yang lebih megah, kitapun tak lupa untuk menunduk melihat masyarakat lapisan bawah yang masih sangat lemah. *Tonton Wahyu*, mencoba menyajikan kiat-kiat yang memikat dan metoda yang dianggap tepat untuk mengangkat harkat derajat dan martabat masyarakat yang masih melarat.

Andi Sumarga, kali ini mengasuh rubrik CENGERAMA-nya, dengan mengajak kita untuk saling asah melalui pertukaran pengalaman para penyuluh dalam hal menangkal munculnya oknum-oknum nakal yang suka mempermainkan modal, padahal modal bagi masyarakat petani-nelayan yang belum handal merupakan barang langka yang mahal. Sungguh sayang, bila karena ulah oknum yang nakal justru kelompok petani-nelayanlah yang ketiben pulung kena cecal, hal inilah yang harus ditangkal.

Jangan lewatkan pengalaman *Suwito*, penyuluh pertanian dari Blora Jawa Tengah, yang berhasil menangkal munculnya oknum nakal melalui kiat "seleksi ketat" dengan menerapkan metode dan proses bertahapnya secara tekun dan taat azas. Demikian pula dengan pengalaman *H.Subani*, Ketua Rembug Harian KTNA Provinsi Jawa Barat dan Ketua KUD 'TRISULA' dari Majalengka Jawa Barat dengan kiat: "modal adalah peluang untuk menggerakkan dinamika kelompok" yang tidak lain adalah gerakan berkoperasi. Selain itu, *Sudarasmaja* dari Bali mengungkap pengamatannya mengenai proses mengambil manfaat dari efektifitas tetanan norma adat dan agama dalam sistem SUBAK yang mampu menangkal munculnya hama penghisap modal petani, dan sekaligus membangun tanggungjawab dan pematapan norma masyarakat dengan awig-awig-nya. Pengalaman mereka sangat layak untuk disimak, silahkan membaca CENGERAMA kita.

Sebagaimana yang lalu rubrik-rubrik lainnya pun rasanya akan sayang untuk dilewatkan. Karenanya, silahkan baca *ekstensia* kita ini, jangan biarkan ada halaman yang luput dari kilatan mata anda. Seluruh tulisan ini sengaja tersaji untuk anda, untuk kita semua para penyuluh pertanian di seluruh tanah air tercinta.

Redaksi

GAPURA 1

Melacak Jejak Sang Ujung Tombak,
Kemana akan Beranjak ? 4



REFLEKSI DARI SEBUAH PERJALANAN
Membangun Ketangguhan
Profesi Penyuluh Pertanian 5

Hasil wawancara ekstensi
dengan Kepala Pusat
Penyuluhan Pertanian 28

Dr. Ir. H. Rochajat Harun, M.Ed.



Perkiraan Perilaku Masyarakat Pedesaan
dalam Pembangunan 25 Tahun Tahap Kedua 35

Prof. Sajogjo

Kemiskinan
dan Upaya Penanggulangannya 45

Tonton Wahyu S

LOGICAL CONSTRUCT PEMBANGUNAN PERTANIAN
Fungsi dan Kedudukan Penyuluhan Pertanian
dalam Pembangunan Pertanian 53

Prof. Herman Soewardi

JENDELA 59



63 CENGERAMA

63 Bercengerama
dengan Terjangan Ombak

67 Eksistensi Subak di Era Globalisasi
Kuatkah Pijakannya ?

Ir. Sudaratmaja, MS

71 Pengalaman Membina Kelompok Petani / Nelayan Kecil
di Kecamatan Banjarejo Kab. Blora Jawa Tengah

Suwito

75 Modal berarti Menggerakkan Masyarakat Tani dalam Koperasi
H. Subani



85 CERMIN

85 Jonhan Boer
Antara Teori, Agama dan Tradisi



89 SSST.....

89 Peranan Penyuluh dalam KUT Pola Khusus

93 Forum Diskusi Ekstensia Mengapa Tidak ?

95 CELOTEH

95 Keberadaan Penyuluh dan Petani di Perkotaan

96 Pesan untuk Rekan-rekan Penyuluh

97 WACANA

99 A...EKSTENSI

99 BPP-ku Sayang BPP-ku Malang

100 Gerbu Ala Majudi

Melacak Jejak Sang Ujung Tombak, Kemana akan Beranjak ?

Konon katanya, wajah pembangunan pertanian yang kita lihat dan kita nikmati hingga sekarang ini tidak terlepas dari jasa sang ujung tombak julukan yang gagah dan cukup penuh arti bagi para penyuluh pertanian.

Sosok penyuluh pertanian telah sejak lama dikenal sebagai tokoh pembawa pembaharuan di pedesaan, kedekatannya dengan petani ditambah berbagai pesan dan teknologi yang dimilikinya membuat para penyuluh pertanian disiapkan untuk berani berinteraksi dengan petaninya.

Bagi penyuluh pertanian generasi tua, mungkin masih mengingat figur mantri tani yang dengan kesabarannya menjalankan tugas meyakinkan petani melalui penggunaan media tradisional yang tentunya laku pada saat itu, atau bagi penyuluh generasi Bimas yang akrab dengan LAKU-nya sehingga dengan gagah dapat memproklamasikan keberhasilan swa sambada beras sebagai juga hasil kontribusi peranan para penyuluh pertanian.

Ternyata pada saat gencarnya kita berbicara tentang reorientasi pembangunan pertanian dengan konsepsi agribisnis dan agro industrinya, sosok sang ujung tombak sekarang seakan gamang dengan julukan yang disandanginya, entah karena belum siap memikul beban tugas yang semakin lama semakin sarat ataupun mungkin karena semakin beragamnya kondisi petani dengan segala permasalahannya sehingga peran sang ujung tombak ini terasa kurang menggigit.

Yang pasti banyak yang menganggap bahwa penyebab kegamangan sosok penyuluh pertanian ini diakibatkan oleh ketidak mapanan kelembagaan yang mengurus penyuluhan pertanian, sebagian menuding profesi penyuluh seakan diombang-ambingkan kebijaksanaan penyuluhan pertanian, namun sebagian lagi justru menggugat karya yang telah dihasilkan penyuluh pertanian itu sendiri.

Suatu ungkapan yang bernada pesimistis, tetapi apakah memang itu yang menjadi pokok permasalahan utama dalam mengembangkan profesi penyuluh pertanian? masih diperlukankah penyuluh pertanian bagi masyarakat petani? lantas apa yang menjadi hambatan ataupun peluang bagi pengembangan profesi penyuluh pertanian?

Jentera mencoba mengangkat sosok sang ujung tombak menjadi satu telaahan, profesionalisme penyuluh pertanian menjadi topik sentral dengan menampilkan berbagai sisi dan visi kehadiran penyuluh pertanian dalam suatu tatanan sistem pembangunan pertanian.


Apapun peran yang dipilih ataupun melekat pada diri penyuluh pertanian, menempatkan mereka pada posisi yang siap untuk dikritik sekaligus disanjung tetapi sekurang-kurangnya kita wajib memberi suatu penilaian yang jujur selama kita masih peduli dengan kehadiran mereka **Sang Ujung Tombak Pembangunan Pertanian...**

ranny mutiara

REFLEKSI DARI SEBUAH PERJALANAN

Membangun Ketangguhan Profesi Penyuluh Pertanian

Menghantainya pembicaraan mengenai reorientasi pembangunan pertanian maka peran penyuluh pertanianpun mencuat diperbincangkan bahkan dipertanyakan. Membangun profesionalisme sang ujung tombak sudah saatnya dijadikan suatu tuntutan sekaligus tantangan.

 atatan panjang Pembangunan Pertanian telah mencatat satu figur dengan istilah Penyuluh Pertanian sebagai satu gagasan sekaligus fungsi operasionalisasi dari berbagai kebijaksanaan yang langsung berhubungan dengan masyarakat petani.

Sebagai suatu gagasan, personifikasi figur penyuluh pertanian sarat dengan keteladanan yang dicirikan oleh sikap dan sifat yang penuh dengan keberpihakan kepada kepentingan petani, sementara sebagai fungsi operasionalisasi kebijaksanaan pembangunan pertanian, maka penyuluh pertanian merupakan perpanjangan tangan yang dituntut untuk mengamankan keberhasilan program.

Berjalannya waktu seiring dengan pasang surutnya berbagai kebijaksanaan pembangunan pertanian, membawa figur penyuluh pertanian menjadi satu figur yang multi dimensi.

Mulai dari meyakinkan petani agar suatu teknologi dapat dengan mudah untuk diterapkan dalam kegiatan usahatani pada suatu kondisi faktual, sampai pada suatu proses keyakinan petani terhadap kondisi jangkauan ke depan dengan muatan-muatan prioritas pengembangan wilayah yang dibangun secara agregat.

Pada saat sebelum kemerdekaan, figur penyuluh pertanian dikenal dengan istilah mantri pertanian (*landbouw consulent* atau *adjunct landbouw consulent*), kehadirannya pada saat itu adalah sebagai akibat politik etika Belanda yang juga dihadirkan sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah kolonial.

Orientasi pekerjaan mantri tani pada saat itu terbatas pada kegiatan-kegiatan yang sangat sederhana yang terbatas pada pengenalan aspek-aspek budidaya tanaman dengan penggunaan metoda penyuluhan yang relatif banyak menitik beratkan pada pendekatan perorangan dan kelompok.

Setelah merdeka, kehadiran Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) menjadi titik awal penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian dengan basis kecamatan sebagai wilayah kerjanya. Mantri tani pada saat itu berperan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan sekaligus menjalankan kegiatan pengaturan.

Sistem kerja yang digunakan pada saat itu adalah sistem tetesan minyak (*oil vlek system*), melalui pendekatan metoda penyuluhan pertanian yang tidak jauh berbeda dengan pada jaman

sebelum merdeka yang masih berputar pada anjungsana, kursus tani, kring tani dan penggunaan media tradisional.

Walaupun kemajuan secara kualitas berjalan lambat tetapi ada satu hal yang menarik dari kehadiran figur mantri tani tersebut yaitu dijadikannya mantri tani sebagai tokoh sentral yang dipercaya oleh petani sebagai pemberi masukan teknologi baru untuk perbaikan kegiatan usahataniannya.

Suatu usaha yang komprehensif dan berencana dalam pembangunan pertanian dengan melibatkan secara intensif petugas pertanian yang dalam hal ini masih dikenal dengan mantri tani atau Pamong Tani, dimulai pada sekitar tahun 1959 dengan upaya menggerakkan partisipasi petani secara massal dalam program intensifikasi melalui Komando Operasi Gerakan Makmur (KOGM).

Kekurang berhasilan konsepsi KOGM ini, memicu IPB untuk melakukan "*action research*" dengan Proyek Panca Usaha Lengkap di tahun 1964 dan setelah melalui kegiatan demonstrasi massal, bimas gotong royong, bimas nasional, bimas nasional yang disempurnakan maka pada saat memasuki PJP I kontribusi peranan penyuluh pertanian menjadi satu unsur yang diperhitungkan dalam pencapaian target-target program pembangunan pertanian khususnya dalam pencapaian swa sembada beras.

Dengan bergesernya tatanan dalam masyarakat petani yang dicirikan dengan tampilnya dinamika peran serta petani dalam proses pengambilan keputusan untuk pengamalan teknologi tepat guna, kerjasama maupun pemanfaatan berbagai kelembagaan sosial ekonomi, maka orientasi tugas dan fungsi penyuluh pertanian juga dituntut untuk mampu menyelaraskan dengan kondisi faktual tersebut.

Sebagai penggerak utama dinamika pembangunan pertanian di wilayah,

maka sub sistem penyuluhan pertanian dengan penyuluh pertaniannya menempatkan diri pada posisi strategis dalam suatu basis teritorial yaitu Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian sebagai basis terdepan dengan lokalita usahatani yang spesifik.

Suatu peran yang dapat diterjemahkan dengan berbagai interpretasi bisa sebagai suatu peran yang penuh dengan tantangan menjawab dinamika masyarakat atau mungkin juga sebagai suatu peran yang berat dengan berbagai pesanan yang harus dipenuhi.

Di saat tuntutan dan tantangan terhadap peranan penyuluh pertanian semakin meningkat, terjadi berbagai bias dan fenomena pada kesatuan profesi yang bernama penyuluh pertanian. Tidak perlu menutup mata bahwa ada nada-nada sumbang yang mempertanyakan keberadaan penyuluh pertanian yang konon katanya sedang lesu darah tetapi ada pula yang berani dengan tegar menyatakan bahwa fenomena sekarang ini adalah sementara saja sifatnya sebagai sesuatu yang wajar terjadi pada saat transisi proses pembangunan pertanian.

Kontroversi tentang peran penyuluh pertanian ini semakin merebak di saat terjadi kecenderungan menurunnya produksi beras yang notabene mengancam kelestarian swa sembada beras, sesuatu yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan pertanian pada PJP I yang lalu.

Kesalahan memang tidak semuanya ditimpakan pada kualitas kemampuan penyuluh pertanian yang ada di lapangan, pengaruh musim juga ternyata tidak berpihak pada pencapaian target produksi beras nasional, tetapi secara faktual seakan semua pihak mengangguk kepala bahwa telah terjadi sesuatu pada kondisi penyuluh pertanian yang mengarah pada kecenderungan menurunnya kinerja mereka di lapangan.



Jumlah penyuluh pertanian yang sekarang ini sejumlah tiga puluh tiga ribuan yang berada di lapangan dengan kualifikasi non sarjana dan sekitar dua ribuan penyuluh dengan kualifikasi sarjana memang merupakan suatu jumlah yang cukup banyak, sehingga proses peningkatan kemampuannya pun bervariasi sekali.

Reorientasi pembangunan pertanian dengan implikasinya pada reorientasi penyuluhan pertanian, kehadiran institusi baru yang juga mewarnai penyelenggaraan penyuluhan pertanian serta nafas desentralisasi yang telah memberi nuansa gerak penyuluh pertanian selama empat tahun sejak diberlakukannya Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 539/Kpts/LP.120/7/1991 dan Nomor 65 Tahun 1991, sudah saatnya untuk dilakukan telaahan ulang terutama dalam mengembangkan kemampuan penyuluh pertanian untuk membangun ketajaman sebagai ujung tombak pembangunan pertanian.

Tugas Pokok dan Kualifikasi Penyuluh Pertanian

Dalam rangka membangun pertanian tangguh maka para pelaku pembangunan pertanian perlu memiliki kemampuan dalam memanfaatkan segala sumberdaya secara optimal, mengatasi segala hambatan dan tantangan serta dinamis dalam penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi dengan kualifikasi dan spesifikasi tertentu.

Kelahiran tenaga penyuluh pertanian sebagai satu aparat fungsional tidak terlepas dari pelaksanaan program Bimas pada sekitar tahun tujuh puluhan, dan setelah menunjukkan karyanya yang gemilang melalui pencapaian swa sembada beras, maka sejak Oktober 1985 jabatan penyuluh pertanian telah ditetapkan sebagai jabatan fungsional melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 73/MENPAN/1985 tanggal 17 Oktober 1985 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Penyuluh Pertanian dan diperkuat dengan Surat Edaran Bersama

Menteri Pertanian dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 17/Kpts/LP.410/I/1986 dan Nomor 01/SE/1986 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Penyuluh Pertanian.

Dalam Surat Edaran Bersama disebutkan bahwa penyuluh pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan kegiatan penyuluhan pertanian secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian.

Tugas pokok penyuluh pertanian adalah melakukan kegiatan penyuluhan

pertanian untuk mengembangkan kemampuan petani-nelayan dalam menguasai, memanfaatkan dan menerapkan teknologi baru, sehingga mampu bertani lebih baik, berusahatani lebih menguntungkan serta membina kehidupan berkeluarga yang lebih sejahtera.

Adapun tugas pokok penyuluh pertanian berdasarkan jenjang jabatan dan kepangkatannya seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 73/MENPAN/1985 adalah sebagai berikut:

No.	Fungsi	Asisten P.P. II/a - II/c	Ajun P.P. II/d - III/b	P.P. III/c - IV/a	P.P Utama IV/b - IV/e
1.	Mengajarkan PKS kepada Petani dan Melakukan Percobaan	●	●		
2.	Mengembangkan Swadaya dan Swakarsa Petani	●	●	●	●
3.	Menyusun Program	●	●	●	●
4.	Membantu Mengajar pada Kursus Tani	●			
5.	Mengajar pada Kursus Tani		●	●	●
6.	Membantu Pelaksanaan Survey dan Evaluasi	●	●		
7.	Melaksanakan Pengujian/ Evaluasi		●	●	●
8.	Melatih dan Membimbing Penyuluh Pertanian		●	●	●
9.	Membantu Menyiapkan Petunjuk Informasi Pertanian	●	●		
10.	Menyiapkan Petunjuk Informasi Pertanian		●	●	●
11.	Karya Ilmiah		●	●	●
12.	Merumuskan Arah Kebijakan Pengembangan Penyuluhan		●	●	●

Keterangan : P.P. = Penyuluh Pertanian

Tuntutan dari penjabaran tugas pokok penyuluh pertanian ini diungkapkan oleh Ir. A. Rifai Hussain, Kepala Kantor Wilayah Deptan Jawa Barat, bahwa titik tumpu tugas pokok penyuluh pertanian adalah meningkatkan kemampuan manajerial kelompok tani agar memiliki semangat, percaya kepada kemampuan sendiri dan mampu menarik manfaat berdasarkan asas skala ekonomi.

"Tugas utama seorang penyuluh adalah mengembangkan kemampuan masyarakat tani dalam usaha berkelompok, berencana, berskala ekonomi dan rasional serta membudayakan teknologi tepat guna sesuai dengan kondisi masyarakat pedesaan" demikian ungkapnya kepada *ekstensi*.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Oyo Sukarya, KTNA Kabupaten Kuningan yang menyatakan bahwa Penyuluh Pertanian harus mampu memecahkan kendala teknik penerapan teknologi pertanian di lapangan, yang tidak hanya berhadapan dengan seorang petani saja tetapi dengan sekelompok petani dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang bermacam-macam.

Suatu konsekuensi logis dari profesi jabatan fungsional yang diemban oleh penyuluh pertanian, ternyata hal ini memang sesuai dengan pengertian jabatan fungsional menurut PP Nomor 16 Tahun 1994 yaitu suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Dalam penjelasannya kepada *ekstensi*, Hardijanto, Pembantu Asisten Bidang Diklat dan Karier Pegawai pada Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara; menyebutkan kriteria yang harus tampil pada jabatan fungsional berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 1994 adalah :

1. Memiliki metodologi, teknik analisa, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi
2. Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi
3. Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan;
 - (a) tingkat keahlian bagi jabatan fungsional keahlian dan,
 - (b) tingkat keterampilan bagi jabatan fungsional keterampilan.
4. Pelaksanaan tugas bersifat mandiri
5. Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi

Peluang pengembangan profesi yang telah dibuka dengan adanya pengakuan jabatan fungsional ini ternyata masih juga diwarnai dengan masih adanya nada-nada sumbang yang mempertanyakan tugas pokok penyuluh pertanian itu sendiri.

Sering terdengar bahwa penyuluh terlalu banyak dilibatkan pada urusan administrasi sehingga lupa akan tugas pokoknya atau juga penyuluh yang ikut memanfaatkan peluang agribisnis sehingga menjadi penyuluh sekaligus sebagai pengusaha.

Urusan administrasi seringkali dijadikan kambing hitam, lupanya penyuluh terhadap tugas pokoknya, hal ini memang bisa terjadi apabila di wilayah kerja penyuluh itu bertugas masuk berbagai program yang menuntut adanya pertanggung jawaban yang mau tidak mau melibatkan penyuluh itu kedalam jerat aturan administrasi.

"Itu adalah alasan klise yang menimpakan ketidak mampuan untuk menjalankan tugas pokoknya kepada urusan administrasi padahal sebetulnya itu adalah kesalahan dalam manajemen pengaturan program yang ada di

wilayah", demikian ungkap A. Rifai Husein tentang penyuluh yang banyak terlibat dalam hal administrasi.

Bagi penyuluh sendiri hal-hal yang menyangkut urusan administrasi sering seakan memakan buah simalakama, pada satu sisi dia harus mengorbankan tugas pokoknya, namun di sisi lain pekerjaan itu terpaksa dilakukan karena hanya dialah petugas terakhir yang berhadapan dengan masyarakat petaninya.

Inilah yang diungkapkan oleh Hardjanto, staf Menpan yang menyatakan bahwa untuk seorang fungsional tanggung jawab dan tanggung gugat pekerjaannya adalah mandiri artinya setiap apa yang dilakukan oleh seorang fungsional adalah cemin dari kemampuannya di bidang itu.

Selanjutnya lagi dinyatakan bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya seorang fungsional tidak terlepas dari dua jenis tugas yaitu tugas mandiri dan



A. Rifai Husein
Kakansel Departemen
Pertanian Provinsi Jawa Barat

tugas limpah. Tugas mandiri adalah pekerjaan yang memang merupakan tugas pokoknya yang menunjukkan ciri mandiri seorang fungsional adapun tugas limpah adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fungsional berdasarkan

KERUT MERUT ANGKA KREDIT dan KELUH PARA PENYULUH

Dengan suara nyaring dan lantang Ir. Murdani Suwito, Penyuluh Pertanian senior dari provinsi Lampung mengungkapkan setumpuk "uneg-uneg" para penyuluh mengenai Sistem Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian. Mulai dari kebidak-logisan angka 0.007 nilai angka kredit bagi kegiatan pelaksanaan dan mengajar pada kursustani, masalah standarisasi penilaian yang belum menjamin kadar objektivitasnya, sampai kepada prosedur penilaian yang berantai panjang dan sederetan masalah lain-nya.

Nada serupa dilontarkan pula oleh para penyuluh lainnya dari provinsi lain di hadapan para pejabat eselon II Departemen Pertanian yang terkait dan yang menangani administrasi kepegawaian penyuluh pertanian pada acara "Temu Profesi Penyuluh Pertanian" di Yogyakarta dan Denpasar Bali pada bulan Juni 1995 yang lalu.

0.007 nilai angka kredit untuk kegiatan pelaksanaan mengajar kursustani menjadi sorotan utama para penyuluh pada pertemuan itu. Bisa dibayangkan, untuk memperoleh angka 7 (tujuh) dari kegiatan tersebut Penyuluh harus melakukannya 1000 (baca: seribu) kali kursustani. Bila setiap hari Penyuluh melaksanakan 1 (satu) kali kursustani, maka angka tersebut baru dapat dicapai dalam waktu 3(tiga) tahun, padahal kegiatan tersebut merupakan kegiatan pokok atau kegiatan utama bagi para penyuluh.

Mari kita bandingkan dengan salah satu kegiatan lainnya, kegiatan pelatihan misalnya: Bagi Penyuluh yang mengikuti latihan satu bulan atau 280 jam, akan memperoleh nilai angka kredit sebesar 3 (tiga). Angka ini sangat menggiurkan bagi para Penyuluh, karenanya kegiatan untuk dapat mengikuti pelatihan menjadi incaran dan rebutan, sayang jumlah, frekuensi dan daya-tampungnya sangat terbatas. Bagi para penyuluh

dilakukan oleh fungsional berdasarkan suatu limpahan pekerjaan organisasi dimana fungsional itu ditempatkan.

Tugas limpah inilah yang seringkali mungkin tidak sejalan dengan tugas pokoknya sebagai penyuluh pertanian. *"Bagaimana saya bisa menolak pekerjaan yang sebetulnya bukan tugas pokok saya sebagai penyuluh, soalnya tugas itu datang dari kepala dinas"*, demikian ungkap seorang penyuluh kepada ekstensi.

Menanggapi tugas pokok penyuluh pertanian, Prof. Herman Soewardi, Guru Besar Sosiologi Pedesaan UNPAD menyatakan bahwa tugas pokok penyuluh pertanian adalah menumbuhkan dinamika petani untuk mau mengubah perilakunya kearah yang lebih baik lagi dengan memberikan jasa konsultasi bagi mereka.

"Kalau ada penyuluh yang sekaligus menjadi pengusaha itu menunjukkan bahwa penyuluh itu belum bisa

menghayati tugas pokoknya. Jadi menyalahi etika kalau penyuluh juga ikut berbisnis, yang berbisnis itu petaninya dan penyuluh menjadi konsultan bisnis petani dengan berlaku demikian penyuluhpun akan memperoleh nilai tambah", demikian ungkapnya kemudian.

Legalitas pelaksanaan tugas pokok penyuluh pertanian sebenarnya telah tercantum dalam butir-butir perincian angka kredit bagi penyuluh pertanian. Dalam rincian tersebut telah ditentukan jenis pekerjaan yang menjadi tugas seorang penyuluh berdasarkan jenjang jabatannya lengkap dengan nilai yang dapat diperolehnya bila melaksanakan pekerjaan itu.

Ternyata ukuran pelaksanaan tugas pokok dengan apa yang tercantum dalam perincian angka kredit ini juga banyak menimbulkan kondisi yang kurang memberi peluang pelaksanaan tugas pokok penyuluh secara utuh.

yang tinggal di pelosok-pelosok daerah terpencil justru menjadi semakin terkucil. Hal ini pula yang konon di beberapa daerah dikeluhkan adanya eksekse-eksekse yang kurang sehat dalam pemilihan dan penugasan pelatihan bagi para penyuluh ini dikarenakan tingginya "pasar" bagi kegiatan pelatihan ini.

Itu cuma sekedar contoh kasus saja, masih sederetan kerut-merut permasalahan sistem angka kredit yang dipersoalkan oleh para penyuluh. Ada kasus lain, di antaranya mengenai kriteria penilaian yang dinilai belum standard, sehingga banyak DUPAK (*daftar usulan penilaian angka kredit*) atau kegiatan yang diusulkan dalam Dupak, hasil penilaian dari seorang anggota Tim Penilai berbeda jauh dengan penilaian anggota lainnya. Kriteria penilaian yang belum standard ini sangat mengaburkan kadar objektivitasnya, sehingga tidak jarang menimbulkan kerancuan dan memberi peluang untuk tumbuhnya eksekse-eksekse lainnya yang tidak sehat.

Masalah penunjukan Pejabat atau Tim Penilai, prosedur penilaian yang dirasakan panjang juga dinilai sangat menghambat proses peningkatan karier para penyuluh, terutama mereka yang ditempatkan di pelosok-pelosok daerah terpencil. Sebenarnya masih banyak lagi permasalahan-permasalahan lainnya dalam sistem angka kredit bagi jabatan fungsional penyuluh ini yang dikeluhkan oleh para penyuluh kita.

Mencermati kerut-merut angka kredit dan keluh para penyuluh ini, rasanya tidaklah berlebihan seandainya sekarang ini dilakukan **PENINJAUAN KEMBALI** terhadap sistem penilaian angka kredit ini.

Selain waktu masa laku Peraturan Penetapan Angka Kredit bagi para penyuluh pertanian (SK.MENPAN Nomor: 73/MENPAN/1985) sudah lebih dari sepuluh tahun, perkembangan dan tantangan masa datangpun semakin menuntut sosok penyuluh pertanian yang lebih profesional sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

anekdot bagi keberadaan penyuluh pertanian yang dengan melaksanakan tugas pokoknya melakukan penyuluhan di kelompok atau mengajar yang cuma dibargai 0,007 istilah "membantu" pada beberapa butir yang tidak jelas ukurannya. Kondisi seperti ini kurang memberikan suatu motivasi penyuluh untuk menjalankan tugas pokoknya dengan baik dengan perolehan angka kredit yang wajar dengan usahanya.

Satu hal lagi yang kiranya perlu diperhatikan, apakah unsur-unsur yang menjadi tugas pokok penyuluh pertanian yang ada dalam butir-butir rincian angka kredit ini secara luwes dapat mengikuti perubahan orientasi penyuluhan pertanian yang notabene mungkin akan meru-

Tantangan Reorientasi Penyuluhan Pertanian:

Sistem Kerja Penyuluh Pertanian

Dalam menampilkan peranannya ditengah-tengah masyarakat petani yang sedang membangun, para penyuluh pertanian tidak bergerak sendiri, karena dia ditopang oleh kehadiran berbagai pihak baik itu perorangan, unit kerja instansi dan lembaga yang terbangun dalam suatu sistem kerja.

Dalam melakukan pekerjaannya itu, para penyuluh pertanian berada di dalam dan terkait dengan lembaga penyuluhan pertanian yang berfungsi sebagai penyedia berbagai kemudahan untuk

Perincian angka kredit adalah ukuran kualitas pekerjaan Penyuluh Pertanian

bah jenis tugas pokok penyuluh pertanian itu sendiri.

Dalam pembicaraannya dengan *ekstensia*, Hardijanto, staf Menpan menyatakan bahwa sekarang ini akan dilakukan telaahan ulang terhadap perincian angka kredit bagi jabatan penyuluh pertanian, untuk itu memang diperlukan kecermatan dari berbagai pihak untuk bisa secara obyektif meneliti unsur demi unsur dan secara komprehensif dapat mewakili kepentingan penyuluh pertanian untuk mengembangkan tugas dan fungsinya.

Suatu angin segar yang melegakan bagi para penyuluh, penelaahan ulang perincian angka kredit ini seyogyanya dapat memberikan ukuran kualitas hasil pekerjaan penyuluh pertanian dalam menjalankan tugas pokoknya dan yang terpenting bahwa jaminan peningkatan karier penyuluh sesuai dengan hak dan kewajibannya akan terjamin dengan kejelasan rincian dari butir-butir angka kredit tersebut.

memperkuat dan memperlancar proses belajar-mengajar petani-nelayan yaitu materi penyuluhan, media informasi serta pengembangan metodik dan didaktik penyuluhan serta kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dalam penyuluhan pertanian.

Sistem kerja bagi penyuluh pertanian adalah suatu perangkat kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas tugas pokoknya sebagai penyuluh pertanian baik itu yang berhadapan langsung dengan peserta didiknya (petani-nelayan), maupun penyuluh (di tingkat kabupaten dan provinsi) yang bertugas sebagai unsur pendukung terhadap penyuluh lapangan sesuai dengan spesialisasinya.

Diawali dengan kehadiran Inpres 4 Tahun 1971, tentang Catur Sarana Wilayah Unit Desa (Wilud) dengan salah satu unsurnya adalah penyuluhan pertanian, maka mulailah dilaksanakan Sistem Kerja Penyuluh Pertanian yang dikenal dengan Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan(LAKU).

Pada masa ini dikenal dengan lebih meluas istilah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) bagi tenaga khusus penyuluh pertanian yang berada di lapangan dengan basis teritorial Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP), Penyuluh Pertanian Urusan Program (PPUP), sebagai pendukung dalam koordinasi operasional kegiatan penyuluhan pertanian di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian dan Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS) sebagai perencana dan perancang metoda serta strategi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian dengan basis kabupaten dan provinsi.

Inilah titik awal dari lahirnya penempatan tenaga fungsional untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hal ini kebutuhan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian yang dilakukan secara utuh dan tuntas dengan perangkat kelembagaan BPP yang dilengkapi dengan program dan sistem kerja LAKU.

Inti Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU) adalah mengatur kegiatan PPL untuk mengikuti latihan di BPP dua minggu sekali dengan PPS sebagai pelatihnya serta PPL diwajibkan untuk mengunjungi kelompok tani hamparan setiap dua minggu sekali. Target kelompok yang dibimbingnya sebanyak 16 kelompok dimana setiap PPL harus mengunjungi kelompok tani selama empat hari setiap minggunya.

Penerapan sistem kerja LAKU ini memang mengalami masa emasnya di sekitar tahun tujuh puluhan, karena pada saat itu penerapan sistem tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk mendukung kelancaran kegiatan penyuluhan.

Hal ini ditunjukkan dengan frekuensi supervisi berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai kecamatan yang cukup tinggi, ketersediaan uang jalan, uang kerja bimbingan dan biaya pengujian bagi para penyuluh, pedoman penye-

lenggaraan penyuluhan pertanian baik itu metoda dan program yang cukup lengkap serta prosedur tetap sistem LAKU bagi penyuluh yang terperinci.

Tidak mengherankan apabila pada masa-masa itu penyuluh pertanian dapat menunjukkan kiprahnya dengan jelas karena untuk membidik sasarannya telah dilengkapi dengan perangkat metoda dan manajemen yang terarah.

Kelembagaan Balai Penyuluh Pertanian sebagai sentra terdepan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam artian sebagai suatu satuan operasional penyuluhan pertanian yang melembaga baik itu perangkat pranata maupun organisasi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk menjalankan fungsinya.

"Pada saat berlakunya sistem kerja LAKU, rasanya penyuluh itu punya modal untuk bisa berkisah karena ada sesuatu yang jelas akan dicapai lagi pula ada fasilitasi untuk pelaksanaan kegiatan pokok seperti penyusunan program, supervisi dan sebagainya", demikian diungkapkan oleh seorang penyuluh senior provinsi Bali pada saat berbincang dengan ekstensia.

Kondisi yang serba terfasilitasi ini ternyata belum mampu untuk menumbuhkan dinamika proses bagi setiap pelaku di dalamnya, setelah masa kejayaan "boom minyak" mulai menurun dengan konsekuensinya berkurangnya aliran dana bagi setiap program termasuk penyelenggaraan kegiatan penyuluhan maka kecenderungan menurunnya penerapan sistem kerja LAKU ini mulai tampak. Kondisi ini semakin menurun pada masa-masa transisi pemberlakuan SKB Mentan dan Mendagri tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, pada masa itu boleh dikatakan bahwa sistem kerja penyuluh pertanian hadir dengan berbagai versi baik itu berdasarkan induk subsektor bahkan berdasarkan proyek yang dikerjakan oleh penyuluh.

Inilah suatu hal yang sangat antagonistik pada saat nafas desentralisasi dihembuskan sebagai suatu upaya untuk mengembangkan kreativitas wilayah untuk menyesuaikan kebijaksanaan operasionalnya sesuai dengan kondisi wilayah, ternyata belum mampu dimanfaatkan kondisi tersebut secara optimal sementara di satu sisi ada petani yang semakin cepat berlari namun juga ada yang tersandung karena memang nasibnya yang kurang baik.

Lantas sistem kerja yang bagaimana yang cocok bagi para penyuluh pertanian di era agribisnis dan agro-industri ini?

"Sistem kerja LAKU pada dasarnya masih relevan untuk diterapkan sepanjang hal-hal yang menyangkut pengaturan dan pelayanan terhadap gerak penyuluh memberi peluang untuk

mengarahkan penyuluh sebagai konsultan", demikian ungkap Prof. Herman Soewardi, Guru Besar Sosiologi Pedesaan Universitas Padjadjaran.

Pada kesempatan lain Ues Herdiana, Penyuluh Senior Provinsi Jawa Barat memberikan pengamatannya terhadap Sistem Kerja Penyuluh Pertanian, *"Tuntutan penyuluh pertanian bukan cuma sekedar melaksanakan seperti yang dulu dikenal dengan Sistem Kerja Laku, kompleksitas agribisnis dan keragaan petani nelayan kita yang sudah jauh berbeda dengan waktu yang dulu menuntut adanya suatu Sistem Kerja yang lebih dinamis dan progresif, jadi wajar saja kalau sekarang LAKU itu memang tidak laku".*

Sistem Kerja Penyuluh Pertanian tidak dapat dipisahkan keberadaannya

ANGKA KREDIT dan PROFESIONALISME PENYULUH PERTANIAN

Untuk menelusur kerut merut angka kredit dan keiuh para penyuluh ini, *ekstensi* mencoba mendatangi Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara guna melakukan serangkaian wawancara. Hardijanto, Pembantu Asisten Bidang Diklat dan Karier Pegawai menjelaskan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pun telah memahami permasalahan ini dan sangat menaruh perhatian yang besar serta telah menugaskan Staf-nya untuk melakukan peninjauan kembali sistem angka kredit bagi jabatan fungsional penyuluh pertanian ini dan sekaligus melakukan tindakan penyempurnaan-nya.

"Pertama-tama anda mesti berbahagia, karena Bapak Menpan mempunyai perhatian khusus dan telah memberi disposisi untuk meninjau kembali peraturan angka kredit bagi jabatan fungsional penyuluh pertanian ini, dan kami pun telah meminta agar Deptan dapat segera melaksanakan peninjauan tersebut", demikian ungkap Hardijanto kepada *ekstensi*.

Mengenai nilai angka kredit yang 0,007 ataupun nilai-nilai yang lainnya, sudah tentu ada alasan yang mendasari timbulnya angka-angka tersebut, tiap perhitungan angka kredit diperoleh melalui satu rumus tertentu.

Nilai 0,007 untuk kegiatan mengajar pada kursustani, Hardijanto menjelaskan, bahwa pada waktu itu diasumsikan, kegiatan penyuluhan di kelompok memakan waktu selama 2 jam, dan dalam satu hari dapat dilakukan kegiatan penyuluhan rata-rata 2-3 kali. Dengan menggunakan rumus tadi maka keluarlah nilai 0,007 dan penyuluhan disitu adalah kegiatan tatap mukanya, sedangkan persiapannya dinilai dalam kegiatan lain.

Jadi nilai 0,007 itu, diperoleh dari suatu perhitungan berdasarkan masukan hasil survey bersama antara Deptan dan Menpan yang dilakukan pada waktu itu. Sekarang dengan adanya perubahan-perubahan misalnya saja perubahan hari kerja maka nilai tersebut mungkin

dengan Program Penyuluhan Pertanian, kalau programnya saja sebagai acuan operasionalisasi kegiatan penyuluhan masih terpisah-pisah berdasarkan kepentingan sub sektor maka jelas sistem kerjanya pun perlu dipertanyakan kemangkusan dan kesangkilannya.

Begitu halnya dengan pengaturan Satuan Administrasi Pangkal (Satmin-kal) penyuluh pertanian seringkali menimbulkan interpretasi yang berbeda seolah penyuluh hanya berada di bawah kontrol sub sektornya padahal di tingkat lapangan kondisi itu tidak bisa dipertahankan secara kaku.

Upaya untuk menyempurnakan Sistem Kerja Penyuluh Pertanian dengan Programnya sekarang ini mulai digarap oleh Pusat Penyuluhan Pertanian, dari hasil pengkajian yang dilakukan

oleh Pusat Penyuluhan Pertanian mengenai Sistem Kerja Penyuluh Pertanian diperoleh rumusan bahwa Sistem Kerja Penyuluh Pertanian yang akan datang harus mencakup 5 sub sistem yaitu:

1. Aspirasi petani nelayan beserta keluarganya
2. Kebijakan/program pembangunan pertanian dinas-dinas lingkup pertanian
3. Program Penyuluhan Pertanian
4. Sumber teknologi, informasi (termasuk informasi pasar), inovasi sosial ekonomi
5. Kemahiran dan etos kerja penyuluh pertanian di bidang falsafah, prinsip, pendekatan, metode dan teknik penyuluhan pertanian.

sudah tidak relevan lagi, maka wajar kalau sekarang ini ditinjau kembali, demikian tambahnya kemudian. Pada awalnya, penentuan penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional penyuluh pertanian ini didasari dan berangkat dari pola BIMAS, sehingga pola intensifikasilah yang lebih banyak mewarnai butir-butir rincian penilaiannya.

Dalam pada itu Hardjanto-pun menjelaskan pula bahwa substansi pengaturan penetapan angka kredit bagi jabatan fungsional penyuluh pertanian ini sepenuhnya diserahkan kepada Departemen Pertanian selaku Departemen Teknis.

Pemanfaatan peluang ini akan terpulung pada Departemen Pertanian untuk dapat secara lebih seksama dan lebih cermat menyusun substansi pengaturan angka kredit kegiatan penyuluh pertanian yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi penyuluh pertanian serta cocok, akurat dan efektif untuk mengembangkan profesionalisme penyuluh pertanian serta sekaligus mampu mengantisipasi tantangan pembangunan pertanian di masa datang.

Secara umum pengembangan jabatan fungsional bertujuan untuk : Pemantapan Profesionalisme, Pengembangan Karier Pegawai dan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat. Prinsip dalam jabatan fungsional pada dasarnya

adalah setiap pekerjaan yang ada dalam jabatan fungsional tersebut dibuat dengan serinci mungkin dengan sekuens dan metodologi yang telah ditetapkan. Setiap orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut akan dinilai, dan nilai inilah yang menunjukkan kredibilitas pejabat fungsional itu.

"Secara ringkas dalam jabatan fungsional, tanggung jawab dan tanggung gugat terhadap pekerjaannya bersifat mandiri dan setiap tetes keringatnya itu dinilai. Dengan kata lain kita mengistilahkan appraisal by performance", demikian menurut Hardjanto kepada ekstensia.

Oleh karena itu, klarifikasi yang jelas dan tegas mengenai sosok penyuluh pertanian profesional yang didambakan dan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat pertanian sekarang dan masa datang, merupakan bahan dasar untuk dijadikan pertimbangan dan rujukan dalam menyusun kerincian butir-butir yang harus dinilai angka kreditnya.

Profesi penyuluh pertanian yang bagaimanakah yang kita idam-idamkan itu? Profesi penyuluh yang tidak gamang, yang senantiasa eksis dan dibutuhkan oleh masyarakatnya. Profesi penyuluh yang mampu memberikan jaminan kesempatan dan lahan bagi para penyuluhnya untuk dapat mengaktualisasikan diri dan mengembangkan

Walaupun baru sampai tahap pengkajian tetapi hal ini sudah memberikan angin segar bahwa Sistem Kerja Penyuluh Pertanian telah diberi porsi untuk ditelaah, tinggal hasil pengkajian ini dapat diwujudkan kedalam suatu bentuk yang lebih operasional lagi.

Kehadiran Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor OT.210/396/Mentan/XII/94 tanggal 5 Desember kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I di Seluruh Indonesia tentang Petunjuk Pendayagunaan Balai Penyuluhan Pertanian, Penyuluh Pertanian serta Pembinaan Kelompok tani-nelayan, menyiratkan suatu niat mulia untuk menata kembali penyelenggaraan penyuluhan pertanian sambil menunggu

berbagai penyempurnaan yang mungkin akan dilakukan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Penyuluhan pertanian adalah pekerjaan yang didukung oleh kegiatan berbagai pihak, maka penyuluh pertanian perlu dibekali dengan perangkat lunak mengenai Tata Kerja dan Tata Hubungan Kerja Penyuluh Pertanian.

Kebutuhan akan adanya Pedoman Tata Kerja dan Tata Hubungan Kerja Penyuluh Pertanian ini dilontarkan kembali oleh A. Rifai Hussein yang menyatakan bahwa dengan kebijaksanaan desentralisasi, reorganisasi institusi dalam Departemen Pertanian serta kompleksitas masalah dalam menghadapi tantangan pembangunan pertani-

jenjang kariernya guna memperoleh penghidupan dan kehidupan yang layak dan terhormat di tengah masyarakatnya. Penyuluh yang profesional, yang diakui kredibilitasnya, yang dirasakan manfaat kehadiran dan pengabdianya oleh masyarakat yang dilayaninya dan lingkungan setempat di mana dia berada dan berkiprah.

Sistem angka kredit bagi jabatan fungsional penyuluh pertanian yang baru nanti hendaknya mampu memberikan jaminan kepastian akan tercapainya tujuan mengembangkan profesionalisme, jenjang karier penyuluh pertanian dan meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakatnya.

Pengalaman sepuluh tahun lebih melaksanakan sistem angka kredit bagi para penyuluh pertanian kita dengan segala macam permasalahan yang dijumpai selama ini seyogyanya dapat memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran baru bagi upaya penyempurnaannya. Secuil ungkapan permasalahan seperti telah diuraikan di atas merupakan pengalaman ber-harga untuk dijadikan bahan telaahan dalam pelaksanaan *meninjau kembali* pengaturan sistem angka kredit ini.

Beberapa hal yang perlu dicatat untuk dijadikan bahan pertimbangan adalah pertanya-

an mengenai apakah sistem penilaian angka kredit yang sekarang ini sudah sepenuhnya mampu mencerminkan tingkatan kemampuan dan profesionalisme penyuluh di setiap jenjang tingkat jabatannya? Apabila sistem penilaian untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional penyuluh ini tidak mencerminkan tingkatan kemampuan dan profesionalismenya, maka eksistensi dan kredibilitas profesi penyuluh akan senantiasa "dipertanyakan" orang.

Kerincian uraian tugas pokok dan fungsi penyuluh di setiap jenjang lingkaran jabatannya perlu dipertajam dan dipertegas serta terukur secara akurat dan efektif dalam membangun profesionalismenya.

"Memperinci uraian tugas pokok yang sejelas mungkin adalah tugas dari Departemen Teknis untuk membuatnya. Dalam perincian tugas tersebut harus dilengkapi pula dengan petunjuk teknisnya. Misalnya bagaimana penilaian untuk suatu pekerjaan yang dilakukan secara sendiri dengan yang dilakukan secara kelompok, demikian pula cara atau mekanisme penilaiannya. Perlu diingat bahwa penilaian angka kredit ini dilakukan oleh rekan sejawatnya yang lebih senior dalam suatu tim bukan oleh atasannya, bisa saja oleh atasannya tetapi yang punya keahlian dalam bidang itu. Jadi petunjuk teknis yang rinci

an dengan orientasi agribisnis dan agro industri diperlukan adanya suatu tata kerja dan tata hubungan bagi penyuluh dalam melaksanakan tugas fungsinya.

"Ini sudah harus menjadi tugas Pusat Penyuluhan Pertanian untuk merumuskan Pedoman Tata Kerja dan Tata Hubungan Kerja Penyuluh Pertanian yang merupakan sistem kerja penyuluh pertanian yang operasional setelah kita mencermati sistem kerja penyuluh pertanian yang lalu", ungkapnya pada *ekstensi*.

Sistem Kerja Penyuluh Pertanian yang mangkus dan sangkil sangat menentukan keberhasilan upaya yang dilakukan berbagai program yang memunculkan efek sinergis oleh

karenanya sistem kerja penyuluh pertanian harus memiliki ikatan terhadap program peningkatan produksi berbagai komoditas prioritas nasional, provinsi, kabupaten bahkan kecamatan yang bersangkutan yang secara cermat mendudukkan usahatani sebagai sentra sumber nafkah bagi kehidupan dan penghidupan dengan petani sebagai pelaku utama yang mandiri.

Pendeknya, dalam Sistem Kerja Penyuluh Pertanian harus tampil kelangsungan proses belajar mengajar petani-nelayan, yang dilandasi dengan skenario interaksi, komunikasi, penampilan aspirasi serta intensitas intervensi aparatur, lembaga ekonomi dan sosial yang berkepentingan dalam kegiatan usahatani.

dan jelas akan mengurangi unsur subjektivitas dalam penilaian", demikian ungkap Hardijanto lebih lanjut.

Selain itu, rincian penilaisian dalam uraian butir kegiatan seyogyanya bukan hanya berorientasi dan mengacu pada proses dan volume



pelaksana-an kegiatannya saja, tapi perlu juga mengacu pada penilaian terhadap kualitas output kegiatannya. Penilaian yang secara tajam berorientasi kepada kualitas out-put pelaksanaan kegiatan akan sangat mendorong upaya peningkatan kualitas kemampuan dan profesionalisme penyuluh. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah masalah penempatan kedudukan dan pemeranan tugas seorang penyuluh. Banyak dijumpai keadaan di mana jenjang jabatan penyuluh pertanian tidak menampakkan secara nyata perbedaan kedudukan dan peranan tugasnya, terutama para penyuluh yang bertugas di lapangan. Pemeranan tugas seorang Asisten Penyuluh, Ajun Penyuluh dan Penyuluh Pertanian di lapangan tampaknya sama saja, tidak ada perbedaan yang nyata. Kondisi seperti ini sudah barang tentu akan sangat tidak mendukung bagi pengembangan karier dan profesionalismenya. Pemeranan tugas ini sebenarnya harus diwujudkan, diproses dan menjadi tanggungjawab si Penyuluh itu sendiri, karena sebagai pejabat fungsional ia bekerja secara mandiri. Namun demikian, hal inipun tidak seluruhnya dapat diatur oleh mereka sendiri, karena secara faktual sistem kerja penyuluhan pertanian kitapun belum sepenuhnya mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan sistem kerja

Rancang Bangun Wilayah, Tuntutan Profesi Penyuluh Pertanian

Tantangan masa depan pembangunan wilayah dengan pemberlakuan kebijaksanaan desentralisasi, menuntut rekayasa dan rancang bangun wilayah yang spesifik lokasi. Hal ini akan menempatkan wilayah sebagai sentra pengembangan program-program pembangunan.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan wilayah adalah adanya suatu pola perilaku khas masyarakat pedesaan yang terkait dan terikat dengan lingkungan sehingga setiap datangnya suatu bentuk pembaharuan

akan direspons sesuai dengan pola budaya yang ada.

Dengan demikian diperlukan suatu pola atau rancang bangun wilayah yang mencerminkan proses berlangsungnya perubahan perilaku yang menyangkut peningkatan kemampuan dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara optimal dalam dimensi waktu, wilayah, tatalaksana, sistem agribisnis dll.

Ditinjau dari pendekatan wilayah terpadu, maka kedudukan Balai Penyuluhan Pertanian menjadi sangat penting sebagai simpul koordinasi berdasarkan strata yang khas dengan berbagai kepentingan pencapaian program di wilayah.

mandiri yang ideal. *"Kadang saya merasa bingung tentang peranan penyuluh di lapangan, contohnya, ada ajun penyuluh pertanian muda dengan golongan IIId, dan Penyuluh Pertanian Utama Muda dengan golongan IIId, sama-sama melaksanakan kegiatan pengujian, dan keduanya mempunyai nilai yang sama karena jenis pekerjaannya sama. Saya sendiri bertanya apakah ada bedanya antara jenjang kepangkatan dengan kualitas kerja seorang penyuluh?"*, ungkap seorang penyuluh kepada ekstensia.

Masih ada keluh penyuluh lainnya ialah mengenai batas jenjang kepangkatan bagi jabatan fungsional penyuluh pertanian yang hanya sampai jenjang jabatan Penyuluh Pertanian Utama Muda dengan Pangkat Pembina Utama Muda, IV/c.

Pertanyaan mereka apakah profesi penyuluh itu tidak layak untuk mencapai jenjang jabatan dan kepangkatan tertinggi yang tersedia bagi PNS lainnya? Apakah profesi penyuluh itu termasuk golongan *profesi kelas dua*? Pertanyaan yang cukup *"nyekit"* memang, dan ketika hal ini ditanyakan kepada Pembantu Asisten Bidang Diklat dan Karier Pegawai, Hardijanto menjelaskan bahwa hal ini sudah akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (P.P. 16 Thn.1994 Ps.2) tentang Rumpun Jabatan Fungsional yang membagi Jabatan Fungsional menjadi :

a). Jabatan Fungsional Keahlian, dan b). Jabatan Fungsional Keterampilan. Batas jabatan dan pangkat tertinggi bagi Jabatan Fungsional Keterampilan adalah sampai Golongan IIIId., dan bagi Jabatan Fungsional Keahlian sampai Golongan IV/e. Peraturan ini pulalah yang kelak akan diacu dan dijadikan dasar untuk penyempurnaan Peraturan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian yang sekarang sedang diproses oleh Departemen Pertanian dan Menpan.

Para penyuluh pertanian kita untuk sementara dapat menarik nafas panjang dengan penuh harap terhadap adanya peluang ini. Semoga *kerut merut angka kredit* yang menjadi keluh penyuluh selama ini akan berubah menjadi bentangan jalan yang rata dan halus yang dapat secara mulus mengantarkan mereka ke jenjang profesionalisme yang terpercaya. Namun demikian, segala peraturan itu hanyalah sekedar sarana dan upaya yang bersifat *ekstrinsik*. Pada dasarnya, membangun kredibilitas profesi penyuluh pertanian dan profesionalismenya itu akan terpulung pada kekuatan motivasi *intrinsik* para penyuluhnya, yakni kecintaan, etos kerja dan jiwa kejuangan, tanggungjawab serta kedalaman dan kemurnian pengabdianya terhadap profesinya dan kepada masyarakat yang dilayaninya.

(22,rm)

"Rancang bangun dan rekayasa wilayah, harus terwujud sebagai karya penyuluh dalam satu tim yang utuh kalau mereka masih mengaku diri sebagai penyuluh", demikian ditandaskan oleh A. Rifai Hussein, Kepala Kantor Wilayah Deputan Jawa Barat.

Tantangan yang dilontarkan itu memang wajar karena perwujudan rancang bangun dan rekayasa wilayah harus dilandasi pada empat kegiatan pokok yaitu:

1. Pengkajian potensi wilayah dalam hal ini WKBPP, yang relevan dengan pencapaian sasaran program pembangunan pertanian dan optimasi pendayagunaan sumberdaya manusia dan alam.
2. Identifikasi kemampuan petani dalam adopsi teknologi, serta kebutuhan petani dalam pengelolaan serta pengembangan usahatani dalam skala yang efisien.
3. Perumusan rekomendasi usahatani yang dapat dikembangkan untuk ditawarkan kepada petani-nelayan
4. Identifikasi faktor penentu serta pemantapan masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan penyusunan pola usahatani di WKBPP.
5. Pengembangan partisipasi masyarakat serta penerapan intervensi program yang sesuai.



Iswahyudi
Penyuluh Kab. Pandeglang

Menilik dari kegiatan yang harus ada dalam Penyusunan Rancang Bangun dan Rekayasa Wilayah maka strata wilayah BPP dengan basis ekosistem dan usahatani yang khas memerlukan pendukung dari wilayah administrasi kabupaten yang akan memadukan sekaligus merupakan pangkalan BPP - BPP yang berada di wilayah tersebut.

"Barangkali diperlukan adanya suatu institusi di tingkat kabupaten yang secara fungsi memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan kegiatan penyuluh sebagai "District Agricultural Improvement Station", dimana interaksi penyuluh akan lebih nyata lagi" demikian ungkap A Rifai Hussein selanjutnya.

Rancang bangun dan rekayasa wilayah ini merupakan wujud suatu rancangan program pembangunan usahatani di WKBPP yang menjadi rujukan dalam penyusunan program penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya. *"rancang bangun dan rekayasa wilayah memang memberikan peluang untuk mengembangkan profesi penyuluh pertanian, tetapi belum semua penyuluh menyadari akan hal itu karena persepsi tentang rancang bangun dan rekayasa wilayahpun masih berbeda-beda"*, begitu tutur Iswahyudi, penyuluh pertanian di Kabupaten Pandeglang.

Penerapan rancang bangun wilayah ini juga disambut dengan antusias oleh para petani, Subani, Ketua Rembug Harian KTNA Jawa Barat yang juga Ketua KUD Palasah Majalengka menyatakan kalau petani sudah mengerti apa itu usaha yang menguntungkan maka pekerjaan pertama adalah merancang kegiatan usaha itu berdasarkan kesepakatan dan masuk dalam rancangan pengembangan wilayah sehingga jelas kalau memerlukan pelayanan akan mudah menanganinya.

Pernyataan Subani tentang pentingnya rancang bangun wilayah, diperkuat

oleh Sabu Sutarya, Penyuluh di WKPP Palasah yang menyatakan bahwa di wilayah BPPnya memang rancang bangun dibuat karena dirasakan kepentingannya, dengan adanya rancang bangun tersebut akan memudahkan untuk menyerasikan antara keinginan petani dengan program yang ada dan juga kelancaran pelayanan yang erat kaitannya dengan kegiatan usahatani.

"Peran KTNA dan KUD, akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan rancang bangun ini, dan bagi saya ada rangsangan untuk terus berkreasi mencari berbagai alternatif pola usahatani yang sesuai dengan harapan petani", demikian ungkap Sutarya selanjutnya.

Karena penyusunan rancang bangun dan rekayasa wilayah ini sering dikaitkan dengan program intensifikasi maka seringkali penyuluh menganggap

spesifikasinya untuk menghasilkan rekayasa teknologi yang secara nyata harus sesuai dengan kondisi lingkungan serta kemampuan petani-nelayan yang menjadi mitra kerjanya.

Membangun Etos Kerja Penyuluh Pertanian

Tugas penyuluh pertanian adalah mengembangkan kemampuan petani nelayan dalam menguasai, memanfaatkan dan menerapkan teknologi yang berhasil guna bagi pengembangan usahatannya yang lebih menguntungkan dengan pelaksanaan berbagai metoda penyuluhan pertanian.

Pada saat seorang penyuluh berhadapan dengan masyarakat petaninya, maka seorang penyuluh harus menampilkan dirinya sebagai pendidik orang dewasa yang menguasai psikologi dan

Membangun etos kerja penyuluh adalah memadukan etika sebagai acuan moralitas dengan metoda sebagai cara untuk merubah perilaku petani ke arah yang lebih baik

bahwa ini hanyalah merupakan pekerjaan yang melulu dikerjakan oleh penyuluh yang terlibat dalam kegiatan intensifikasi saja.

Padahal bila dicermati lebih dalam lagi maka melalui rancang bangun dan rekayasa wilayah ini akan terlihat wujud karya dan karsa penyuluh dalam satu kesatuan kelompok untuk menyelaraskan antara kepentingan-kepentingan program dengan aspirasi petani dalam satu tatanan sistem usahatani berdasarkan skala usaha pada strata wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian(BPP), dengan basis ekosistem yang khas.

Bagi peningkatan kemampuan penyuluh, maka interaksi yang terjalin melalui penyusunan rancang bangun dan rekayasa wilayah ini akan mengasah kemampuan para penyuluh untuk bisa bekerja secara kelompok berdasarkan

komunikasi pendidikan orang dewasa dengan berlandaskan falsafah dan misi penyuluhan pertanian.

Menilik kepada tugas yang menjadi mandatnya ini, maka peranan penyuluh pertanian banyak menentukan keberhasilan pembangunan pertanian sehingga kepada mereka perlu diberikan dorongan atau motivasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokoknya.

Motivasi erat kaitannya dengan membangun etos kerja seorang penyuluh, baik itu motivasi yang dibangun secara internal oleh penyuluh itu sendiri maupun motivasi yang dibangun secara eksternal oleh berbagai pihak yang mempunyai kaitan dalam membangun kemampuan penyuluh pertanian.

Secara internal, penyuluh pertanian harus membangun kesadaran akan tugas



Ir. Syamsudin Abbas
Kepala Badan Diklat Pertanian

dan fungsinya serta kepedulian atau keberpihakan terhadap kepentingan petani dengan berinisiatif untuk melengkapi dirinya dengan informasi dan inovasi mutakhir dan juga terus meningkatkan kemampuannya dalam metodik dan didaktik yang dilandasi dengan etika penyuluhan pertanian.

Membangun etos kerja penyuluh pertanian adalah memadukan etika dan metoda, etika adalah acuan moralitas sedangkan metoda adalah cara, secara mudak kedua hal ini harus dikuasai oleh penyuluh, sekarang seringkali metoda maju lebih dulu dibanding etika sehingga secara internal kurang membangun rasa cinta dan daya juang terhadap tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya.

Meningkatkan motivasi internal bagi penyuluh, pada dasarnya tidak dapat dengan begitu saja tumbuh tanpa terjadi suatu proses yang melibatkan secara emosional antara persepsi diri penyuluh tersebut dengan masyarakat petaninya yang menyangkut rasa kepedulian, keberpihakan serta kecintaan yang terwujud melalui karya bersama.

Secara eksternal, telah dilakukan berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan motivasi berprestasi bagi para penyuluh pertanian baik itu berupa pendidikan dan pelatihan, fasilitas kerja, tunjangan jabatan fungsional serta

berbagai bentuk kegiatan yang menunjang terhadap peningkatan kualitas tugas pokoknya sebagai penyuluh.

Tujuan pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh pertanian dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensinya sehingga mereka mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara baik, yang bukan hanya sekedar meningkatkan produksi saja tetapi keseluruhan aspek dalam mengembangkan usahatani petani yang menjadi mitranya.

Ir. Syamsudin Abbas, Kepala Badan Diklat selaku penanggung jawab penyelenggaraan Diklat di Departemen Pertanian ini menekankan bahwa tujuan diklat bagi penyuluh pertanian bukanlah agar mereka mampu meningkatkan produksi dan pendapatan petani-nelayan tetapi agar mereka mampu meningkatkan kompetensi petani-nelayan dalam berusahatani yang menguntungkan.

"Tidak tepat kiranya bila ada penyelenggara diklat yang mengatakan bahwa meningkatnya produksi dan pendapatan petani nelayan adalah hasil diklat, yang tepat adalah kegiatan diklat telah mampu membantu meningkatkan produktivitas petani-nelayan", demikian ungkapnya pada ekstensia.

Selanjutnya lagi Syamsudin Abbas juga menerangkan bahwa melalui berbagai jenis pendidikan dan latihan para penyuluh pertanian diharapkan memiliki moral yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur, memandang positif terhadap keberadaan petani-nelayan, jiwa korsa dan motivasi kerja yang tinggi serta profesional dalam penguasaan iptek yang sesuai dengan perkembangan usahatani yang makin maju.

Mencermati tujuan yang telah diungkapkan tadi maka peran diklat mempunyai bobot yang cukup besar dalam meningkatkan kemampuan para penyuluh namun model diklat yang bagaimana yang mampu secara efektif dapat menjawab tantangan yang

dihadapi oleh para penyuluh itulah yang menjadi sasaran utama pengembangan diklat terutama dengan iklim desentralisasi yang mau tidak mau harus menampilkan wajah dan kepentingan wilayah.

Jenis diklat bagi penyuluh pertanian terdiri dari pendidikan formal yang terdiri dari program diploma, diklat Ahli Penyuluhan Pertanian (APP), Sekolah Tinggi Perikanan (STP), Pendidikan Tinggi Penyuluhan Pertanian (PTPL) dan program S1, S2, S3 atau Sp1, Sp melalui tugas belajar serta pelatihan-pelatihan berupa latihan dasar, penjenjangan, penyesuaian penyuluh dan pelatihan-pelatihan teknis.

Pendidikan formal bagi penyuluh merupakan sesuatu yang sangat didambakan karena selain merupakan barang langka juga dapat menaikkan status yang menunjukkan kredibilitas si penyuluh itu sendiri, tetapi kecenderungan yang ada pada saat sekarang ini adalah semakin berkurangnya kesempatan bagi penyuluh untuk bisa mengikuti pendidikan formal tersebut.

"Sekolah lagi?, semua orang pasti mau tetapi yang saya pertanyakan sebetulnya bagaimana aturannya kelihatannya tidak begitu jelas informasi yang diterima di lapangan, seharusnya semua penyuluh itu mempunyai kesempatan yang sama tetapi seringkali yang memperoleh kesempatan itu adalah orang-orang tertentu saja, yang seperti saya ini yang bertugas jauh dari pusat dan ibukota provinsi mendapat kesempatan sekolah itu adalah suatu keajaiban", demikian seorang penyuluh dari wilayah Indonesia Timur mengungkapkan kepada ekstensia.

Urusan kesempatan memperoleh pendidikan formal seringkali menjadi pembicaraan yang cukup hangat dalam setiap pertemuan para penyuluh pertanian. Selain kesempatan yang memang sangat langka juga ilmu yang

diperoleh yang kadang kurang operasional di lapangan. Bila pada PJP I lebih banyak kesempatan belajar bagi penyuluh dengan titik berat pada substansi teknis maka untuk masa mendatang barangkali seimbang antara substansi teknis dengan sosiologi, komunikasi serta penganalisaan dan pengembangan wilayah kalua upaya untuk menambah volume tugas belajar ini akan dikembangkan lagi.

Peningkatan kemampuan penyuluh pertanian tidak selalu harus melalui tugas belajar saja kalau memang kesempatan itu terbatas sebetulnya hal ini bisa dilakukan oleh si penyuluh sendiri yang tentu saja konsekuensi pembiayaan ditanggung oleh yang bersangkutan. Untuk hal ini telah ada surat edaran dari Kepala Badan Diklat kepada semua unit kerja di lingkup Departemen Pertanian mengenai kesempatan belajar secara formal berikut aturan mainnya antara lain izin dari atasan, pengaturan waktu dan sebagainya.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Diklat ini memang memberi peluang baru untuk meningkatkan kapasitas intelektual penyuluhnya, hal lain yang sekarang sedang dicoba dilakukan adalah dengan melaksanakan Pendidikan Tinggi Penyuluhan Pertanian (PTPL) yang bekerjasama dengan Universitas Terbuka.

"Sayang sekali, setelah program ini berjalan hampir empat tahun minat penyuluh untuk memanfaatkan peluang ini berjalan kurang menggenbirakan, padahal dengan mengikuti PTPL, penyuluh dapat belajar tanpa meninggalkan tugasnya di lapangan", demikian menurut Syamsudin Abbas.

Ironis sekali pada saat kemandirian menjadi kata kunci untuk menggerakkan petani-nelayan, penyuluhnya sendiri masih belum tergerak inisiatifnya untuk menambah pengetahuannya yang notabene akan meningkatkan kemam-

puannya dalam berhadapan dengan masyarakat petaninya.

Tetapi bila ditelaah lagi mengenai program PTPL ini ada beberapa hal yang perlu disempurnakan menyangkut kriteria, batasan umur dan jurusan pendidikannya.

"Saya sudah isi formulir dan menghitung-hitung tabungan untuk biaya belajar di PTPL, tetapi setelah tahu ada pembatasan umur tidak jadi saya ikut program itu dan akhirnya saya mengikuti pendidikan di perguruan tinggi swasta saja walaupun biayanya relatif lebih mahal", ungkap seorang penyuluh lapangan senior kepada ekstensia.

Pelatihan bagi penyuluh pertanian dimaksudkan untuk memberi isi dan pengembangan kapasitas terhadap tugas pokoknya sebagai penyuluh pertanian, dan untuk ini dilakukan melalui 4 jenis pelatihan yaitu:

1. Pelatihan Dasar Penyuluh
2. Pelatihan Penjenjangan Penyuluh
3. Pelatihan Penyesuaian penyuluh
4. Pelatihan teknis/keterampilan khusus.

Pelatihan dasar, penyesuaian dan penjenjangan bertujuan untuk membekali penyuluh dalam menjalankan

tugasnya yang menyangkut pengetahuan penyuluhan pertanian, dinamika masyarakat pedesaan. Ini merupakan pelatihan yang sebetulnya sifatnya wajib diikuti oleh semua penyuluh.

Faktanya di lapangan untuk pelatihan yang wajib diikuti oleh penyuluh belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan banyak penyuluh yang belum mengikuti pelatihan dasar sementara masa tugasnya sudah lebih dari lima tahun, atau ada yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan namun belum mengikuti pelatihan dasar misalnya.

"Pada awal seorang penyuluh itu masuk dalam dunia kerjanya maka dia harus memperoleh pelatihan yang mengenalkan dia akan dirinya, posisinya dan lingkungan yang akan dimasukinya, ini akan memudahkan pada proses pelatihan yang berkaitan dengan substansi nantinya", demikian Dra. Ieda Purnomo Sigit Sidi menyatakan kepada ekstensia.

Barangkali kalau Pelatihan Dasar dan Penyesuaian ini masih akan dilaksanakan, maka apa yang telah diungkapkan oleh Ieda Purnomo Sigit Sidi ini wajar untuk dijadikan salah satu pertimbangan dalam penyusunan kurikulum pelatihan tersebut.

Pelatihan tentang pengetahuan penyuluhan pertanian sekarang ini dirasakan kepentingannya mengingat kondisi petani-nelayan yang sudah semakin maju dan semakin beragam yang tentunya diperlukan adanya tambahan senjata bagi para penyuluh pertanian untuk mengembangkan kegiatan yang tepat.

Kehadiran Balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pertanian (BPPFP), sudah seyogyanya memberi satu terobosan dalam pengembangan pelatihan-pelatihan yang menyangkut peningkatan kemampuan para penyuluh dalam pelaksanaan tugas fungsionalnya.



Dra. Ieda Purnomo Sigit Sidi
Psikolog/Konsultan BKKBN

Hal ini diungkapkan oleh Syamsudin Abbas bahwa BPPFP sedang menggarap penyempurnaan kurikulum yang menyangkut pengetahuan penyuluhan pertanian, komunikasi, penyusunan program penyuluhan, pemilihan dan penggunaan media dan metoda, sehingga secara bertahap kedepannya para penyuluh ini akan dilatih kembali untuk penyegaran.

Reorientasi penyuluhan pertanian haruslah mewarnai bentuk pelatihan bagi para penyuluh yang akan diselenggarakan, mengingat pada bagian terdahulu diungkapkan bahwa Pusat Penyuluhan Pertanian sedang menggarap mekanisme atau tata laksana Sistem Kerja Penyuluh Pertanian maka dalam penyusunan materi ataupun kurikulum pelatihan sudah seharusnya mengikuti anjakan yang akan diterapkan secara operasional di lapangan.

Selain pelatihan mengenai penyuluhan pertanian, para penyuluh juga memperoleh kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan teknis atau keterampilan khusus yang biasanya menyangkut pada satu substansi baik itu komponen teknologi maupun suatu sistem usahatani.

Apabila pelatihan yang menyangkut penyuluhan pertanian ini boleh dikatakan semuanya diselenggarakan oleh balai-balai latihan, untuk pelatihan teknis ini penyelenggaraannya bisa dilakukan oleh balai latihan, direktorat teknis/dinas sub sektor, balai penelitian atau juga oleh instansi lain yang mempunyai kepentingan terhadap keterampilan khusus yang harus dikuasai oleh penyuluh.

Diawali dengan keberhasilan pola Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT), maka pola diklat sekarang ini mengacu pada pola SL-PHT tersebut untuk itu dikenal ada SL-UBA, SL-DPG, SL Sapta Usahatani dan berbagai Sekolah Lapangan lainnya.



Secara konsepsi, pola Sekolah Lapangan ini merupakan suatu pola pendidikan berjenjang yang setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan usahatani berinteraksi bersama, menemukan bersama dan mencari jalan keluar bersama dengan prinsip kemitraan seperti yang telah dipaparkan oleh Russ Diltz dalam ekstensi edisi perdana.

Melalui pola SL-PHT, telah dibuktikan mampu mengubah peran penyuluh dari pembina menjadi pemandu yang handal dan untuk perubahan yang boleh dikatakan sebagai perubahan progresif ini pola SL-PHT dijadikannya model untuk pola diklat di lingkup Departemen Pertanian ini.

Pada kenyataannya di lapangan pola Sekolah Lapangan ini dilakukan dengan berbagai versi, sehingga terkadang menimbulkan pertanyaan diantara penyuluh mengenai model Sekolah Lapangan tersebut, apabila SL-PHT dilakukan dengan cara begini, SL yang lain modelnya berbeda pula.

"Kalau mau konsisten, pola SL ini seharusnya dilakukan secara taat asas dengan demikian akan menjamin sampainya inovasi kepada petani langsung dan sekaligus mengasah penyuluhnya untuk menjadi lebih

profesional lagi", demikian menurut Ues Herdiana kepada *ekstensia*.

Berkenaan dengan penerapan Pola Sekolah Lapangan ini, Syamsudin Abbas menyatakan bahwa diklat dengan pola Sekolah Lapangan ini dilaksanakan untuk mendukung program nasional pembangunan pertanian yang menghendaki diterapkannya teknologi khusus, yang harus segera disebar-luaskan karena mempunyai dampak yang luas terhadap keberhasilan program tersebut.

Mengenai adanya berbagai versi Sekolah Lapangan, Syamsudin Abbas menambahkan bahwa pihaknya sekarang ini sedang berupaya untuk menyempurnakan pola tersebut dan juga membegosiasikan dengan berbagai pihak agar pola Sekolah Lapangan itu dapat diselenggarakan sesuai dengan prinsip dan kaidah yang benar.

Konsekuensi dari kesemuanya itu adalah tuntutan bagi para penyelenggara diklat untuk bisa meningkatkan kualitas dan profesionalismenya sehingga apa yang diperoleh melalui proses diklat akan secara efektif mempunyai kontribusi dalam meningkatkan kemampuan para penyuluh.

Selain diklat, satu upaya yang mungkin dapat meningkatkan motivasi bagi para penyuluh adalah dengan adanya tunjangan fungsional penyuluh pertanian.

Setelah menjalani perjuangan yang cukup panjang maka seiring dengan kehadiran Surat Edaran Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 17/Kpts/LP.410/I/1986 dan Nomor 01/SE/1986 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Penyuluh Pertanian maka tunjangan fungsional telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari atribut seorang penyuluh pertanian.

Pada awalnya tunjangan fungsional bergerak antara Rp 20.000,- sampai

dengan Rp 77.500,- dan sekarang setelah sepuluh tahun tunjangan fungsional bagi penyuluh bergerak naik menjadi Rp 40.000,- hingga Rp 200.000,-.

Apabila dilihat dari jumlahnya memang tunjangan fungsional bagi penyuluh pertanian mungkin tidak sebanding dengan curahan tenaga yang telah dilakukan dalam menjalankan tugas pokoknya apalagi bila dibandingkan dengan tunjangan fungsional lainnya seperti widiaiswara atau peneliti maka tunjangan fungsional bagi penyuluh jumlahnya memang relatif berada dibawah tunjangan kedua fungsional tadi.

Secara berseloroh seorang penyuluh dari Bali menyatakan bahwa walaupun tunjangan fungsional penyuluh itu sedikit tetapi bagi penyuluh tunjangan fungsional yang terbesar adalah amal yang akan dibayarkan di akhirat nanti.

Tunjangan fungsional pada dasarnya merupakan suatu bentuk motivasi dan juga penghargaan bagi pejabat fungsional agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, pemberian tunjangan fungsional ini bervariasi tergantung dari kebijaksanaan yang diambil oleh Departemen teknis dimana pejabat fungsional itu berada.

Menanggapi mengenai besar kecilnya jumlah tunjangan fungsional, Hardijanto staf Menpan menyatakan bahwa kebijaksanaan pemberian tunjangan fungsional itu didasarkan kepada beberapa aspek diantaranya profesi tersebut perlu didorong untuk kelancaran program prioritas pembangunan, profesi yang langka serta konfirmasi anggaran yang ada.

Selanjutnya Hardijanto juga menjelaskan bahwa sekarang ini melalui PP Nomor 16 Tahun 1994, Menpan akan meninjau kembali standarisasi dan struktur dari tunjangan fungsional sehingga secara obyektif dapat memberikan iklim yang cukup memungkinkan

bagi para pejabat fungsional ini untuk bekerja dengan baik.

Satu hal yang menggembirakan dan patut dicatat oleh para penyuluh adalah dari 53 jabatan fungsional yang telah ada di negeri ini baru 19 jabatan yang memperoleh tunjangan fungsional bahkan untuk jabatan fungsional penyuluh ini selain memperoleh tunjangan fungsional juga memperoleh perpanjangan usia pensiun.

"Berbahagialah penyuluh pertanian yang telah ditempatkan mempunyai peran yang cukup tinggi oleh pemerintah sehingga memperoleh tunjangan fungsional dan juga perpanjangan waktu pensiun", demikian Hardijanto menambahkan. Penjelasan

sebagai satu kesatuan korps profesional meskipun mereka terbagi ke dalam sub sektor masing-masing.

Satu kesatuan korps penyuluh pertanian yang profesional menuntut antara lain adanya rasa tanggung jawab terhadap profesi penyuluhan pertanian maupun kawan seprofesi dalam jabatan fungsional penyuluh pertanian sehingga upaya membangun sumberdaya manusia dan alih teknologi dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.

Sebutan sehari-hari bagi penyuluh pertanian seperti PPL, PPS, Penyuluh Sarjana serta Penyuluh Non Sarjana dalam Surat Edaran itu juga menyebutkan hendaknya istilah terhadap penyuluh itu dikembalikan kepada

Penyuluh Pertanian hendaknya dibina sebagai satu kesatuan korps profesional meskipun mereka terbagi ke dalam sub sektor masing-masing

yang telah diberikan oleh staf Menpan tersebut sudah selayaknya disyukuri, ternyata dibalik keluh kesah yang terdengar dengan kecilnya tunjangan fungsional ataupun ruwetnya aturan mengenai angka kredit, ada hal yang luput dari perhatian tetapi itu penting untuk diketahui dan direnungkan bersama.

Motivasi kerja penyuluh pertanian dapat juga terbangun dalam satu kesatuan kelompok, tuntutan dinamika masyarakat tani-nelayan yang semakin kompleks serta karakteristik wilayah yang berbeda harus melibatkan berbagai disiplin ilmu yang menuntut penyuluh untuk bekerja secara tim.

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pertanian kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I se Indonesia Nomor OT.210/396/Mentan/XII/94 tentang Petunjuk Pendayagunaan Balai Penyuluhan Pertanian dan Penyuluhan Pertanian serta Pembinaan Kelompok Tani-nelayan yang menyatakan bahwa penyuluh pertanian hendaknya dibina

sebutan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 17/Kpts/LP.410/I/1986 dan Nomor 01/SE/1986 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Penyuluh Pertanian yaitu:

1. Golongan II/a sampai dengan golongan II/c disebut *Asisten Penyuluh*
2. Golongan II/d sampai dengan III/b disebut *Ajun Penyuluh*
3. Golongan III/c sampai IV/c disebut *Penyuluh*

Menilik dari apa yang tersurat maupun tersirat dalam isi Surat Edaran tersebut maka jelas keberadaan penyuluh yang profesional menjadi tuntutan yang harus dipenuhi untuk menjawab tantangan perubahan orientasi pembangunan pertanian.

Perubahan orientasi pembangunan pertanian pada prinsipnya akan merubah tiga aspek esensial yaitu aspek tata nilai,

struktur dan teknologi yang harus berjalan selaras dengan pengelolaan usahatani yang modern yaitu usahatani berencana dan rasional, kerjasama dan saling ketergantungan, pemanfaatan teknologi tepat guna dan kelembagaan sosial ekonomi serta perilaku menabung dan pemupukan modal.

Menjawab tantangan perubahan orientasi itu akan terbukti dengan tampilnya kemampuan petani-nelayan sebagai hasil proses belajar yang terwujud dari interaksi sistematis dan berkelanjutan antara petani-nelayan dengan penyuluh pertanian yang berdasarkan prinsip kemitraan yang sejajar.

Dengan kebijaksanaan yang menitik beratkan pada kondisi mendekati penyuluh dengan petani-nelayannya, maka diharapkan munculnya penyuluh pertanian yang mampu merakit, mempergunakan, memanfaatkan dan merekayasa teknik dan metoda komunikasi sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat tani-nelayan di wilayah tempat penyuluh itu bertugas.

Nafas desentralisasi sebagai paradigma pembangunan yang mengarah kepada keberpihakan kepada masyarakat dengan dukungan pelayanan untuk menumbuhkan iklim kreatifitas, bekerjasama dan berani mengambil keputusan harus dijadikan titik berangkat pengembangan dinamika pelaku pembangunan pertanian termasuk pengembangan kemampuan penyuluh sebagai unsur penggerak terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat tani-nelayan.

Bias-bias warna yang tampil dari keragaan penyuluh pertanian pada saat sekarang ini adalah jejak langkah yang telah ditempuh dalam mengembangkan satu profesi bernama penyuluh pertanian, bak memandang cermin maka apa yang terpantul disana adalah wajah

yang mungkin ada saja kekurangannya. "Saya benar-benar akan mengembangkan profesionalisme penyuluh tersebut sebagai suatu tantangan" demikian ungkap Menteri Pertanian ketika diwawancarai ekstensia.

Wajarlah kiranya apabila Menteri Pertanian sendiri mempunyai perhatian yang serius terhadap pengembangan profesionalisme penyuluh pertanian dan mengangkat masalah pengembangan profesionalisme penyuluh pertanian ini sebagai satu tantangan yang harus dijawab.

Agar korps Penyuluh Pertanian dapat hadir dengan tegar dalam percaturan pembangunan pertanian yang serba cepat dan semakin modern ini maka penciptaan kegiatan pembinaan, pengembangan jiwa korsa serta etos kerja dan tempaan bagi penyuluh ini harus dijadikan komitmen bersama dari semua pihak yang berkepentingan dengan keberadaan profesi penyuluh pertanian.

Perjalanan panjang pengembangan profesi penyuluh pertanian tidaklah harus berhenti sampai dengan sekedar membaca apa yang telah dilakukan saja tetapi memerlukan suatu kerja keras yang hasilnya belum tentu akan dirasakan esok hari.

Pertanyaannya kembali kepada insan penyuluh pertanian itu sendiri, "Sudah siapkah kita menyambut perubahan dan kemajuan semacam itu?", atau penyuluh itu masih bergumam, "Masih jauhkah kita dari kemajuan itu?".

Jawaban kesemuanya itu adalah kemerdekaan ekspresi, kreatifitas, wawasan yang menjangkau kedepan serta kedewasaan bertindak untuk menghadapi kemajuan.

ranny mutiara
Behan : gp.ah,zz,mm

PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN dan KEWAJIBAN MEMBANGUN PENYULUH yang PROFESIONAL

Hasil wawancara ekstensi dengan Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian
Dr. Ir. H. Rochajat Harun, M.Ed.

Think tank

Fungsi Pusat Penyuluhan Pertanian

Kehadiran Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai mandat untuk menyelenggarakan kegiatan operasional penyuluhan pertanian tingkat nasional serta melaksanakan pembinaan teknis operasional penyuluhan pertanian yang dilaksanakan daerah. Fungsi yang harus dijalankan oleh Pusat Penyuluhan Pertanian ini dituangkan dalam SK Mentan Nomor 96/1994 diantaranya:

1. Perumusan Kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan dan penyusunan program penyuluhan pertanian
2. Perumusan metode dan sistem kerja penyuluhan
3. Pembinaan penyusunan program penyuluhan
4. Pembinaan dan perumusan identifikasi faktor penentu
5. Perumusan pola dan penyusunan rencana kebutuhan tenaga penyuluh
6. Peningkatan keterampilan petani dan pengembangan kelompok tani
7. Administrasi angka kredit tenaga penyuluh pertanian
8. Identifikasi teknologi serta penyusunan dan penyebaran materi penyuluhan
9. Penyiapan bahan standar dan pembinaan pendayagunaan sarana, biaya dan kelembagaan penyuluhan
10. Pembinaan dan evaluasi kegiatan operasional penyuluhan
11. Kerjasama Penyuluhan

Dari fungsi-fungsi tadi jelas bahwa kehadiran Pusat Penyuluhan Pertanian mengemban tugas untuk mengembangkan konsepsi yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian dalam suatu kesisteman pembangunan pertanian yang semakin dinamis baik yang menyangkut piranti keras maupun piranti lunak, jadi semacam think tank atau tangki pemikir begitu.





Penyuluh yang handal

Tuntutan Pembangunan Pertanian Sekarang Ini

Bukan berarti pada waktu-waktu yang lalu penyuluh kita tidak atau belum handal, tetapi kalau kita simak arah dari orientasi pemba-ngunan pertanian ke depan maka tuntutan-nya adalah kualitas sumberdaya manusia yang unggul. Kalau kebijaksanaannya saja mensyaratkan keunggulan, otomatis manusianya juga harus mampu mengimbangnya. Sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk membenahi para penyuluh supaya lebih mampu mengembangkan profesinya. Menurut saya ada 6 hal, yang menuntut me-ngapa penyuluh kita harus lebih profesional yaitu:

1. Era globalisasi yang serba terbuka, melewati batas-batas wilayah sehingga diperlukan pandangan dan wawasan yang lebih luas serta sikap kepekaan yang tinggi dalam mengambil tindakan.
2. Arus teknologi yang semakin cepat, baik teknologi produksi maupun sosial

ekonomi yang terus berlari sehingga kalau tidak diikuti, Penyuluh kita akan tertinggal.

3. Revolusi komunikasi, semakin canggih-nya peralatan komunikasi membuat semakin lancarnya arus komunikasi dan informasi, saatnya nanti penyuluh harus mampu berinteraksi dengan berbagai sumber dengan memanfaatkan berbagai alat komunikasi modern.
4. Klien yang semakin pandai, modern dan kritis.
5. Metodologi yang harus berorientasi kepa-da sasaran/klien dengan meningkatkan partisipasi.
6. Keterkaitan antara satu sistem dengan sistem lainnya tidak hanya yang me-nyangkut sistem dalam satu sektor bahkan dengan sektor lainnya.

Apabila penyuluhnya belum mampu melihat dimana posisi relatifnya terhadap ke enam tantangan tersebut, maka sulit sekali bagi mereka untuk mengembangkan profesio-nalsmenya.

Membenahi Penyuluh

Tantangan dan Kerja keras Pusluhtan

Penyuluh pertanian yang ada sekitar tiga puluh tujuh ribuan jumlahnya dengan kemampuan, minat yang bermacam-macam, inilah yang menjadi perhatian Pusat Penyuluhan Pertanian. Diperlukan pembenahan-pembenahan guna meningkatkan kinerja mereka sesuai dengan tugas pokoknya. Upaya-upaya yang sekarang sedang diperjuangkan oleh Pusat Penyuluhan Pertanian adalah;

Pertama, menyempurnakan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Ini merupakan landasan operasionalisasinya terutama

dengan pemberlakuan kebijaksanaan desentralisasi dan juga untuk memperkuat peranan penyuluh, karena kita ketahui bersama bahwa para penyuluh di lapangan pengelolaannya telah menjadi tanggung jawab daerah.

Kedua, meninjau kembali Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 73/MENPAN/1985 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Penyuluh Pertanian, ini yang barangkali ditunggu-tunggu oleh para penyuluh pertanian, setelah sepuluh tahun Surat Keputusan ini berlaku dengan segala macam kekurangannya maka sekarang dengan adanya peninjauan kembali terhadap butir-butir angka kredit tersebut, mudah-mudahan akan memberikan kejelasan dan mendukung penyuluh untuk memperoleh penilaian yang wajar sesuai dengan tugas pokoknya.

Ketiga, mengeluarkan pedoman-pedoman untuk kegiatan operasional di lapangan. Ada 4 pedoman yang mudah-mudahan bisa segera diluncurkan yaitu pedoman pembinaan kelompok tani, pedoman penyusunan program, pedoman pemilihan metoda penyuluhan serta pedoman monitoring dan evaluasi. Sekarang ini masih dalam tahap negosiasi dengan eselon I lainnya, mengingat karakteristik dari sub sektorpun perlu dijadikan pertimbangan agar pedoman-pedoman tersebut dapat operasional digunakan di lapangan.

Keempat, memunculkan anggaran penyelenggaraan penyuluhan di wilayah, sekarang sedang dilakukan studi bersama Bank Dunia yang juga menyangkut studi penganggaran, dengan memperkuat fungsi BPP. Hasil studi diharapkan dapat memberi masukan kepada daerah untuk bisa mengalokasikan anggaran bagi penyelenggaraan penyuluhan di BPP.



Sistem Kerja Mandiri

Arah Membangun Penyuluh yang Profesional

Saya melihat bahwa ke depan arah dari pembinaan penyuluh adalah membangun kemampuan sebagai konsultan di wilayah dalam arti dia mampu menjadi dinamisator, motivator, penghubung dan pendidik masyarakat petani dalam mengembangkan usahatani yang rasional dan berencana.

Mengingat kompleksitas dan spesifikasi dari wilayah yang berbeda-beda maka diperlukan adanya satu sistem kerja mandiri, dimana penyuluh tersebut mampu melakukan pengidentifikasian, penganalisaan dan menyusun rancang bangun wilayah serta melakukan pemecahan masalah yang timbul di wilayahnya secara mandiri dalam program penyuluhannya. Hal ini sejalan dengan sistem kerja jabatan fungsionalnya yang memang sudah diatur dalam sistem kerja mandiri.

Barangkali diperlukan semacam modul-modul yang bisa memandu penyuluh di lapangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, tutorialnya bisa dilakukan oleh penyuluh yang lebih senior. Melalui proses ini penyuluhpun melakukan proses belajar dari pengalaman dan peran penyuluh senior akan tampil dalam fungsi konsultansi dan konseling bagi penyuluh dibawahnya. Mengingat kompleksitas yang tinggi itu, maka sistem kerja mandiri para penyuluhpun seyogyanya harus berorientasi pula pada satuan kelompok fungsional di setiap tingkatan wilayahnya.

Tugas kelompok penyuluh yang ada di Pusat untuk mencari bentuk modul-modul sistem kerja mandiri bagi penyuluh yang luwes dan tentunya dapat diterapkan dengan mudah di lapangan.

Etos Kerja Penyuluh

Etika ditambah Kemampuan dan Metoda

Membangun etos kerja penyuluh bukan hanya sekedar memberikan berbagai pengetahuan tanpa disertai dengan bekal etika dan metoda. Pada saat sekarang ini ada sinyalemen bahwa penyuluh loyo, etos kerja menurun maka kita perlu untuk memberi suntikan kepada para penyuluh dengan mengingatkan kembali akan etika tersebut.

Dulu pernah ada satu upaya untuk menyebarluaskan etika ini tapi sekarang sepertinya suaranya sudah hilang. Menurut saya, etika ini perlu untuk diberikan pada penyuluh dan terus menerus diingatkan, caranya, etika penyuluhan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pelatihan apapun jenisnya. Harus dimunculkan kegiatan-kegiatan yang dapat membangun jiwa korsa penyuluh melalui temu profesi atau metoda pertemuan penyuluh lainnya dan mungkin saja kita munculkan satu jenis kegiatan yang secara khusus ditujukan untuk membangun motivasi berprestasi dengan pendekatan psikologis dimana etika menjadi salah satu materinya.

Penyuluh Pertanian di Wilayah

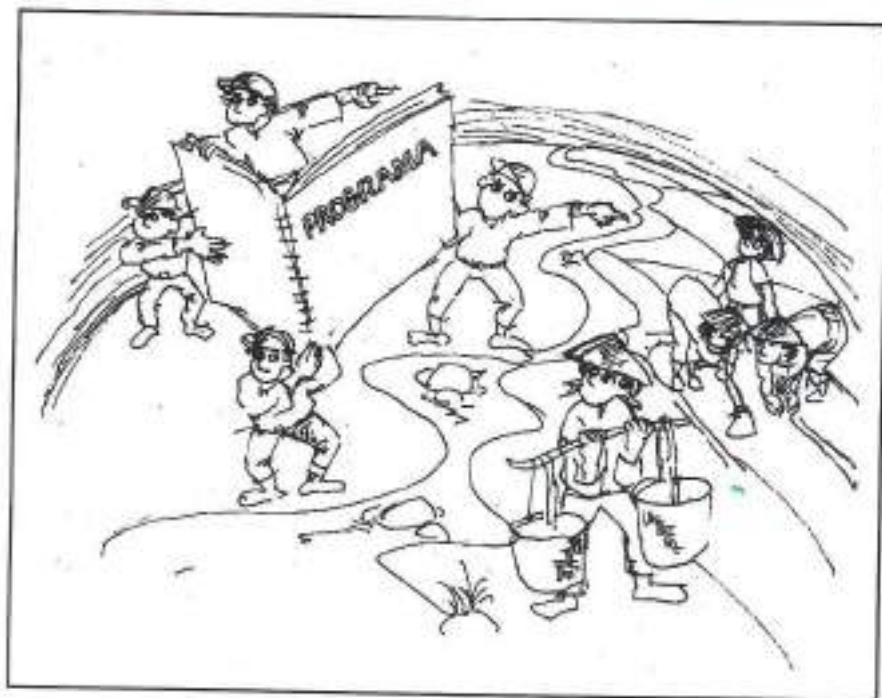
Satu Kesatuan Kelompok Penyuluh yang Bergerak Berdasarkan Program Penyuluhan

Penyuluhan pertanian bukanlah pekerjaan perorangan karena dalam pelaksanaannya harus didukung dan terkait dengan berbagai pihak, kebijaksanaan yang sekarang ini diambil dalam pembinaan bagi para penyuluh pertanian adalah membina sebagai satu kesatuan kelompok dengan BPP sebagai pangkalan para penyuluh dalam melakukan perumusan program, pengkajian, uji coba dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Sekarang hal ini mungkin belum sepenuhnya operasional, dengan adanya penyempumaan dari SKB Mentan dan Mendagri tentang penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang didalamnya juga termasuk pendayagunaan para penyuluh, Insya Allah hal ini akan segera terwujud.

Satu hal lagi dalam Surat Edaran Menteri Pertanian kepada Gubernur KDH tingkat I se Indonesia tentang Petunjuk Pendayagunaan BPP, Penyuluh Pertanian serta Pembinaan Kelompok tani-nelayan, Desember 1994, disitu disebutkan bahwa penyuluh harus dibina dalam satu kesatuan korps profesional meskipun mereka terbagi ke dalam sub sektor masing-masing.

Sementara ini yang sedang disiapkan adalah penyusunan pedoman sistem kerja dan program penyuluhan pertanian yang mempunyai sasaran dapat mengkoordinasikan kegiatan para penyuluh di lapangan. Mudah-mudahan pedoman ini bisa siap bersamaan dengan keluarnya SKB yang baru.



Stratifikasi Penyuluh

Jangan memberi kesan Eksklusif

Dulu kita mengenal stratifikasi penyuluh pertanian dengan istilah PPL, untuk penyuluh yang berhubungan langsung dengan masyarakat petani-nelayan, PPUP, untuk penyuluh yang mengembangkan program penyuluhan dan PPS, bagi penyuluh yang menjadi back stopper penyuluh lapangan dengan spesialisasi tertentu.

Kemudian kita juga mengenal stratifikasi penyuluh sarjana dan penyuluh non sarjana, dan sekarang stratifikasi penyuluh itu didasarkan pada golongan jabatan dengan sebutan asisten penyuluh, ajun penyuluh dan penyuluh.

Menurut saya stratifikasi penyuluh tanpa menunjuk pada jenjang wilayah ataupun pendidikan adalah satu faktor yang menunjukkan bahwa penyuluh mempunyai posisi yang sama yaitu membangun dinamika masyarakat tani-nelayan. Kesan eksklusif bahwa penyuluh lapangan pendidikannya cukup SPMA dan penyuluh di provinsi dan pusat harus sarjana atau doktor itu perlu dikaji kembali.

Adanya kebijaksanaan penyuluh sebagai kesatuan kelompok dengan pangkalannya di BPP, saya kira perlu dipertimbangkan kembali realokasi dari para penyuluh ini supaya setiap BPP benar-benar menjadi institusi fungsional yang diisi oleh satuan kelompok penyuluh yang profesional.

Spesialisasi Penyuluh Pertanian

Ciri Kapasitas dalam Kegiatan Penyuluhan

Istilah spesialisasi pada penyuluh memang dikenal pada penyuluh-penyuluh dengan strata sarjana dan muncul beberapa jenis spesialisasi mulai dari metodologi penyuluhan pertanian sampai pembenihan ikan, pokoknya beragam sekali.

Sekarang ini sudah saatnya spesialisasi ini untuk dikaji ulang karena saya juga tidak yakin apakah masih ada itu penyuluh yang bergerak dengan atribut spesialisasinya misalnya ya seperti tadi spesialisasi pembenihan ikan, jenis pekerjaan bagaimana yang menunjukkan atribut spesialisasinya itu rasanya sekarang ini samar sekali.

Saya telah menugaskan tim yang nantinya akan meninjau kembali mengenai angka kredit juga sekaligus melakukan penelaahan ulang terhadap spesialisasi penyuluh pertanian karena dua hal ini sangat erat kaitannya. Kalau seorang penyuluh mengaku diri punya spesialisasi tertentu maka hal ini harus tercermin dari perolehan angka kreditnya.

Saya berpendapat bahwa spesialisasi seorang penyuluh pertanian harus mencirikan kapasitasnya dalam kegiatan penyuluhan pertanian misalnya spesialisasi dalam pengembangan atau perencanaan wilayah, atau penyusunan program, atau spesialisasi lain yang erat sekali dengan proses kegiatan penyuluhan. Base-nya mungkin bisa komoditas tetapi dapat dibedakan bahwa spesialisasi ini adalah memang spesialisasi yang betul-betul dibutuhkan dan tidak sumir dengan spesialisasi pada jabatan fungsional lainnya.

Dasa Etika Penyuluh Pertanian

1. Penyuluh pertanian senantiasa menghormati dan memperlakukan petani-nelayan beserta keluarganya sebagai subyek dan mitra kerja yang berkedudukan sederajat dengan dirinya.
2. Penyuluh pertanian bukan bekerja untuk petani-nelayan melainkan bekerja bersama-sama petani-nelayan dan senantiasa membuka kesempatan kepada petani-nelayan untuk memutuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dipilihnya.
3. Penyuluh pertanian senantiasa menempatkan keinginan dan kebutuhan petani-nelayan menjadi dasar utama pertimbangan dalam mengembangkan program apapun bersama petani-nelayan beserta keluarganya.
4. Penyuluh pertanian tidak memaksakan pendapat maupun kehendak pribadinya atau pihak lain kepada para petani-nelayan yang dilayaninya meskipun hal tersebut mungkin dapat menguntungkan petani-nelayan.
5. Penyuluh pertanian senantiasa lugas, tulus dan jujur dalam menyampaikan informasi, saran dan rekomendasi dan tidak memanfaatkan kedudukan/jabatannya untuk kepentingan/keuntungan pihak lain.
6. Penyuluh pertanian senantiasa bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendapatkan cara pemecahan masalah yang terbaik dan paling menguntungkan bagi petani-nelayan yang dilayaninya.
7. Penyuluh pertanian senantiasa berdiri dipihak dan membela kepentingan petani-nelayan serta bekerja tanpa pamrih.
8. Penyuluh pertanian senantiasa berusaha menyerasikan kepentingan petani-nelayan dengan kepentingan pemerintah serta pihak-pihak lain yang terkait didalam pembangunan pertanian.
9. Penyuluh pertanian senantiasa bersikap dan bertingkah laku yang menghormati kepercayaan, aturan, norma dan adat-istiadat setempat serta senantiasa memperlihatkan budi pekerti dan akhlak yang luhur serta sikap kepemimpinan yang dapat diteladani.
10. Penyuluh pertanian senantiasa memelihara kesetiakawanan dan citra korps penyuluh pertanian atas prinsip "silih asih - silih asuh - silih asah" dengan menjunjung tinggi **Dasa Etika Penyuluh Pertanian**.

Perkiraan Perilaku Masyarakat Pedesaan dalam Pembangunan 25 Tahun Tahap Kedua

Oleh : *Prof. Sajogja*

Perilaku masyarakat adalah dorongan dari dalam dan dorongan dari luar dalam proses dialektika perkembangan sejarah masyarakat itu : peristiwa sebelumnya ikut menentukan apa yang terwujud kemudian.

Kita dapat mulai dari gambaran pertumbuhan penduduk Indonesia, juga dari perkiraan pertumbuhan ekonomi dalam masa 1990/2018 (sampai mencakup Repelita X a.l. dari Dr. Arsyad Anwar, Universitas Indonesia, 1990)

Yang kita perlu kembangkan adalah pemikiran lanjutan, yaitu bagaimana

- peluang pemerataan dalam pembangunan yang mencakup perubahan struktural (hubungan antar lapisan/golongan *seluruh rakyat*) dan
- genakan moral yang dapat mendasari perubahan struktural (modernisasi) itu hingga melestarikan gaya hidup yang lebih kuat menjamin terwujudnya cita-cita Pancasila di Indonesia abad 21.

Perilaku masyarakat pedesaan Indonesia dalam masa 25 tahun di depan kita sebagian ditentukan oleh sikap dan perilaku para pemimpin/pemuka Indonesia, dari pimpinan di Pusat sampai di Daerah dan di tingkat lokal (Kecamatan/Desa). Dalam hal itu kita dapat belajar dari masa 25 tahun sebelum ini, apa isi dan corak kepemimpinan Indonesia yang ditujukan pada masyarakat desa selama itu, dan perkiraan akan hasilnya, dengan memperhatikan apa yang hidup dalam aspirasi masyarakat desa itu sendiri : merekalah subyek yang paling menentukan upaya perbaikan nasib sendiri.

Mengikuti analisa Dr. Arsyad Anwar (UI, 1990) pertumbuhan penduduk Indonesia digambarkan, dalam masa 1990/2020 :

a. Pertumbuhan Penduduk

Tumbuh dari 180 sampai 183 juta (tahun 1990) menjadi 210 sampai 215 juta (tahun 2000) dan mencapai 254 sampai 270 juta, tahun 2020. (angka



Prof. Sajogja

Guru Besar
Sosiologi Pedesaan
Institut Pertanian Bogor

Solus Cakrawala yang membentang, maka rubrik Cakrawala akan membentangkan serangkaian tulisan tentang hasil penelitian, telaahan/analisa dan kajian yang berkenaan dengan Ilmu Pengetahuan Pertanian.

Redaksi menerima naskah telaahan/analisa kajian dan penelitian yang dikirimkan oleh para peminat Ilmu Pengetahuan Pertanian.

Naskah diisi 2 spasi sebanyak maksimal 10 halaman kuerto lengkap dengan foto pendukung tulisan atau dengan menggunakan program WS 4-8 (diikat dikirim kepada redaksi).

Tulisan dilengkapi dengan biodata dan identitas penulis (foto copy KTP/SIM). Redaksi berhak menentukan tulisan yang akan dimuat dalam rubrik Cakrawala dan tulisan yang tidak dimuat akan dikembalikan kembali kepada alamat penulis.

lebih kecil taksiran UI sendiri), dengan pertumbuhan rata-rata setahun 1,7 % sampai tahun 2000 dan lebih kecil 1,1% dalam masa 2000/2020.

Di satu pihak gambaran itu menunjukkan keberhasilan Program Kesehatan, Keluarga Berencana (dan upaya lain), di lain pihak jelas, penduduk masih terus bertambah, termasuk jumlah angkatan kerja, khususnya golongan muda yang pertama kali masuk (umur 15/19 tahun) dan golongan wanita. (Mereka golongan sasaran utama butir *partisipasi* dalam 8 jalur pemerataan sejak Repelita III).

Gejala pemusatan penduduk di pulau Jawa juga berlangsung, secara relatif hanya turun sedikit: tahun 1990 menjadi 140 juta (55% Indonesia). Proses urbanisasi juga berlangsung pesat, dari 52 juta tahun 1990 (25 sampai 29%) menjadi 132 juta (antara 48 sampai 52% penduduk). Bahkan penduduk desa mulai tahun 2000 secara absolut juga berkurang, dari 133 juta (tahun 2000) menjadi 122 juta (tahun 2020).

Di sini kami menyelipkan perkiraan sendiri:

1. jumlah petani menurun dari kurang lebih 16 juta atau 50% rumah tangga pedesaan menjadi 10 juta atau 25% rumah tangga pedesaan dimana separuh lebih petani itu bukan *petani penuh* tapi berpola nafkah ganda (sumber nafkah ke dua di luar pertanian).
2. kepadatan penduduk di Jawa yang terus meningkat tak dapat mengelak proses perluasan lahan pemukiman dan prasarana baru, mengambil makin banyak lahan pertanian berproduktivitas tinggi di Jawa: dorongan memindahkan sebagian kantong produksi padi/pangan lain ke lain pulau besar. Hal ini berarti penanaman modal baru dalam pertanian, dalam pola pertanian baru (lebih luas ke lahan kering, irigasi

hemat air (sprinkler ?), bibit padi unggul beralih ke padi hibrid, dan seterusnya.

Di Jawa di atas lahan sempit usahatani makin terpusat ke jenis usaha intensif, lebih bermodal dan teknologi tinggi (hortikultura, dsb.), melayani pasaran masyarakat kota yang luas.

b. Perubahan struktur ekonomi

Perubahan struktur ekonomi digambarkan Dr. A. Anwar sebagai berikut:

Pangsa sektor industri barang dalam GNP meningkat: dari 14% tahun 1987 menjadi 18 sampai 20% tahun 2000, mencapai 26 sampai 32% tahun 2020. Sebaliknya pangsa sektor pertanian terus menurun: masih 21% tahun 1987, menjadi 18% tahun 2000 (waktu ini tersusul oleh pangsa sektor industri barang ?) dan mencapai serendah 10 sampai 12% tahun 2020.

Proyeksi itu terjadi dalam proyeksi GNP yang meningkat dari \$450/kapita tahun 1987 yang tumbuh mencapai taraf \$1500 dan \$2200/kapita tahun 2018 (atau setaraf dengan Malaysia di tahun 1987: \$1850/kapita).

Proyeksi lebih detail tentu meski mencakup gambaran pertumbuhan pendapatan di sektor pertanian dalam masa itu dibanding pendapatan di sektor industri, hal yang tergantung dari corak perubahan struktural yang mesti memperhatikan proses pemerataan dalam pola pertumbuhan itu.

Jika mutu penduduk (dan angkatan kerja) tergantung dari tingkat pendidikan, tahun 1987 masih 80% penduduk usia kerja (10 tahun/lebih) yang berpendidikan SD atau kurang (termasuk yang tidak pernah sekolah); lulusan SLP baru 11%, lulusan SLA 8% dan lulusan Perguruan Tinggi baru satu persen. Jika mulai Repelita IV wajib sekolah mencakup taraf SLP, diduga dalam masa Repelita VIII tingkat partisipasi tingkat pendidikan di SLP

tercapai mendekati 100%, sedangkan di SLA dan PT terus meningkat.

Pendidikan kejuruan juga akan makin diperluas di tingkat SLA dan tingkat PT makin penting pendidikan politeknik/diploma dengan catatan bahwa keterkaitan pembinaan pendidikan kejuruan itu (termasuk spesialisasi di PT) disyaratkan makin baik digalang dengan dunia bisnis/usaha yang memerlukan dan dapat menanggung sebagian biayanya.

Tanpa penguasaan ilmu dan teknologi lebih unggul oleh angkatan kerja (dan lapisan manager) Indonesia yang sesuai tuntutan persaingan di jaman abad 21, peluang membangun bangsa Indonesia akan menjadi goyah.

Hal itu berlaku baik bagi lapang pertanian (primer) maupun lapang

Untuk wilayah seluas Indonesia diperlukan jaringan kerjasama kelembagaan antar sektor, antar jenis lembaga (LITBANG, Tridarma Perguruan Tinggi dan Swasta) untuk mencakup penggarapan sumberdaya lingkungan yang aneka ragam (dari gunung sampai ke lautan), khusus untuk menguasai IpTek Pertanian Tropika, sesuai tuntutan keperluan bangsa Indonesia maupun tuntutan masyarakat sedunia yang menaruh harapan atas kelestarian sumberdaya di alam tropika.

Dalam masa pembangunan Orde Baru selama 25 tahun pola penguasaan tanah secara formal tak terkena kebijakan *landreform*. Baru pada tahun 1978 ada pengakuan formal bahwa UUPA, 1960 masih tetap berlaku tapi sempat UU pokok Kehutanan, 1967 memberi kesan *langkah kembali*

Tanpa penguasaan ilmu dan teknologi lebih unggul oleh angkatan kerja (dan lapisan manager) Indonesia yang sesuai tuntutan persaingan di jaman abad 21, peluang membangun bangsa Indonesia akan menjadi goyah.

industri dan sektor tersier : bisnis informasi yang mencakup lapang pendidikan orang dewasa dan penguasaan jalur/alat media massa dalam proses pendidikan *sepanjang hayat manusia* Indonesia.

Untuk sektor pertanian tantangan (dan tuntutan) *swasembada pangan* (bukan beras saja) untuk tahapan 1990/2020 tetap memerlukan perhatian besar, termasuk penanaman modal baru karena sebagian beralih ke teknologi yang makin unggul tanpa mengabaikan fungsi pelestarian lingkungan.

Kerjasama global (negara industri maju/kaya dan negara berkembang) diperlukan untuk mendukung perkembangan IPTEK Pertanian Daerah Iklim Tropika, lebih intensif dari masa lalu. (kini terpusat di selusin Pusat Internasional).

mengikuti jejak lama pemerintah Hindia Belanda : pernyataan domain atas nama negara, diberlakukan atas puluhan juta hektar wilayah hutan alami di pulau-pulau besar, memberi peluang pada pengusaha besar bisnis *logging* demi pemasukan devisa untuk negara. (Baru 10 tahun kemudian disusul peluang lapang industri kayu lapis dan pulp).

Sejarah pulau Jawa 100 tahun sebelumnya (UU Agraria, 1870) telah berulang di luar Jawa. Petani peladang pindah-pindah di wilayah hutan yang termasuk HPH digiring ke *proyek resettlement* itu tak diteruskan dan nasib golongan petani peladang yang pernah dibina kurang jelas akhirnya, sampai mana terserap dengan baik dalam lapang usaha baru di industri hasil hutan, akhirnya masuk kota atau makin menjauh dalam proses berladang pindah.

Wilayah hutan alami sementara itu menjadi sasaran proyek pembukaan hutan (dan belukar) dalam rangka penyebaran penduduk petani asal dari Jawa/Bali (daerah padat lain), mendirikan desa baru *transmigrasi*.

Jika definisi *landreform* mencakup tindakan *membagi-bagikan tanah* kepada calon/petani yang tak bertanah, proyek *transmigrasi* kita adalah suatu bentuk *landreform*. Secara formal suatu wilayah, berdasar musyawarah masyarakat di daerah (d.p. Gubernur/Kepala Daerah) dijadikan wilayah proyek *transmigrasi* dan Pemerintah Pusat (c.q Menteri Transmigrasi) yang mengelola proyek. Setelah desa-desa baru dinilai siap mengurus diri dalam satu *satuan desa* menurut ukuran Departemen Dalam Negeri, masyarakat itu diserahkan kepada Kepala Daerah di Provinsi (menurut patokan setelah masa binaan 5 tahun).

Dalam kenyataan sering diperlukan masa pembinaan dasar lebih lama, karena proses mengakarkan sistem usahatani baru oleh transmigran, mengalami banyak kendala: tak ada kredit pertanian tersedia secara khusus. Yang menolong adalah unsur transmigran spontan yang menyertai atau menyusul golongan *transmigran umum* (dibiayai penuh, mulai dari biaya transpor dari desa asal): mereka punya dorongan maupun agaknya, modal awal lebih besar. Petani di wilayah sasaran, walau diberi tempat dalam proyek, umumnya tak banyak yang bergabung, karena beda pola pertanian; pula luas 2 hektar tanah pembagian sama sekali tak menarik bagi mereka. Dalam keseluruhan, kebijakan *transmigrasi* cukup berhasil berdasar pengorbanan amat besar oleh transmigran (khususnya golongan spontan); dalam proses itu tak terhindar bahwa pola ketidaksamaan muncul antara petani baru (ada petani lapisan atas dan lapisan bawah, menurut luas milik lahan. Pada tahap kemudian ada upaya mengkaitkan *transmigrasi* dengan pola

PIR (Perkebunan Inti Rakyat); upaya integrasi vertikal unsur modern (perkebunan besar) sebagai inti (pengolahan hasil, pemasaran, maupun sumber input baru) yang bekerjasama dengan sejumlah petani kecil, *plasma* bagi inti (produsen primer). Pola PIR maupun pola BIMAS Padi (jika irigasi teknis tersedia) (atau BIMAS produk lain) punya daya tarik bagi proyek *transmigrasi* karena merupakan sumber kredit pertanian dan membuka jalur keluar bagi usahatani transmigran. Diduga masih diperlukan masa dua kali Repelita untuk membenahi semua proyek *transmigrasi* yang pernah dibuka, agar berhasil baik, tak sia-sia.

Kebijakan apa dalam hal *pola penguasaan tanah* yang dikenakan di wilayah pertanian padat penduduk? Di Jawa dan Daerah lain yang punya potensi irigasi teknis untuk pola sawah padi, kebijakan pokok adalah peningkatan produktivitas, tanpa menyentuh pola penguasaan tanah yang ada. Masa *landreform* kecil di masa 1960/1965 ditinggalkan tak berbekas. Revolusi *hijau* karena penyebaran bibit unggul baru (asal IRRI, Pusat Internasional Riset Padi) dan kebijakan *permodalan* pertanian tanah sawah telah berhasil dalam masa 15 tahun membuat Indonesia *Swasembada Beras*.



Penanaman modal itu dilakukan dalam pembangunan pekerjaan umum irigasi, pendirian industri pupuk (dari bahan gas alam) dan penyediaan prasarana ekonomi (kredit, subsidi pupuk, dsb.) dan penyuluhan dalam upaya *Bimbingan Massal* (BIMAS) yang pada tahap kemudian berupa bimbingan pada kelompok tani : INSUS dan SUPRA-INSUS. Di satu pihak ada insentif ekonomi (bertanam padi itu makin menguntungkan) tapi di lain pihak ada juga intervensi lewat *Telunjuk Keras*, yaitu lewat jalur Pamong (sebelumnya bernama *Pangreh Praja*) : Dari Gubernur ke Bupati dan Camat, sampai ke Kepala Desa : himbauan para pejabat lewat para pemuka lokal.

Dalam menilai corak *dualisme* kebijakan itu, ada pula yang mencatat bahwa petani juga menyadari bahwa ada *komoditi* lain dari padi yang bisa lebih menguntungkan, umumnya *usaha di luar pertanian*, didukung oleh surplus usahatani. Catatan lain menunjuk pada segi *nilai tukar* petani yang untuk masa lama (10 tahun pertama) tak menguntungkan petani padi.

Mereka yang membuat dua catatan segi ekonomi *revolusi hijau* ini tak melihat suatu *dualisme* (sisi lain; pendekatan Pamong Praja) melainkan suatu kesinambungan belaka; golongan petani yang berkorban pada tahap pertama *lepas landas* ekonomi nasional, jasa mereka membuat beras melimpah dengan harga terjangkau rakyat banyak, termasuk buruh di sektor lain yang dipacu untuk tumbuh lebih cepat dengan upah buruh yang tak memberatkan.

Dalam hubungan petani dan buruh tani (sebagian adalah petani sempit) peningkatan pendapatan dari usahatani padi sawah bibit unggul membawa ke pola pembagian pendapatan lebih merata, walau jelas bagian dari petani (pemilik tanah, manager) makin besar dibanding dengan bagian dari buruh tani. Menurut Hayami/Kikuchi bukan

polarisasi yang terjadi dalam revolusi hijau, melainkan stratifikasi. Tapi jika pola nafkah ganda disoroti (petani dan buruh tani sama-sama terlibat di luar pertanian), petani lapisan atas yang jauh lebih cepat menaik pendapatannya, makin menjauhi pendapatan buruh tani. Baru lewat 12 tahun kemudian upaya mencari nafkah lebih baik di luar pertanian telah berhasil bagi sebagian petani sempit/tak bertanah/buruh tani sehingga tingkat pendapatan di pedesaan Jawa sampai tahun 1987 berkesan telah meningkat lebih cepat dibanding pendapatan masyarakat desa di *luar Jawa*. (Mubyarto dkk, UGM).

Aspek penguasaan tanah ini disoroti lebih dulu karena sangat menentukan dalam *pembagian kerja/usaha* dan *pembagian rezeki* antar berbagai lapisan/golongan desa dan golongan pengusaha kuat dari kota (sebagian dari luar negeri) yang sempat diperbolehkan *masuk desa*. Dalam masa 25 tahun tahapan berikut, soal tanah itu (juga soal air) makin genting karena penduduk makin padat di Jawa/Bali dan di lain pulau besar batas *hutan alami* sudah dicapai. Yang masih terbuka adalah potensi kelautan kita, mencakup zone Ekonomi Eksklusif.

Dimuka sudah disebut beberapa upaya pokok menarik petani subsisten makin jauh memasuki perekonomian uang, pasaran nasional dan internasional. Masyarakat petani di berbagai daerah punya pengalaman beragam dalam proses integrasi ekonomi itu.

Program BIMAS Padi Sawah adalah prototipe intervensi negara yang memajukan penyebaran revolusi hijau, demi pengamanan penyediaan beras secara swasembada. Intervensi dengan tarikan *carrot* yang sedap dan dorongan *stick* sekaligus (sejajar atan dualistik, tak soal) mencirikan kebijakan pemerintah. Ciri serupa juga ternayang pada eksperimen PIR dimana unsur Perkebunan Besar berasal dari budaya *elite*

planter/tuan kebun yang diberi fungsi *bapak* untuk sejumlah *anak buah*, petani plasma yang di masa lalu umumnya terserap dalam perekonomian nasional/internasional lewat pedagang perantara tradisional, dari moral ekonomi dan manajemen usaha yang saling mengisi.

Pola kerja-sama belum menunjukkan kesejajaran antara dua pihak (berat sebelah dari atas ke bawah). Masih diperlukan solidaritas yang sepadan mengikat kedua pihak, dengan mekanisme yang mampu menjaga

mengikuti pembagian kerja sektoral : penyuluh pertanian sempat mencapai corak pembinaan pada kelompok petani schamparan sawah, tapi pendekatan ini tak nyata menyambung pada pendekatan pembinaan satuan KUD oleh Departemen Koperasi bersama DOLOG : padahal sebagian petani anggota kelompok adalah juga anggota koperasi KUD.

Kerjasama ekonomi antar orang/rumah tangga di desa/kota paling umum terjadi dalam bentuk kelompok kecil informal (prototipe satuan arisan) : tapi

Pola kerja-sama belum menunjukkan kesejajaran antara dua pihak (berat sebelah dari atas ke bawah). Masih diperlukan solidaritas yang sepadan mengikat kedua pihak, dengan mekanisme yang mampu menjaga keamanan lapang usaha

keamanan lapang usaha, dalam kondisi untung maupun kondisi merugi karena pasang surut pasaran. Kecuali keterkaitan antara inti dan plasma produser primer kecil yang banyak jumlahnya, sebetulnya masih ada pihak-pihak lain yang terlibat, di satu sisi pemerintah (dari Pusat sampai di Daerah) dan golongan buruh yang mendapat upah dari inti atau dari petani. Karena sampai kini baru perkebunan besar BUMN yang berfungsi sebagai inti PIR, unsur PIR itu adalah persambungan unsur Pemerintah (Pusat).

Kasus BULOG mendapat fungsi penting dalam menjaga stock beras dan beberapa jenis pangan lain. Dalam kerjasama erat dalam satu Departemen khusus (Koperasi) BULOG sangat kuat berperan (*de Facto*) dalam pembinaan koperasi primer KUD yaitu lembaga serbaguna di tingkat desa (lebih sering mengikat petani beberapa desa). Yang lebih diutamakan adalah patokan bisnis satuan KUD itu (khususnya dalam klasifikasi kemandirian sebagai suatu bisnis, sesuai standar lembaga bisnis) sedangkan patokan koperasi milik anggota menjadi nomor dua. Ulur tungan (bahkan intervensi langsung) dari pemerintah ke pihak petani di desa

unsur ini tetap tergolong sektor informal dan satuan KUD (sudah) tergolong sektor formal dan peluang mempertemukan dua bentuk lembaga itu lebih umum belum berhasil diupayakan secara mantap. Dari segi pendekatan golongan sasaran berarti pengusaha kecil/gurem dari lapisan bawah masih belum terjangkau sesuai potensi kelompok mereka. (Golongan sasaran perorangan di lapisan bawah sudah terjangkau oleh penyaluran kredit KCK)

Sempat terungkap bahwa fungsi kelompok petani lebih kuat menjadi saluran apa yang diputuskan dari atas oleh Negara, yaitu dalam hal penyebaran pemakaian bahan kimia baru dalam paket SUPRAINSUS, tanpa petani diberi cukup peluang untuk menguji-coba input baru itu. Hal itu bertepatan dengan peristiwa panen lebih dari 50 merek insektisida untuk padi sawah; artinya sebelum keputusan itu sempat jalur pemasaran input industri obat-obatan hama/penyakit tanaman ikut memanfaatkan jalur persatuan kelompok. Dalam proses itu kaitan antara tahap riset/percobaan lokal dan penyebaran lewat jalur penyuluhan (menyebarkan hanya yang sudah teruji) tanpa menyertakan petani yang berkepentingan.

Tindakan macam inilah yang mengingkari peluang kelompok petani dapat memandirikan diri : mampu memilih apa yang baik bagi diri dan kelompok golongan dan mampu menolak apa yang dinilai merugikan ! Gejala menjadi kawan seing antara petugas aparat negara dan petugas badan usaha swasta, tanpa kontrol dari masyarakat, bukanlah hal yang membesarkan hati.

Di lain pihak baru-baru ini ada upaya untuk bereksperimen dengan jalur-jalur

milihan khusus oleh penduduknya dan kemudian diangkat oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten). Keputusan tersebut terakhir ini menjadikan Kepala Desa lebih bertanggungjawab kepada Pemerintah daripada kepada penduduk desa, rakyat pemilihnya. UU Pemerintah Desa, 1979 juga telah membuat perbedaan untuk desa di lingkungan Kotamadya dimana Kepala Desa formal adalah pegawai negeri yang diangkat Pemerintah. Baik di desa dan di kota suatu lembaga musyawarah (LMD) dan

Dalam proses itu kaitan antara tahap riset/percobaan lokal dan penyebaran lewat jalur penyuluhan (menyebarkan hanya yang sudah teruji) tanpa menyertakan petani yang berkepentingan. Tindakan macam inilah yang mengingkari peluang kelompok petani dapat memandirikan diri : mampu memilih apa yang baik bagi diri dan kelompok/golongan dan mampu menolak apa yang dinilai merugikan !

pembinaan baru (eksperimen kelembagaan), bagaimana cara yang lebih mencapai sasaran di lapisan bawah, misalnya yang melibatkan bank BI (berkawan dengan LSPM) atau bank BUKOPIN (membina KUD yang mampu melayani kelompok kecil anggota KUD). Departemen Pertanian juga pernah aktif bereksperimen dengan membina usaha kelompok petani kecil/buruhtani, pada mulanya dalam kerjasama dengan FAO/PBB yang mungkin akan dilanjutkan dengan kerjasama suatu bank. Perlu dicatat bahwa awal kebijakan meng-KUD-kan masyarakat desa, berawal dari eksperimen BUUD dan KUD di Yogyakarta, atas dukungan bank ADB, Manila. Tapi sebelum cukup teruji di lain daerah, hasil eksperimen di satu lokasi itu sudah dijadikan kebijakan nasional yang dari satu Repelita ke lain Repelita sempat disesuaikan menurut pola rekayasa yang ditetapkan di Pusat.

Ada pengaturan pemerintahan yang telah menjangkau luas di di semua pulau, yaitu penetapan satuan desa sebagai satuan terkecil pemerintahan dimana Kepala Desa dipilih dalam pe-

suatu lembaga pusat gerakan rakyat (LKMD) didirikan untuk mendukung kelancaran Pemerintah Desa : Kepala Desa yang dijadikan ketua dua lembaga baru itu. Di lain pihak aparat pemerintah desa direkayasa sebagai aparat profesional : Kepala Desa dibantu oleh seorang Sekretaris dan sejumlah Kepala Urusan, sesuai diferensiasi bidang pembangunan nasional.

Sebelum struktur formal yang baru itu ditetapkan tahun 1979, sebenarnya sudah sejak awal Repelita I Pemerintah Pusat/Daerah telah mulai memberi pengarahan lewat bantuan InPres Desa : Penyediaan dana kepada tiap desa untuk mendorong kegiatan swasembada penduduk desa dalam membangun desa, sesuai tujuan ekonomi dan tujuan sosial. Kebijakan ini boleh disebut kelanjutan dari ketentuan dalam PP Desa di Jawa di masa Hindia Belanda, ditambah sumbangan dari Pemerintah zaman Merdeka untuk ditambahkan pada dana yang dikumpulkan Pemerintah Desa dari rakyatnya untuk memperlancar kegiatan mengurus rumahtangga Desa sendiri. Jika data BPS mengenai



ketunggalan Desa dianalisa (hasil survei berkala) diperoleh kesan bahwa tingkat kemampuan mengumpulkan dana oleh Desa sendiri lebih besar dari yang dilaporkan oleh Departemen Dalam Negeri dan kemudian tercantum.

Dapat diduga bahwa pembinaan Pemerintah Desa sesuai ketetapan baru itu, menurut satu patokan nasional (satu hal yang di zaman Hindia Belanda belum pernah dilakukan), dalam pelaksanaan sehari-hari hasilnya beragam antar daerah. Di luar Jawa lebih umum satuan masyarakat adat lokal (tingkat desa kumpulan desa) yang sebelumnya lebih berpengaruh.

Sampai mana wewenang mengatur masyarakat satuan adat lokal tertampung dalam tatanan pemerintah desa menurut patokan Negara Nasional, khususnya UU tahun, 1979 itu? Dalam satu hal yaitu wewenang atas penggunaan tanah (dan sumberdaya lain di lingkungannya) di sementara satuan desa (sebelum tahun 1979, umumnya berdasar keputusan Gubernur yang disyahkan di Jakarta) sudah dibatasi, bahkan dikebiri. Dalam adat lokal tradisional wewenang itu mengenai kepentingan penduduk warganya dalam mendapat bagian hutan untuk tempat berladang; pendatang yang memerlukan sumberdaya tersebut mesti

memperoleh izin kepala adat yang sering merangkap kepala desa, dalam bentuk sementara (masa sebelum 1979).

Dari segi pembangunan nasional UU Pokok Kehutanan, 1967 dengan tugas menempatkan wewenang alokasi sumberdaya hutan itu kepada negara (satu pernyataan domain). Dalam hal pembebasan suatu wilayah untuk dijadikan wilayah proyek transmigrasi, mungkin juga sering terjadi penarikan wewenang serupa oleh kekuasaan seorang Gubernur/Kepala Daerah, dimana musyawarah kesatuan adat setempat kurang mendapat tempat lagi.

Dalam ketentuan UU Pemerintah Desa, 1979 tak disebut wewenang khusus pada satuan desa dalam hal tanah itu. Yang berlaku adalah ketentuan Nasional dan dalam hal-hal yang sudah diatur oleh negara itu Kepala Desa/Aparatnya mendapat tugas, membantu Camat (aparatur Penda) agar ketentuan pengaturan dari atas itu ditaati oleh semua, Pejabat Camat telah diberi wewenang bertindak sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat surat perihal milik tanah (serupa fungsi notaris): suatu pengaturan urusan tanah yang di zaman kini adalah urusan perorangan semata-mata, seripa suatu lembaga pengadilan negeri dalam urusan-

an perdata pidana dimana kepentingan perorangan yang diputuskan. Urusan kolektif sejumlah orang yang punya kepentingan sama, kurang tersalurkan.

Pembinaan struktur pemerintahan di tingkat desa memang termasuk wewenang Negara: dalam bentuk dan isinya yang terakhir (tahun 1979) adalah formalisasi pengaturan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1969, awal Repelita I, kebijakan itu menggambarkan corak perhatian zamannya, dalam hal masyarakat desa pemerintah (Negara) praktis memonopoli kekuasaan untuk merencanakan Massa mengambang di desa.

Dalam perbandingan massa mengambang di lingkungan kota lebih bebas dalam memilih apa yang baik bagi diri kelompok masing-masing. Dengan singkat: kebijakan Desa dalam Orde Baru Pembangunan bercorak penyaluran unsur motivator-fasilitator untuk dorongan ke modernisasi dan sekaligus menjamin unsur stabilisator. (Walau bukan pegawai negeri, Kepala Desa digolongkan ke dalam KORPRI!).

Tak mengherankan bahwa pemerintah desa mendapat peranan penting dalam rekayasa pertanian BIMAS, bahkan kini di tahapan SUPRAINSUS berperan sebagai unsur (pendorong) dalam usaha memperlancar pengembalian kredit KUT (Hal ini menyalahi ketentuan zaman modern: urusan ke Bank adalah urusan perorangan, petani atau bukaan). Sama halnya seorang Kepala Daerah (Gubernur, Bupati) mendapat patokan menjamin 8 sukses (kini lebih dari 8?), seorang Kepala Desa juga menjadi kaki tangan sekian banyak Menteri/Pejabat setingkat di Pusat.

Sejajar dengan pendekatan kepamongprajaan itu, di bidang pembangunan ekonomi yaitu membina Koperasi Primer (khususnya KUD, diatur oleh satu KepPres) juga diikuti pendekatan rekayasa yang serupa: dari atas ke

bawah. Sebagai bandingan penduduk kota lebih bebas dalam memilih cara memperjuangkan perbaikan nasibnya, lebih bebas dalam memilih kawan seiring, berkelompok untuk upaya perbaikan nasib. Jenis koperasi di kota banyak ragamnya, sesuai kepentingan khusus suatu golongan.

Dalam semua hal rekayasa masyarakat desa itu Soal Besar adalah: sampai mana akan (sudah) membuat desa makin dekat ke kemandirian atau sebaliknya makin nyata membuat desa makin tergantung dari kekuasaan luar? Jika kita lebih cenderung pada kerisauan dalam hal kedua (ketergantungan), jelas pelajaran dari masa 25 tahun yang lalu: kita tinggalkan corak rekayasa yang membuat ketergantungan itu dan menetapkan trase baru untuk masa 25 tahun di depan kita!

Jika dibanding corak dan laju pembangunan di desa dan kota, manakah yang lebih benar penilaian: pembangunan itu di kota lebih maju dan lebih sesuai aspirasi penduduknya daripada di desa, dalam masa 25 tahun lalu? Ataukah sama baiknya? Hal ini juga tergantung dari patokan penilaian kita, misalnya apakah ukuran kemandirian dapat dipakai untuk dua jenis lingkungan itu? (kemandirian itu dalam arti mampu memilih yang lebih baik bagi diri/kelompoknya, dengan hasil: kuasa menerima sesuatu yang baru atau menolaknya!).

Dan jika ada penilaian akan bias kota (memenangkan penduduk kota) dalam hal ini, hal itu tak berarti bahwa penduduk desa seluruhnya dinomorduakan. Pola bias urban cenderung menguntungkan lapisan atas di desa yang karena itu menjadi pendukung setia dan gigih pada pembangunan berbasis kota itu! (Ini penilaian Lipton atas pembangunan di Dunia Ketiga umumnya).

Akibat pembangunan yang berat sebelah bias kota sudah dikenal: orang

desa tertarik masuk kota (sebagian arti dari proses urbanisasi), hal ini sudah berlangsung sejak awal abad ini di Jawa tapi makin gencar setelah merdeka, khususnya sejak 1950. Corak lain dari proses urbanisasi terjadi jika penduduk desa yang tetap tinggal di desa, mulai berubah menunjukkan ciri-ciri budaya kota, misalnya makin terbiasa membaca, terbuka pada sentuhan media massa, dan menulis (dimulai dari menulis Surat Pembaca berkala). Begitu pula sikap yang lebih menampilkan pilihan pribadi dan kemandirian pribadi. Lebih matang menjadi anggota suatu perhimpunan sukarela (misalnya satuan koperasi primer) yang mampu mendukung ketua pengurus, termasuk dengan kritiknya, mampu tampil dengan pendapat pribadi. Pendapat pribadi banyak warga desa kota yang bervariasi itu merupakan pendapat umum masyarakat pada suatu waktu mengenai suatu masalah. Pendapat orang banyak ini dapat berubah sesuai hasil penilaian yang diberikan orang, setelah mempertimbangkan hal-hal baru.

Dengan peluang untuk bergerak ke kota (minimal pulang balik sehari untuk bekerja di kota), makin banyak orang desa sudah menjangkau kemudahan di kota dan membawa ke desa (berupa uang/barang lain, tapi yang pokok: ide baru, termasuk kebebasan yang sebelumnya kurang dikenal di desa sendiri).

Baik dari menilai kemampuan dan prakarsa masyarakat desa Indonesia dalam pembangunan pertanian (revolusi hijau, transmigrasi membangun desa baru) maupun dalam memetik pembangunan di kota dalam upaya perbaikan nasib (sebagian berakibat pindah ke kota), semua itu dalam gerakan spontan, atas swadaya berdasar sumberdaya desa (termasuk sumberdaya pribadi/keluarga/kelompok), untuk masa pembangunan 25 tahun tahap berikut sepantasnya corak kepemimpinan/pembinaan atas

pembangunan desa lebih kuat mengandalkan kedewasaan kemandirian masyarakat desa itu, menajuti corak pembinaan masa lalu yang lebih *serba terpusat* (bahkan dari Pusat Ibukota Negara).

- diperlukan suatu gerakan *gaya hidup baru* di antara pejabat petugas (negara/swasta) yang dalam tugasnya berurusan dengan lapisan menengah bawah di desa dan di kota,
- dalam gaya baru kepemimpinan itu ada peluang lebih besar bagi kelembagaan pelayanan bimbingan LPSP/LSM yang sebagai unsur ketiga dalam segitiga Negara, Gerakan (dua unsur modern) dan Rakyat Banyak (yang sedang mencari jalan menjadi modern),
- saluran komunikasi dua arah (dari atas ke bawah dan sebaliknya, termasuk arah diagonal desa/kota) tersalur baik lewat semua bentuk alat media massa (surat, cetakan, radio/TV, dsb) Dominasi sumber informasi oleh Negara dan oleh Swasta Besar (pendorong ke konsumerisme) dapat ditangkal dalam pola baru komunikasi itu,
- kemauan politik untuk menghentikan perlakuan secara berbeda dalam hal *massa mengambang* diperlukan, karena diskriminasi itu sudah terkejar proses urbanisasi yang dialami penduduk desa.

Perlu membenahi struktur politik tingkat Desa/Kecamatan/Kabupaten yang dapat diatur agar lebih mampu menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pemecahan masalah lokal, jika perlu terpisah dari pengaturan proses politik di tingkat Propinsi dan Nasional (di Pusat: DPR dan MPR) jika kita hendak mempertahankan Republik Kesatuan tapi mampu memberi tempat pada gaya kebinekaan dalam pemecahan masalah, lokal dan nasional.

Kemiskinan dan Upaya Penanggulangannya

Oleh : *Tonton Wahyu S*

Apa yang disebut dengan kemiskinan, tampak sudah jelas bagi kita, yaitu sebagai suatu situasi yang serba kekurangan yang terjadi bukan atas kehendak si miskin. Kemiskinan antara lain ditandai dengan sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak bisa diubah, yang tercermin di dalam lemahnya kemauan untuk maju, rendahnya produktivitas, ditambah lagi oleh terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pendidikan, dan terbatasnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Tentu saja kita paham bahwa cerminan kemiskinan seperti itu tidak berarti bahwa masyarakat yang terkungkuh di dalamnya bersikap seperti orang putus asa, tidak mempunyai gairah untuk berkembang, apalagi apatis. Pada kenyataannya, rakyat yang tingkat kehidupannya berada di bawah standar yang kemudian kita sebut miskin itu, tetap menjalani kegiatan seperti layaknya orang-orang yang berkehidupan lebih baik dari mereka. Mereka tetap mempunyai kesibukan, dan secara sepintas mereka tidak kelihatan seperti ketinggalan.

Hanya saja, mungkin yang membedakan mereka dari orang-orang yang lebih baik tadi adalah tingkat pendapatan dan penghasilan mereka yang jauh lebih kecil dan tidak cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan hidup yang lebih layak. Padahal di lain pihak, perkem-

bangun kehidupan, apalagi ditengah-tengah era modernisasi seperti sekarang, menuntut banyak pengorbanan, terutama pengorbanan finansial dalam tingkat yang cukup tinggi, dan jauh di atas jangkauan pendapatan mereka.

Namun demikian, bahwasannya pendapatan dan penghasilan mereka jauh di bawah tuntutan kehidupan modern tadi, bagi mereka tampaknya tidak terlalu mengganggu, terutama selama mereka masih bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, seperti; sandang, pangan, dan papan, meskipun dalam kualifikasi yang jauh di bawah standar. Orang-orang di desa, yang pada umumnya termasuk ke dalam kategori miskin, pada umumnya tidak menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan mereka itu berada dalam kemiskinan, dan bisa diusahakan untuk diperbaiki.

Kelemahan-kelemahan dan berbagai keterbatasan serta kekurangan yang yang menandai kemiskinan tersebut, mungkin bisa kita tunjuk sebagai salah satu dampak dari ketidak-tahuan, dan keterbatasan kemampuan mereka untuk menafsirkan serta menyerap makna segala sesuatu yang terjadi di sekitar mereka. Mungkin saja mereka mempunyai keinginan dan harapan yang sama dengan orang-orang lain yang lebih baik, tapi mereka tidak tahu apa sebenarnya yang harus dilakukan untuk mewujudkannya. Dan, yang mengkhawatirkan dari keterbatasan pengetahuan itu adalah bahwa mereka tidak menyadari



Tonton Wahyu S
Koordinator
Proyek Nasional P4K
BADAN
DIKLAT PERTANIAN

bahwa kehidupan mereka itu berada di bawah standar dan miskin, serta mereka tidak tahu bahwa itu semua bisa diatasi.

Dengan demikian maka salah satu langkah yang terlebih dahulu harus ditempuh dalam mengentaskan rakyat dari kemiskinan ini adalah *menyadarkan mereka bahwa sesungguhnya tingkat kehidupan mereka itu sangat rendah, serta meyakinkan mereka bahwa kondisi itu bisa diperbaiki dan ditingkatkan.* Dengan kesadaran atas kondisi kehidupan yang demikian rendah, dan keyakinan akan bisa diperbaiki itulah, bisa kita harapkan rakyat yang miskin itu akan tergerak untuk belajar dan menyerap berbagai kemungkinan yang bisa dilakukan.

Dengan kesadaran itu pula sangat mungkin mereka lebih menerima berbagai informasi mengenai bimbingan dan arahan yang diberikan untuk kepentingan hidup mereka sendiri. Bagaimanapun juga tanpa kesadaran dan keyakinan seperti itu, sulit bagi kita untuk berharap upaya-upaya pengentasan kemiskinan akan berjalan lancar dan cepat. Bagaimanapun besarnya kita berupaya, betapapun besarnya anggaran yang dicanangkan dan seluas apapun fasilitas dan kemudahan yang tersedia, bisa kita yakini tidak akan membawa hasil yang berarti tanpa tumbuhnya motivasi di kalangan rakyat miskin itu sendiri untuk maju.¹⁾

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak lain adalah *upaya pemberdayaan (empowering) si miskin yang dilaksanakan melalui suatu proses pendidikan yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip "menolong diri mereka sendiri" (self-help) dan berlandaskan pada "peningkatan kemampuan menghasilkan pendapatan" (income generating capacity) sehingga mereka mampu menjangkau (akses) terhadap*²⁾

1. Sumber daya

2. Permodalan

3. Teknologi dan

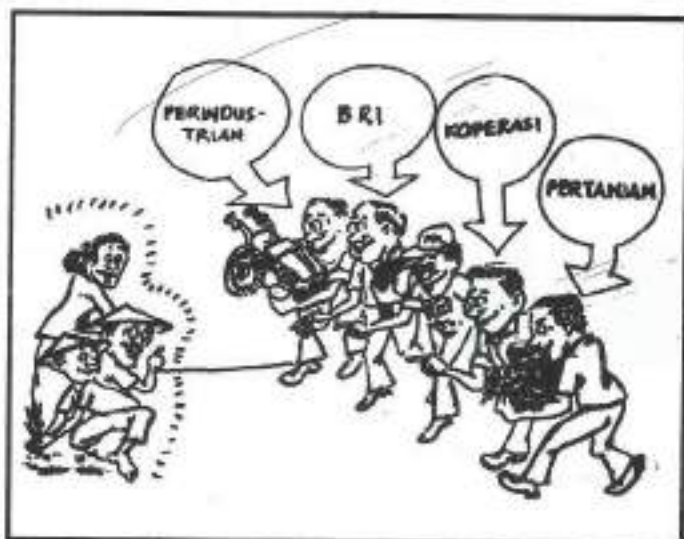
4. Pasar.

Yang dimaksud dengan mampu akses terhadap *Sumberdaya* adalah bahwa masyarakat miskin tersebut mampu meningkatkan pemilikan /pengusahaan lahan usahanya (sumberdaya alam) dan mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya baik dirinya, keluarganya dan atau tenaga kerja luar (sumberdaya manusia).

Mampu akses terhadap *Permodalan* artinya mereka mampu mendapatkan modal yang diperlukan bagi menjalankan dan mengembangkan usahanya dari lembaga keuangan formal.

Mampu akses terhadap *Teknologi* artinya mereka mampu menerapkan sistem budidaya atau cara-cara kerja yang bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan sehingga dapat memberikan nilai tambah.

Yang terakhir adalah mampu akses terhadap *Pasar*, artinya mereka mampu menjual hasilnya dengan, lancar dan dengan harga yang layak serta berkelanjutan.



1) Sumber Buku Pintar seri II

2) Sumber Buku Pintar seri XVI



Program penanggulangan kemiskinan haruslah merupakan program pendidikan yang ditujukan khusus terhadap masyarakat yang belum beruntung ini, yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Program penanggulangan kemiskinan bukan program bagi-bagi, yang hari ini diberi dan besok dilupakan. Program pendidikan bagi masyarakat miskin perlu dirancang secara khusus, dilaksanakan dengan penuh perhatian, ketekunan dan dedikasi. Program pendidikan bagi masyarakat miskin sebaiknya dilaksanakan oleh petugas-petugas yang telah mendapat pelatihan yang memadai, sehingga tidak saja terampil tapi juga tumbuh kepeduliannya, dedikasinya untuk membantu masyarakat miskin.

Penerapan prinsip "menolong diri mereka sendiri" atau *self-help*, merupakan keharusan kalau kita ingin menolong masyarakat miskin terangkat dari jurang kemiskinan. Usaha penanggulangan kemiskinan harus diarahkan

pada pendayagunaan yang efektif dari kemampuan masyarakat miskin itu sendiri dalam mengangkat harkat derajat kehidupannya. Tujuan utama penerapan pendekatan menolong diri sendiri adalah menciptakan suatu iklim yang sesuai untuk tumbuh dan berkembangnya kegiatan-kegiatan swadaya kaum miskin ini. Upaya mendidik masyarakat miskin agar mereka mengerti dan faham tentang pentingnya diterapkannya prinsip menolong diri sendiri adalah penting dan akan menjadi kegiatan dasar dari program penanggulangan kemiskinan. Maka oleh karena itu perlu diciptakan suatu strategi yang mengacu dan mengarah kepada tumbuhnya keswadayaan dari kaum miskin ini dalam memerangi kemiskinan yang dihadapinya. Dengan cara demikian maka dapatlah diharapkan menjelmannya suatu program penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan (*sustainable*) yang dilaksanakan oleh dan untuk kepentingan si miskin itu sendiri.

Tiga Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak lain adalah kegiatan pemberdayaan (*empowering*) masyarakat miskin yang dilakukan melalui 3 (tiga) strategi yaitu :

- I. Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia
- II. Strategi Pengembangan Kemampuan dalam Permodalan
- III. Strategi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Rakyat

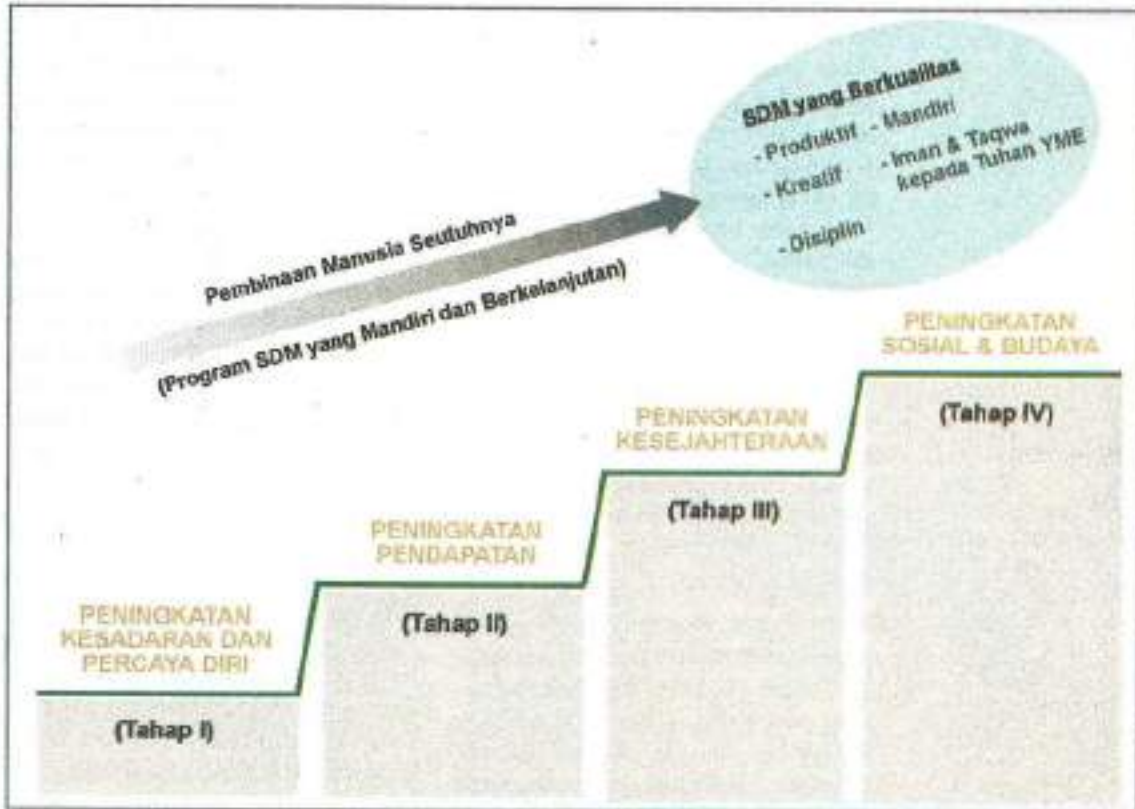
Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) secara skematis digambarkan seperti terlihat pada Gbr. 1 dibawah ini.

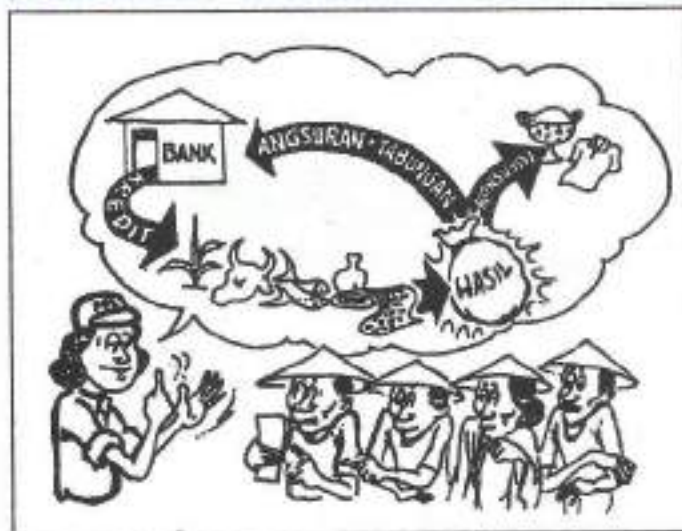
Sebagaimana telah diterangkan terdahulu titik masuk (*entry Point*) dari program penanggulangan kemiskinan,

yang pertama sekali harus kita lakukan adalah menyadarkan mereka bahwa sesungguhnya tingkat kehidupan mereka itu sangat rendah (*dibawah garis kemiskinan*) dan meyakinkan mereka (*menumbuhkan rasa percaya diri*) bahwa kondisi itu bisa diperbaiki dan ditingkatkan. Dengan kesadaran dan rasa percaya diri akan tumbuh motivasi di kalangan rakyat miskin itu sendiri untuk maju, sehingga mereka akan lebih mudah menerima dan tanggap terhadap setiap pembaharuan yang dianjurkan (Tahap I).

Apabila Tahap I telah tercapai barulah kita menginjak kepada Tahap II : **Kegiatan Peningkatan Pendapatan**, yaitu suatu kegiatan pemberdayaan rakyat miskin di bidang ekonomi. Kemiskinan secara mudah sering diidentikkan dengan ketidak-mampuan di bidang ekonomi, sehingga mereka benar-benar hidup dalam kemiskinan.

Gbr.1





Artinya, pendapatan mereka sehari-hari tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Maka oleh karena itu upaya tahap kedua adalah bagaimana kita bisa membantu dan membimbing mereka, sehingga mereka memiliki kemampuan usaha ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatannya. Sebagaimana telah diterangkan terdahulu, upaya meningkatkan kemampuan menghasilkan pendapatan ini (*income generating capacity*) haruslah dilakukan agar mereka itu mampu akses kepada :

1. Sumberdaya
2. Permodalan
3. Teknologi dan
4. Pasar.

Kemempat kemampuan ini haruslah benar-benar mereka miliki secara utuh, tidak parsial, agar kegiatan mereka di bidang ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Setelah Tahap II tercapai maka barulah kita meningkat ke Tahap III yaitu **Peningkatan Kesejahteraan**. Sebagaimana kita ketahui kemiskinan itu bersifat banyak (*multidimensional*), mereka itu tidak hanya miskin ekonomi, tapi juga miskin dalam aspek-aspek lainnya

seperti miskin pendidikan dan keterampilan, miskin kesehatan, miskin rohani dsb. Maka oleh karena itu kalau kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, mereka harus dibantu dan dibimbing agar mampu akses disamping kepada Aspek Ekonomi, tapi juga mereka mampu akses kepada :

1. Aspek Pendidikan
2. Aspek Kesehatan
3. Aspek Keluarga Berencana dan
4. Aspek Agama/Rohani.

Dengan demikian mereka tidak hanya terbina dalam aspek ekonomi, tapi juga pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, agama atau rohani. Mudah-mudahan dengan terbinanya masyarakat miskin dalam 5 aspek tersebut mereka akan meningkat kesejahteraannya.

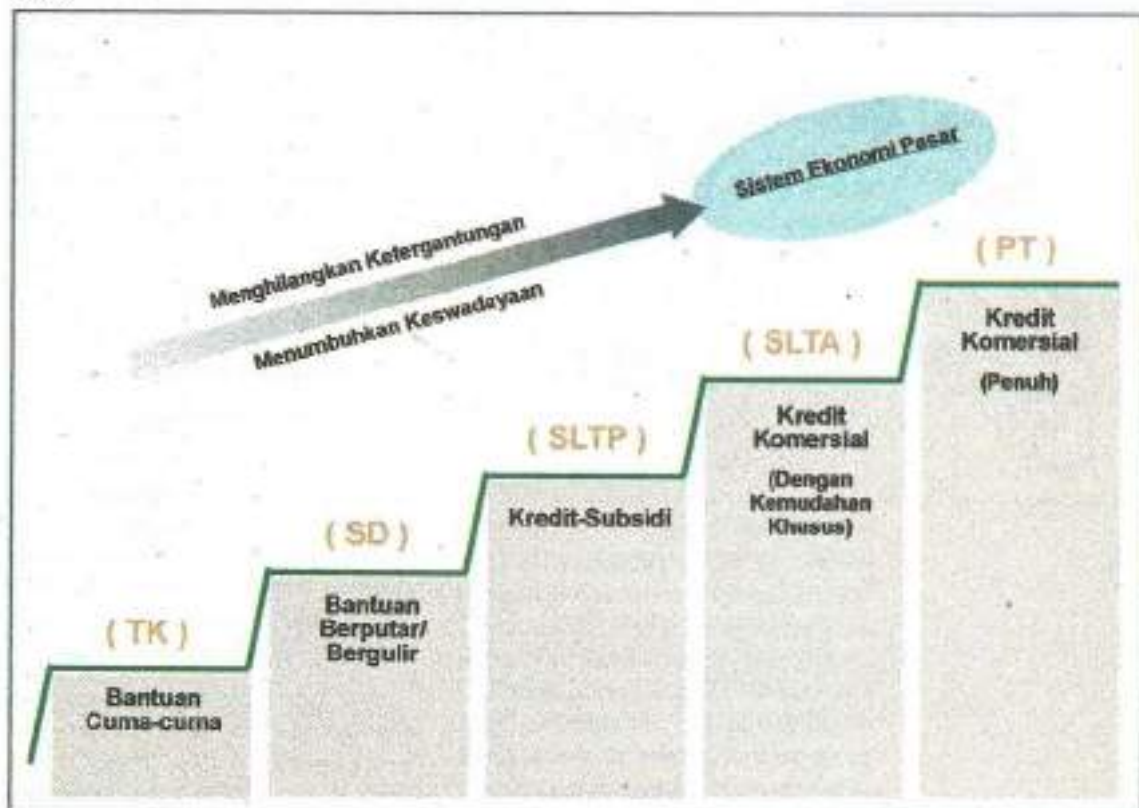
Pada Tahap III masyarakat miskin itu diharapkan sudah tidak miskin lagi, mereka sudah mampu hidup secara layak dalam arti mereka tidak saja mampu memenuhi kebutuhan dasar (papan, sandang dan pangan) tapi juga kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan rohani bagi keluarganya. Namun demikian masih ada satu tahap lagi yang harus kita capai yaitu Tahap IV : **Peningkatan Sosial Budaya**. Pada tahap IV ini kita bantu dan bimbing mereka agar akses kepada :

1. Aspek Hukum
2. Aspek Kenegaraan
3. Kebangsaan
4. Aspek Kesatuan dan Persatuan Bangsa

sehingga terwujudlah manusia yang berkualitas yaitu manusia yang kreatif, produktif, disiplin, mandiri, iman & taqwa kepada Tuhan Yang maha Esa.

Strategi Pengembangan Kemampuan dalam Permodalan dapat kita gambarkan sebagai berikut : (Gbr.2)

Gbr.2



Negara Indonesia yang terbentang dari DI. Aceh sampai Irian Jaya, keadaannya dari satu tempat ke tempat lain sangat berbeda-beda, mulai dari infra-struktur, kepadatan penduduk, sosial-budaya bahkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapainya pun berbeda-beda. Maka oleh karena itu kalau kita ingin berhasil, kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk setiap wilayah atau tempat harus berbeda pula disesuaikan dengan kebutuhan (*local-specific*).

Demikian pula dalam hal membantu dan membimbing permodalan usaha masyarakat miskin harus disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Bagi daerah-daerah yang belum banyak tersentuh oleh pembangunan; terutama pembangunan ekonomi, dapat dimulai dengan memberi bantuan dalam bentuk **Bantuan Cuma-cuma** atau **Bantuan Bergulir**. Bantuan yang diberikan

haruslah didasarkan atas kebutuhan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat, bukan bantuan yang asal diberikan begitu saja. Untuk itu terlebih dahulu haruslah dilakukan analisa kebutuhan (*need-analysis*) dan atas dasar hasil analisa kebutuhan itulah maka bantuan itu diberikan. Bagi daerah-daerah yang sudah banyak tersentuh pembangunan, bantuan permodalan bagi usaha ekonomi sudah dapat diberikan dalam bentuk **Kredit Subsidi** atau **Kredit Komersial dengan kemudahan khusus**.

Apabila di suatu daerah kita mulai dengan bantuan cuma-cuma, maka kita tidak boleh terlalu lama berputar-putar disitu saja. Bentuk bantuan harus dinaikkan kepada bantuan yang sifatnya bergulir. Kalau mereka mampu menggulirkan bantuannya, maka kita naikkan kepada bantuan kredit-subsidi. Dan kalau bantuan kredit subsidi inipun

mampu mereka kembalikan dengan lancar, maka kita naikkan kepada kredit komersial yang diberi kemudahan khusus antara lain tanpa jaminan. Akhirnya apabila telah beberapa kali mampu mengembalikan kredit komersial ini dengan lancar, maka kita naikkan lagi ke kredit komersial penuh. Dengan cara demikian maka kita berhasil mendidik mereka menjadi mandiri dalam kebutuhan permodalan usaha.

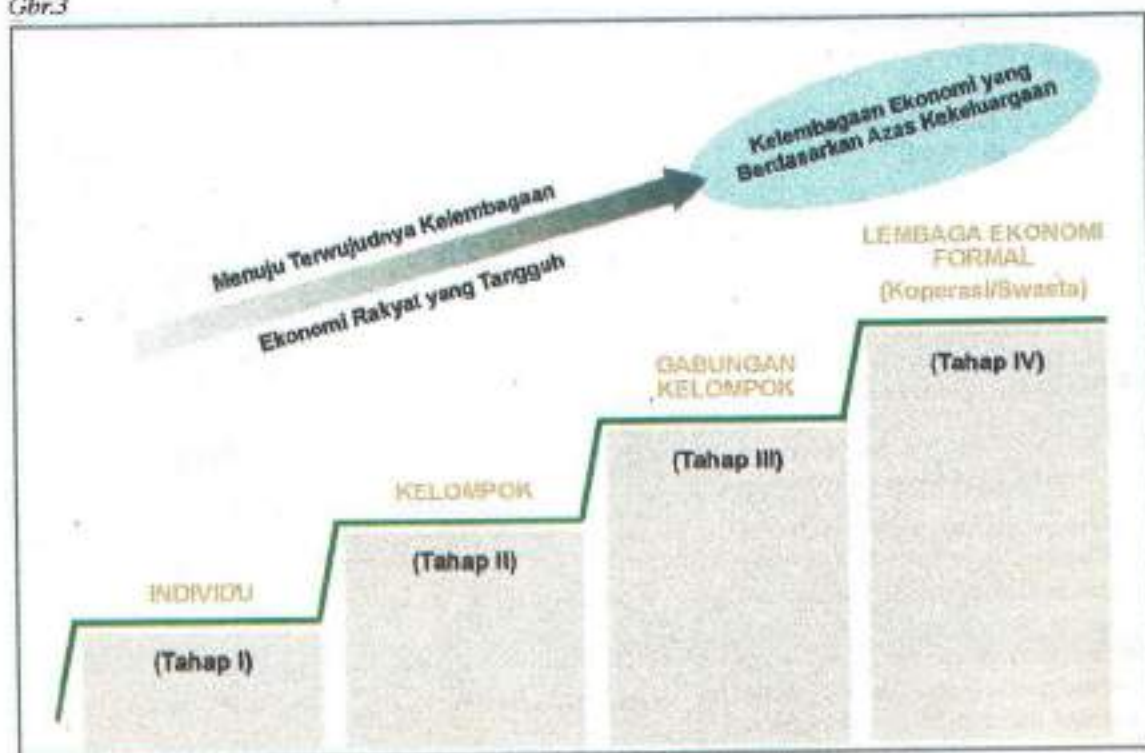
Artinya, apabila mereka membutuhkan tambahan modal bagi pengembangan usahanya mereka mampu berhubungan dengan Bank sendiri dan mampu memenuhi persyaratan Bank (*bankable*). Dengan cara pemberian bantuan yang sifatnya mendidik seperti itu, maka akhirnya kita akan mampu menghilangkan ketergantungan dan akan tumbuh keswadayaan sehingga mereka mampu berusaha dalam Sistem Ekonomi Pasar.

Strategi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Rakyat dapat digambarkan sebagai berikut :

Usaha rakyat kecil yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan, umumnya jalan sendiri-sendiri dan dengan modal serta keterampilan yang sangat terbatas, Ruang gerak pasarnya pun terbatas, bahkan kadang-kadang tidak menentu, sehingga sangat labil. Keberanian menanggung resiko sangat kecil, sehingga sulit keluar dari pola tradisi usahanya, yang biasanya sudah turun temurun. Upaya Tahap I yang harus dilakukan adalah menyadarkan mereka bahwa mereka itu miskin dibandingkan dengan rekan-rekannya yang lain dan kemudian kita tanamkan rasa percaya pada diri mereka bahwa mereka mampu memperbaiki kehidupannya yang miskin tersebut melalui peningkatan kemampuan dalam berusaha.

Rakyat kecil yang usahanya sendiri-sendiri, harus kita dorong dan kita bimbing agar mau dan mampu bekerjasama dalam kelompok (Tahap II). Produk mereka yang umumnya berkualitas rendah dengan ruang gerak pasar

Gbr.3



yang terbatas, harus kitatingkatkan menjadi produk yang cukup berkualitas sehingga mampu membuka ruang pasar yang lebih luas.

Dalam menumbuhkan dan membina pengusaha kecil dari golongan rakyat kecil dengan modal sangat kecil ini (Antara seratus sampai lima ratus ribu rupiah), perlu diterapkan 7 (tujuh) prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Pendekatan Kelompok

Bimbingan dan pembinaan dilakukan melalui pendekatan kelompok, sehingga menumbuhkan kekuatan gerak dari para pengusaha kecil tersebut. Kelompok ditumbuhkan dari, oleh dan untuk kepentingan pengusaha kecil itu sendiri bukan kepentingan pengusaha besar atau kepentingan instansi/lembaga pembina.

2. Prinsip Keserasian

Anggota kelompok haruslah terdiri dari para pengusaha kecil yang saling mengenal, saling percaya dan mempunyai kepentingan yang sama, sehingga akan tumbuh kerjasama yang kompak dan serasi.

3. Prinsip Kepemimpinan dari Pengusaha Kecil

Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para pengusaha kecil untuk mengembangkan kepemimpinan dari kalangan mereka sendiri. Bimbingan perlu diberikan agar mereka mau dan mampu memilih pengurus kelompok dari, oleh dan untuk kepentingan si kecil.

4. Prinsip Pendekatan Kemitraan

Memperlakukan para pengusaha kecil sebagai mitra kerja sejajar, yang berperanserta aktif dalam pengambilan keputusan. Ikut sertanya mereka dalam seluruh proses pengambilan keputusan akan menjadikan mereka mitra kerja yang aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

5. Prinsip Swadaya

Bimbingan dan bantuan yang diberikan haruslah yang mampu menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian, jangan menumbuhkan ketergantungan.

6. Prinsip Belajar Sambil Bekerja

Bimbingan belajar yang efektif adalah bimbingan dengan materi yang sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan sambil bekerja. Dengan cara demikian mereka benar-benar melakukan sendiri, mengalami sendiri dan menemukan sendiri cara-cara kerja yang efektif bagi peningkatan usahanya.

7. Prinsip Pendekatan Keluarga

Usaha kecil umumnya identik dengan usaha keluarga. Maka oleh karena itu yang dibimbing dan dibina tidak hanya bapaknya, tapi juga ibunya dan anak-anaknya, sehingga seluruh anggota keluarga mendapat pembinaan.



ANGKET PEMBACA ekstensia

Jadilah "Keluarga ekstensia", dan Daftarkanlah diri anda melalui Angket ini. ekstensia penerbitan berikutnya hanya akan mengunjungi Anda yang telah mencatatkan identitas diri atau instansi serta alamatnya melalui Angket ini dan mengirimkannya kembali ke Sekretariat ekstensia.

Salam ekstensia,

ekstensia adalah majalah anda, majalah kita semua, milik para Penyuluh Pertanian, dan milik para pembacanya yang tersebar di seluruh tanah air tercinta. Eksistensi, dinamika dan kelanjutan penerbitan serta peningkatan kualitas baik isi, penyajian dan penampilannya akan sangat bergantung pada respons dan partisipasi serta rasa memiliki dari para penyuluh dan para pembacanya.

Kami yakin, anda semua akan sependapat dan seiring dengan itu, kami ucapkan selamat mengisi Angket ini, dan catatkanlah identitas diri/instansi dan alamatnya serta kirimkan kembali ke alamat kami.

Terima kasih atas partisipasi anda, dan selamat menjadi "Keluarga ekstensia"

KEPADA YTH.

SEKRETARIAT EKSTENSIA

PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN

Kampus Deptan, Gedung A, Lantai III

Jl. Harsono RM No. 3,

Pasar Minggu, Jakarta 12550

Tentang Anda

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis kelamin : Pria/Wanita *
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat Rumah :
Alamat Kantor :
.....

Tentang Penyajian ekstensia

1. Cover/gambar sampul ekstensia

1. Menarik
2. Biasa saja
3. Kurang menarik

2. Huruf-huruf yang digunakan

1. Terlalu besar
2. Cukup besar
3. Terlalu kecil

3. Secara umum susunan kalimat dalam tiap rubrik

1. Sulit dimengerti
2. Cukup dimengerti
3. Mudah dimengerti

4. Gambar/foto yang disajikan

1. Menarik
2. Cukup menarik
3. Kurang menarik

5. Kualitas cetak

1. Kualitas cetak
2. Cukup
3. Kurang

Tentang Kegunaan ekstensia

1. ekstensia perlu dibaca dan berguna bagi para penyuluh

1. Setuju
2. Tidak

2. ekstensia memuat informasi yang menambah wawasan dalam ilmu penyuluhan pertanian

1. Setuju
2. Tidak

3. Kondisi yang disajikan dalam ekstensia erat hubungannya dengan kondisi lingkungan kerja pembaca

1. Setuju
2. Tidak

4. Berita yang disampaikan ekstensia hadir pada saat yang tepat

1. Setuju
2. Tidak

5. Informasi yang disuguhkan ekstensia sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pembaca

1. Setuju
2. Tidak

Tentang Isi ekstensia

1. Rubrik-rubrik di ekstensia menurut saya

- | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1. Paling menarik | : | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 2. Sangat penting | : | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 3. Terlalu panjang | : | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 4. Terlalu pendek | : | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 5. Tidak menarik | : | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |

Rubrik 1 = Jendela; 2 = Cakrawala; 3 = Jendela; 4 = Cengkerama; 5 = Cermin; 6 = Ssst ..., 7 = Celoteh; 8 = Wacana; 9 = A ... ekstensi

2. Kesan saya tentang isi ekstensi secara keseluruhan

1. Bergengsi
2. Berbobot
3. Khas
4. Biasa saja
5.

3. Saran saya terhadap isi ekstensi selanjutnya



LOGICAL CONSTRUCT PEMBANGUNAN PERTANIAN

Fungsi dan Kedudukan penyuluhan Pertanian
dalam Pembangunan Pertanian

Oleh : *Prof. Herman Soewardi*

Sebagai seorang ilmuwan sejati Prof. Herman Soewardi tergelitik untuk memberikan suatu pandangan terhadap sesuatu yang menyangkut disiplin keilmuannya.

Berikut ini disajikan satu tulisan beliau yang memberikan komentar terhadap isi atau pembahasan yang hadir pada ekstensia penerbitan pertama (ekstensia).

I. PERMASALAHAN

Dari tulisan-tulisan dalam majalah **ekstensia** volume I tahun I, Oktober 1994 saya memperoleh kesan tentang beberapa hal, terutama tentang masyarakat pertanian maupun pembangunan pertanian kita. Antara lain :

1. Mentan (hal. 3):

Diperlukan penyuluhan pertanian yang **handal** melalui peningkatan terus menerus dari pengetahuan, kemampuan dan profesionalisme mereka, sehingga mereka mampu mewujudkan proses dan sistem usahatani yang **dinamis dan rasional**, yang harus tercermin dari perilaku para petaninya.

2. Salmon Padmanagara (hal. 8):

Sangat menekankan bahwa penyuluhan pertanian perlu ditujukan untuk mewujudkan kemandirian petani sebagai dasar untuk kemajuan petani.

3. Ranny Mutiara (Hal.9) :

Dibandingkan dengan 25 tahun yang lalu, kelompok tani telah pandai dalam pengambilan keputusan (yang lebih rasional).

Hal. 17: Pendidikan diarahkan kepada kemampuan berinteraksi dengan unsur-unsur pembangunan usaha yang lebih modern.

Hal. 21: Penyuluh lebih banyak bergulat kearah kegiatan administratif.

Hal.23: Pada kerangka pembangunan pertanian telah terjadi suatu **dinamika proses interaksi yang cepat**.

4. Affendi Anwar (hal.47):

Memperkirakan bahwa pembangunan pertanian di masa datang akan "diwarnai" oleh:

- Sifat evolusi dari permintaan domestik terhadap beras dan tanaman pangan lain.
- Pendapatan devisa dari luar negeri
 - pasar ekspor
- Trade off antara substitusi impor dan promosi ekspor
- Efisiensi dalam penggunaan sumberdaya alami.
- Pertumbuhan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja dalam sektor pertanian.



Prof. Herman Soewardi

Saya tidak akan membantah kesemuanya itu, namun saya hanya akan berusaha menjalin kesemuanya itu dalam suatu "logical construct" sehingga kita bisa memahami bagaimana masyarakat kita ini, pembangunan pertanian dan bagaimana fungsi dan kedudukan penyuluhan pertanian di dalamnya. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan semuanya itu konsisten.

II. "LOGICAL CONSTRUCT" PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

1. Mellor (1967) tidak puas dengan teori tahapan Rostow yang dikatakannya "leads nowhere" mengemukakan teori transformasi bi-sektoral sebagai alternatifnya. Dua sektor pertanian dan industri berinteraksi satu sama lain, sektor pertanian menciut dan sektor industri membesar. Dalam pembesaran ini, sektor pertanian menyumbangkan pangan dan tenaga kerja. Untuk itu *term of trade* harus memburuk bagi sektor pertanian, sebab bila tidak tenaga kerja tidak beralih dari sektor pertanian ke sektor industri. Demikianlah inti teori transformasi Mellor.

Ditambahkan oleh Mellor bahwa produksi pangan bisa konstan atau bisa pula meningkat. Namun diharapkan bahwa produksi pangan itu meningkat. Adapun *term of trade* memburuk ke sektor pertanian menunjukkan bahwa akumulasi kapital harus terjadi di kota/ sektor industri. Disini kita melihat hukum/teori Mellor berbaur kontradiksi: produksi pangan tidak mungkin meningkat bila akumulasi kapital terjadi di kota. Baginya hanya ada satu kekecualian, ialah bila ada pengaliran modal dari sektor industri ke sektor pertanian, hal mana akan mengakibatkan terkurasnya sektor pertanian oleh sektor industri. Sedangkan di lain pihak, tenaga kerja dari sektor pertanian belum tentu diserap oleh sektor industri (dalam imbalan yang wajar), karena sektor industri terdorong oleh keinginan untuk maksimalisasi keuntungan meningkatkan efisiensinya dengan jalan **penyerasan tenaga kerja**. Maka teori Mellor sebenarnya hanya memprediksi hal-hal yang negatif ialah :

- a. pangan tersedot ke kota – orang kota lebih banyak makan sedangkan orang desa lebih sedikit makan;
- b. sektor pertanian tersedot dalam kekayaan modalnya oleh sektor



- industri, dan menjadi lebih tersedot lagi setelah ada pengaliran modal dari sektor industri ke sektor pertanian ;
- c. tenaga kerja yang mengalir dari desa (pertanian) ke kota (industri) tidak terserap, mereka hanya tertumpuk saja di sektor informal, yang lebih membengkakkan sektor informal (di kota).

2. Betapapun buruknya prediksi Mellor, tapi itulah kenyataan yang terjadi di negeri kita. Kesenjangan antara sektor pertanian dan sektor industri menjadi lebih menganga (lihat Syahrir, 1994), sangat boleh jadi pendapatan perkapita kedua sektor itu meningkat, akan tetapi peningkatan sektor industri jauh lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan dalam sektor pertanian.

3. Memburuknya term of trade ke sektor pertanian menjadikan "share" petani mengecil. Bahwasanya menurut perjalanan sejarah "share" petani selalu kecil sedangkan "share" orang kota selalu besar, dapat kita tunjukkan kemegahan-kemegahan yang terjadi di kota.

Sejak abad VIII dan abad IX, padi sawah yang diketemukan di kaki gunung Merapi-Merbabu dibawah pemerintahan raja-raja Syailendra, merupakan penyedotan kota terhadap desa. Upeti yang harus dibayar petani sangat berat. Petani hidup melarat tapi di kota dibangun kemegahan-kemegahan berupa candi-candi: Borobudur, Prambanan dan Mendut. demikianlah dituturkan oleh Schrieke (lihat Schrieke 1930 - 1959). Selanjutnya petani ingin melepaskan diri dari cengkraman itu dan pindah ke utara. Berdirilah di utara sebuah kerajaan Wurawari. Hal yang sama dilakukan oleh rajanya terhadap para petani yang pindah dan bersawah di sana. Maka berdirilah candi Sewu. Para petanipun menjadi jera. Sekarang mereka pindah ke timur, ke lembah sungai Berantas, dibawah naungan

kerajaan Majapahit (abad XIII-XV). Juga para petani mendapat perlakuan yang sama, namun kini bukan untuk mendirikan candi-candi, akan tetapi untuk memerangi kerajaan-kerajaan pantai seperti Surabaya, Tuban, Gresik dan Jepara. dengan demikian kerajaan pedalaman menguasai kerajaan pantai berkat surplus beras. Sehingga perdagangan laut (sampai ke India dan Cina) kerajaan-kerajaan pantai pindah tangan ke kerajaan pedalaman (Majapahit) dan berhasil Majapahit mempersatukan seluruh Nusantara dan merentang perdagangan laut sampai ke India dan Cina. Maka setelah Sriwijaya (abad VII-XIV), kerajaan Majapahit menjadi negara Adi kuasa di kawasan Asia Tenggara. Berlandaskan apa keadi-kuasaan itu ? tak lain adalah surplus beras, yang diboyong ke kota (sebagai upeti) dengan "share" bagi petani yang sangat sedikit.

4. Maka kita tak perlu heran dan sangsi, mengapa pada abad XX ini di bawah pimpinan Orde Baru negara kita menjadi jaya (termasuk kepada "economy miracle" Pacific Basin), karena kita, sepanjang masa PJP I, memberikan "share" yang sangat sedikit bagi petani untuk memacu kegiatan ekonomi orang kota. Swasembada beras tercapai pada tahun 1984, bukan dengan insentif bagi para petani, akan tetapi perekeyasaan adopsi Subsidi pupuk dikurangi terus (sampai akhirnya dicabut sama sekali) dan dilain pihak harga beras selalu ditekan (melalui market operation Bulog). dapatkah semua kebijaksanaan seperti ini (share petani yang rendah agar kegiatan ekonomi orang kota memuncak) dipertahankan terus dalam PJP II ? saya kira TIDAK.

5. Benar, dalam pembangunan ekonomi kurun PJPI, disamping banyak keberhasilan, terjadilah kesenjangan yang lebih menganga antara sektor pertanian dan sektor industri. Namun di

dalam sektor pertanian pun terjadi kesenjangan, ialah antara "lapisan atas" dan "lapisan bawah" (lihat disertasi saya, 1972/1976 halaman 42-45). Adapun penyebab dari kesenjangan ini terutama adalah **Achievement Motivation** yang rendah pada lapisan bawah dan tinggi pada lapisan atas. Hal ini cukup serius mengingat lapisan bawah yang rendah N-achnya itu terdiri dari dua per tiga penduduk desa. Karena itu para petani lapisan bawah, meskipun diberi insentif, tetap akan menyia-nyaiakan kesempatan itu.

N-ach yang rendah berasosiasi dengan **tiadanya kemandirian** (seperti dicita-citakan oleh Salmon Padmanagara) dan **tiadanya kebiasaan untuk mengambil keputusan** (seperti didambakan oleh Ranny Mutiara). Tiadanya kemandirian menjadikan mereka selalu tergantung kepada orang lain, terutama kepada atasan (lihat Koentjaraningrat, 1983), dan tidak biasanya mengambil keputusan menjadikan mereka selalu mengekor orang lain. Untuk menghilangkan kedua sifat yang buruk itu kita perlu **meningkatkan N-ach mereka**, yang menurut hemat saya harus menjadi **fokus utama daripada penyuluhan pertanian pada PJP II ini**. Tanpa peningkatan N-ach, segala insentif, peningkatan keterampilan, dsb. tidak akan berjalan efektif.

6. Bagaimana timbulnya N-ach yang rendah dan bagaimana upaya meningkatkannya? Lihatlah buku saya "Filsafat Koperasi atau Co-operativism, 1995 hal. 143-145, dimana saya menekankan betapa pentingnya keagamaan diikutsertakan dalam upaya peningkatan N-ach. Istilah lain untuk N-ach adalah **nilai-nilai instrumental**.

7. Logical Construct yang disajikan disini dapat disebut "**SHARE DAN ACHIEVEMENT MOTIVATION DALAM TRANSFORMASI AGRARIS KE INDUSTRIAL**", yang singkat-

nya adalah fungsi sektor pertanian dalam transformasi ekonomi dari agraris ke industrial adalah **penyuplai pangan dan tenaga kerja kepada sektor industri yang membengkak**, dengan dua faktor pendorong utama : **share bagi petani yang harus ditingkatkan dan N-ach yang harus ditingkatkan dengan bantuan keagamaan**. Dengan demikian bahkan sektor pertanianlah yang perlu ditunjang oleh sektor industri.

III. FUNGSI DAN KEDUDUKAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN

1. Penyuluhan pertanian adalah upaya untuk **merubah perilaku petani** atau "*changing behavior*". Hal ini sudah kita sepakati bersama namun yang biasanya tidak dimaklumi adalah bahwa **keperilakuan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan pertanian itu terdiri dari tiga aspek, ialah:**

- a). **Pelaksanaan kewajiban** (yang harus LURUS);
- b). **Daya Juang** (yang harus KUAT) atau "*Achievement Motivation*" dan
- c). **Keterampilan** (yang harus TINGGI).

Dengan singkat dapat kita katakan bahwa **keperilakuan (atau yang sekarang populer disebut mutu SDM) itu adalah LURUS, KUAT, TINGGI**, sedangkan **petani kita pada saat ini adalah kebalikannya, ialah BENG-KOK, RENDAH, LEMAH**. Inilah fungsi penyuluhan pertanian dalam pembangunan pertanian. Hal ini memberikan implikasi bahwa para penyuluh harus LURUS, KUAT dan TINGGI.

Lurus adalah **ETIKA PENYULUHAN** dan **TINGGI** adalah **PROFESIONALISME PENYULUHAN**. Bagaimana dengan **DAYA JUANG** yang harus

kuat itu ? Hal ini tidak pernah dibicarakan dalam masyarakat, pemerintah, dan perguruan tinggi kita. Saya mencoba menunjukkan **DAYA JUANG KITA YANG LEMAH** yang saya lihat sebut **LEMAH KARSA** atau **MOBIL KURANG TENAGA**, yang dikarakterisir oleh lima sifat :

- 1). Tak ada orientasi ke depan,
- 2). Tak ada "*growth philosophy*",
- 3) Kurang ulet atau cuko,
- 4). Retraitisme;
- 5). Inertia

(lihat buku saya "Filsafat Koperasi atau Co-opertivism" hal 130).

2. Dalam upaya peningkatan penyuluhan pertanian dari PJP I ke PJP II, Mentan berpesan agar para penyuluh pertanian harus **handal** dsb. (lebih terinci lagi, lihat matrik *)

PJP I	PJP II
a. Agriculture (statis)	Agribisnis (dinamis)
b. Government – led (power)	Bussines – led (money)
c. Penyuluh	Konsultansi
maka : LURUS, KUAT, TINGGI dalam alam statis	LURUS, KUAT, TINGGI dalam alam dinamis dalam bentuk : a. Adjustment dalam alam komersil – gesit – perhitungan cermat – pembukuan rapi – keputusan cepat – mandiri b. Penyelesaian sengketa melalui hukum – kontrak c. Group action. (Keltan, koptan) Ini disebut <i>better bussiness</i> .

IV. JAWABAN TERHADAP EKSTENSIA

A. Peranan Penyuluhan Pertanian dalam membangun dinamika respons masyarakat tani.

1. Telaahan Sosiologis :

Pada umumnya penyuluh hanya berhubungan dengan "lapisan atas" saja, dari mana inovasi "menetes" ke lapisan bawah, yang cukup lambat. Namun hal ini telah dapat dipercepat dengan "Group Action", misalnya dalam Kelompok Insus (lihat disertasi Duding A Adjid, 1985).

2. Keluaran (out put) penyuluh:

Tidak lain adalah perilaku petani yang berubah, ialah menjadi LURUS, KUAT dan TINGGI. Sejauh ini penyuluh hanya membuat perilaku petani menjadi TINGGI saja ("*better farming*"), akan tetapi tidak menjadikan LURUS dan KUAT.

B. Pengembangan Profesionalisme Penyuluh

1. Etos Kerja :

Dapat diberikan AMT (*Achievement Motivation Training*, misalnya berlandaskan pada Mc Clelland) tapi saya kira perlu dibantu oleh motivasi keagamaan

2. Pra Kondisi :

Perlu agar standar hidup mereka dipertinggi. Pejabat Struktural dan fungsional agar tidak terlalu *jomplang*.

3. Pola Pembinaan Materi :

Pada dasarnya agar sistem LAKU dibangkitkan dengan *planning* yang jitu dan disempurnakan.

C. Mekanisme dan Sistem kerja

Konsep Kerja sebagai penyuluh agar mereka meningkatkan etos kerja (N-ach) petani, sebagai konsultansi agar mereka menguasai "*business*".

Kata Mereka tentang ekstensia

Peluncuran Perdana Majalah ekstensia, yang tampil sebagai majalah ilmiah populer bidang keilmuan penyuluhan pertanian, ternyata mengundang banyak komentar.

Begitulah isyaknya media yang baru lahir dan baru dikenal, maka kritik, protes sampai dengan harapan dilontarkan kehadapannya, seolah beban tanggungjawab yang harus selalu diperjuangkan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan para pelanggannya.

1. Syamsuddin Abbas

(Kepala Badan Diklat)

"...ekstensia perlu lebih giat untuk mencari memilih dan menggali topik-topik menarik untuk pelanggannya".

2. Amrin Kahar

(Dirjen Tanaman Pangan)

"... ekstensia harus menjadi wadah dan penggalan informasi yang membantu para penyuluh dalam menjalankan tugasnya... ekstensia harus tampil dengan informasi yang berbeda dengan media cetak lainnya yang sudah lebih dulu terbit di jajaran Departemen Pertanian".

3. Ues Hardiana

(Penyuluh Pertanian Dinas TP Jawa Barat)

"ekstensia harus menjadi ajang budaya baca pada tulisan yang berbobot dan lebih mendalam, ekstensia harus sekaligus sebagai media belajar otodidak yang MURAH dan efektif bagi rekan penyuluh di lapangan.

ekstensia harus punya KEPEKAAN dan KEPEDULIAN terhadap penggalan masalah-masalah tidak hanya teknis tapi juga terhadap masalah sosial, emosional menggerakkan masyarakat membangun".

4. Soetatwo Hadiwigeno

(Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian)

"... Harus diciptakan mekanisme tambahan dalam wadah organisasi, yang merespons, yang mendiskusikan dan menginterpretasikan tulisan-tulisan pada ekstensia agar terwujud ekstensia sebagai wahana belajar otodidak.... Disamping itu ekstensia diharapkan dapat merangkul, memobilisir, menggerakkan rekan penyuluh dalam disiplin kerja...".

5. KTNA, DKI.Jaya

"ekstensia menarik dan siap membantu menyebarkan tapi tolong bahas ekstensia lebih disederhanakan".

6. Alex Syarifuddin

(Bappenas)

"... Memang sudah menjadi tujuan kita, agar ada media yang mampu meniptakan suasana mempercepat alih teknologi dan sekaligus sebagai media umpan balik bagi pencipta teknologi itu sendiri".

7. Yati Nuryati

(Penyuluh Pertanian Kab. Cirebon – Jawa Barat)

"... Sisipkan cerita-cerita yang lucu dan sertakan khas masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, jangan Jawa Barat saja – Agar kita bisa saling belajar...".

8. Ru'jat Wiratmadja

(Ketua Program Nasional PHT)

"... Saya turut membidani lahirnya ekstensia, ekstensia memang mejalah untuk penyuluh Pertanian guna membantu meningkatkan profesionalismenya".

Akhirnya, memang tidak cukup untuk mengenal ekstensia hanya dengan membaca satu kali penerbitan, suatu saat nanti jika ekstensia terbit lagi dan terbit lagi, hingga orang dapat lebih lama dan lebih banyak membaca dan membaca lagi, maka kurun waktu itulah orang akan mengenal ekstensia dengan segala misi dan tujuan ekstensinya.

dan KERLAP pun menjadi GEMERLAP



Sosok perempuan
dari waktu ke waktu selalu menjadi
perhatian

Kerengsaananya seolah merupakan
beban terwariskan

Tawanya kadang mampu merambat
sejarah zaman





Mengintip kerja kaum perempuan di alam pertanian, membuka mata hati dan membuat kita terhenyak seraya berdecak kagum alangkah banyak, alangkah kuat dan alangkah bernilainya sumbangsih kaum ini.

Padi, ikan, ternak dan segala apa yang tumbuh dan hidup seolah tidak asing akan sentuhan tangan perempuan yang menari-nari lincih menganyam kesabaran dan ketabahan.



Foto-foto ini ditampilkan dengan niat menggambarkan kerja dan kegiatan kaum perempuan di dunia pertanian.

Materi dipersiapkan dan dipilih berdasarkan kredial keahliannya menulis yang memiliki ciri yang spesifik lampil bersama anak-anak menulis.

Teknik pengambilan gambar tentunya difokuskan pada kegiatan menulis perempuan dengan memanfaatkan pencapaian belak yang telah dipelajari.

(Foto dan tulisan : Anni Samudra)





Empaty penyuluh; harus mampu menangkap kerap-kerap nafas tangan perempuan yang mengisyaratkan gemerlapnya dunia pertanian, karena diiringi tarian tangan kaum perempuan yang dengan penuh eros, penuh dengan kecintaan yang meluap-luap pada kerja, pada alam, dan juga pada anak-anak mereka yang seolah tidak bisa lepas menjadi bagian hidupnya.



Bercengkerama dengan Terjangang Ombak

Topik yang dilontarkan ekstensia volume I, setelah topik KCI tersendat di lima belas kali musim tanam, adalah topik diterjang ombak. Tragedi diterjang ombak yang dirasakan oleh seorang penyuluh, adalah kepekaan empatinya yang berbaur dengan alam perasaan petani nelayan yang menjadi mitra kerjanya ketika mereka mengalami kemacetan kredit, sehingga tunggakan demi tunggakan terus menerus membesar tanpa mampu dikembalikan oleh petani nelayan tersebut. Kondisi dan situasi seperti itulah yang kemudian disimbolkan sebagai terjangang ombak yang meluluh lantakan semangatnya sebagai penyuluh pertanian, yang gagal menghantarkan petani nelayan untuk meraih modal dan mengembangkan usahatani petani nelayan itu sendiri.



ada cengkerama diantara para penyuluh, ekstensia telah menerima sumbangsih kekayaan pengalaman, lewat karya tulis yang diungkapkan oleh tiga rekan penyuluh pertanian yang berasal dari tiga propinsi.

Ungkapan pengalaman pertama ditulis oleh sdr. Sudaratmaja penyuluh pertanian pada IP2TP provinsi Bali, yang mengungkapkan pengalamannya mengenai eksistensi Subak pada Era Globalisasi. Sebuah penjelajahan

pengalaman, dimana norma adat - sosial yang telah lama hadir mampu menjadi tatanilai yang membangun kebersamaan, membangkitkan harga diri dan budaya malu jika melanggar norma adat yang telah disepakati. Lewat tatanilai subak, yang dipagari *awig-awig* inilah maka modal dapat diraih kelompok tani pengelola subak dan tak pernah mengalami kemacetan pengembalian kredit.

Ungkapan pengalaman kedua ditulis oleh sdr. Suwito, penyuluh pertanian pada kabupaten Blera provinsi Jawa Tengah, yang mengungkap pengalaman seputar keterlibatannya pada program peningkatan pendapatan petani nelayan kecil (P4K). Pada pengalaman ini Suwito menemukan bahwa kredit yang diberikan pada Kelompok Petani Nelayan Kecil (KPK), bukanlah sekedar memberikan kredit lantas selesai, tetapi didalamnya ada proses, ada tahapan, ada tujuan yang mendidik dan membangun keswadayaan dan kemandirian KPK itu sendiri. Hasil kinerja ditampilkan dengan lebih dari 50 KPK mampu meraih modal/kredit dan mampu

Pengalaman yang tak tertulis

Apa yang menjadi tujuan rubrik ini, bukanlah sekedar obrolan santai tanpa arah, bukan pula omong-omong kosong tanpa isi, nemun diela-ela canda, tapi dalam keakraban bercengkerama kadang terdengar lontaran ungkapan pengalaman yang layak untuk didengar.

Semata-mata, hanya karena pengalaman yang teramat berharga itulah rubrik ini diturunkan. Sehingga apa yang mereka lihat, dengar, rasakan dan dialami tersebut melalui perjalanan panjang, kerja keras dan perjuangan tanpa henti, sesungguhnya merupakan pencerahan inovasi yang berharga, pengalaman yang memberikan nilai tambah pada lingkungan organiknya. Sehingga, pengalaman tersebut hendaknya juga dapat mengalir, berputar makin membesar saling berbagi dan memberi serta menjadi pengalaman milik kita bersama. Semoga.

mengembalikan pinjamannya, tanpa menunggak.

Ungkapan pengalaman ketiga ditulis oleh sdr. Subani, penyuluh pertanian swakarsa (ketua kelompok KTNA Jawa Barat), yang juga ketua KUD trisula Palasah, kabupaten Majalengka provinsi Jawa Barat. Bagi dia Modal berarti menggerakkan masyarakat tani dalam koperasi. Sebuah penjelajahan baru yang ditemukan secara otodidak, bahwa koperasi sebagai kelembagaan ekonomi di pedesaan, daya hidupnya, dinamika kegiatan-kegiatannya tumbuh dan berkembang hanya karena tumbuh dan berkembangnya dinamika kesadaran masyarakat tani yang faham manfaat koperasi serta bergerak bersama membangun koperasi. Kristalisasi penjelajahannya itu menghasilkan kebersamaan masyarakat tani yang lemah, yang tersebar bergerak membangun kerjasama dalam wadah organisasi yang kuat, yaitu KUD Trisula. Dalam perjalanan selama kurang lebih 10 tahun masyarakat tani dalam wadah KUD ini mampu memanfaatkan kredit usaha tani hingga mencapai sekitar 200 juta rupiah tiap musim dan mampu mengembalikan pinjamannya tanpa menunggak.

Pada hakekatnya ketiga penulis ini bercengkerama di sela-sela seribu terjangan ombak dengan irama, isi muatan serta penjelajahan yang berbeda. Pancaran inovasinya memberikan respon yang spesifik dan tergalil berdasarkan penjelajahan pengalaman pada karakteristik sistem dan lingkungan organik yang membesarkannya. Ketiga ungkapan pengalaman tersebut ternyata telah saling memperkaya, dan memberikan pesan penting. Namun apakah misi penyampaian pesan yang tersurat dari ketiga penulis ini telah mencapai tujuannya, yaitu memberikan sumbangsih curahan pikiran dari hasil pengalamannya? Semua terpulang



kepada kita, khususnya para penyuluh pertanian yang telah membaca dan membaca lagi buah pikiran mereka dalam proses penjelajahan, pengkayaan dan pembauran dengan sistem nilai dan pengalaman yang kita miliki sendiri!

Berikut ini sebuah petikan kejadian, yang bermakna suatu upaya untuk menyadari, membangkitkan dan menggalang kekuatan yang ada pada kalangan sendiri, menjawab berbagai terjangan ombak yang bagi sementara rakyat kecil yang lemah seumpama parahnya belitan kepasrahan, ketergantungan dan apa pun namanya sebagai keajaiban menumbuhkan prakarsa dan swadaya yang merupakan prasyarat awal merah modal.

andi sumarga

Si Petani dan Sang Gubernur

Konon di Filipina, Kala itu, tahun 1967. Tersebutlah, Dr. Orlando J. Sacay yang menjadi Kepala Dewan Pengembangan Pertanian Propinsi Rizal. Sebagaimana lazimnya, dia selalu menjadi penghubung antara petani dan gubernur.

Suatu pagi. Di depan kantor Sacay telah menunggu 10 orang petani, yang berasal dari kota kecil Tanay. Mereka sengaja bangun pukul empat pagi agar dapat menjumpai Sacay sepagi itu. Ketika Sacay bertanya apa keinginan mereka, para petani ini menjawab bahwa ada sesuatu yang amat penting. Hanya gubernurlah yang bisa memutuskannya. Sampai terakhir, Sacay tidak berhasil membujuk mereka untuk mengemukakan persoalan itu kepadanya terlebih dahulu. Mereka tetap bersikeras bertemu langsung dengan gubernur.

Apa boleh buat. Sacay terpaksa membawa mereka ke hadapan Gubernur Insidro Rodriguez, kemudian memperkenalkan mereka sebagai wakil sebuah koperasi pertanian.

"Apakah koperasi kalian sudah berjalan baik," gubernur mengawali pertanyaannya.

"Sudah, sudah ..., Pak," balas mereka bagai paduan.

"Apakah telah tumbuh kesadaran gotong-royong di kalangan anggota?"

"Ya ..., Pak."

"Jadi koperasi kalian terorganisasi baik?"

"Betul, Pak."

"Lantas apa maksud kalian menemui saya," tanya gubernur dengan nada lembut.

"Kami membutuhkan 3 buah alat penyemprot hama. Mohon bantuan, Pak," ujar seorang yang tampaknya pemimpin mereka.

"Berapa harganya," tanya gubernur lagi.

"Sebuah hanya 65 peso. Sehingga seluruhnya tidak lebih 200 peso. Suatu jumlah yang kami yakin amat tidak berarti bagi Bapak," bujuk yang pemimpin.

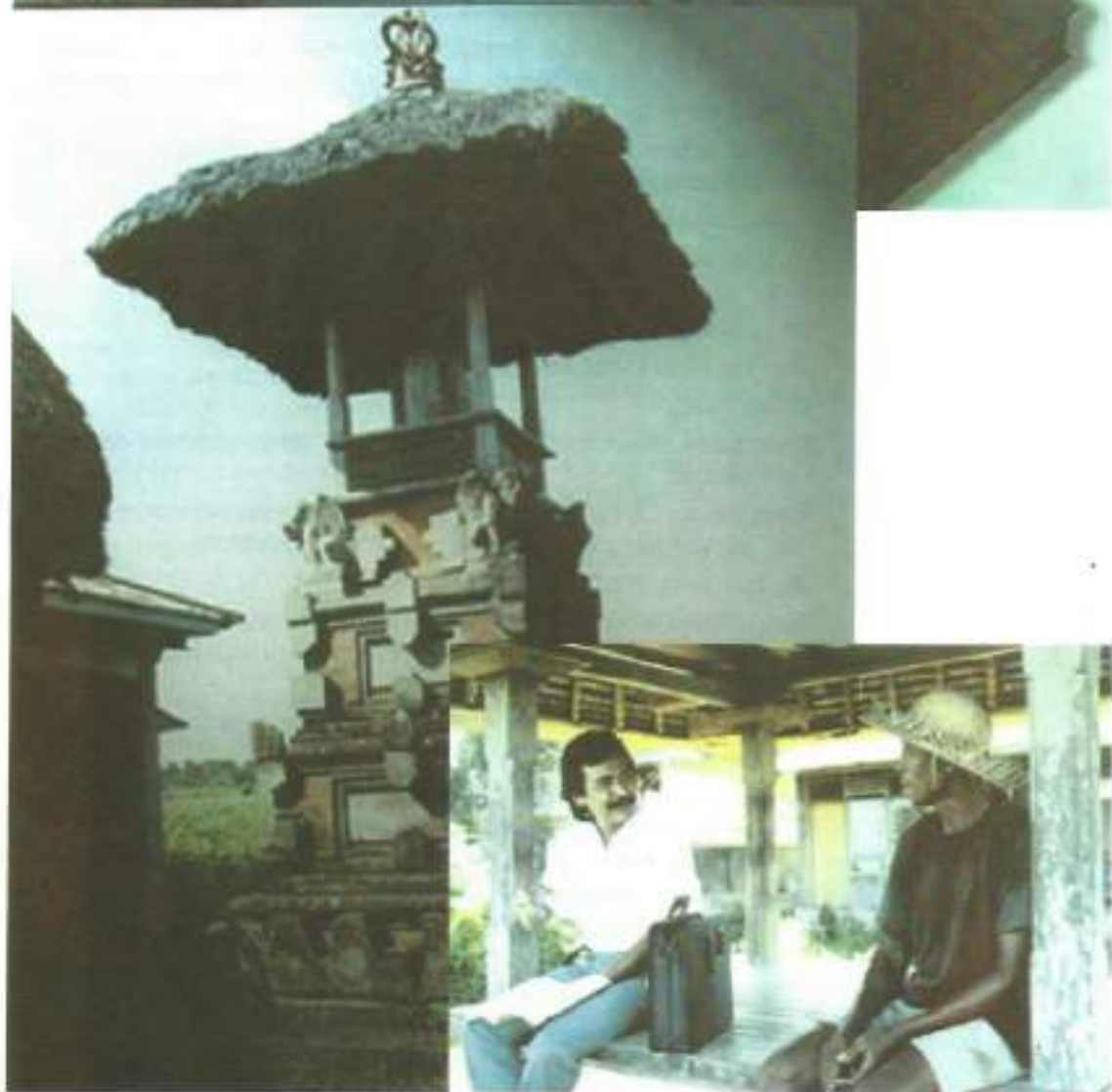
"Berapa jumlah anggota koperasi kalian," tanya gubernur sekali lagi.

"200 anggota aktif," seru mereka dengan bangga.

Kontan, raut muka gubernur jadi menegang. Lalu dia berkata dengan tegas: "Kalian sudah susah-susah bangun subuh dan datang dari jauh-jauh ke kantor saya. Kesemuanya ini, semata-mata untuk mengemis, mengemis suatu jumlah, yang dapat kalian himpun sendiri dari kalangan anggota dengan menyisihkan satu peso per orang!".

Erlangga Ibrahim, 1983.

Swadaya : Senantiasa Kata Kunci, dalam Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia.



Eksistensi Subak di Era Globalisasi Kuatkah Pijakannya ?

Oleh : *Ir. Sudaratnaja, MS*

Menyebut istilah subak tentu tidak asing lagi bagi kalangan praktisi pertanian termasuk juga pengamat sosial budaya. Subak sebagai produk budaya masyarakat Bali sudah dikenal lebih dari sembilan abad yang lalu. Definisi sederhana tentang subak memang mengacu pada kumpulan petani pemakai air. Boleh jadi karena begitu sederhana definisi yang difahami tentang subak sehingga banyak kalangan yang mempertanyakan eksistensinya, terutama di era sekarang ini yang ditandai dengan cepatnya perubahan karena pengaruh globalisasi.

ajian sosial memang memberikan isyarat bahwa masuknya modernisasi ke pedesaan dikhawatirkan akan merusak tatanan sistem nilai, kekerabatan dan gotong royong. Dimana modernisasi lebih berorientasi pada perubahan, rasional, mengacu pada ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomis serta kosmopolit. Sedangkan sistem tradisional memiliki ciri-ciri sebaliknya. Lalu bagaimana halnya dengan subak yang nota bene adalah lembaga tradisional, apa resepnya sehingga mampu bertahan sampai saat ini dan bagaimana "wajah" subak itu sekarang ? Rangkaian pertanyaan ini memang menarik untuk disimak.

Sosio Agraris Religius

Suatu lembaga/organisasi terlebih lagi yang tradisional seperti subak mampu eksis sampai sembilan abad lebih adalah sangat luar biasa. Dibalik itu, pasti ada sesuatu yang sangat esensial yang belum banyak diketahui dan diungkap. Hal penting tersebut adalah menyangkut sifat lembaga subak itu yaitu "Sosio Agraris Religius". Sifat atau ciri ini memang tidak secara eksplisit tersurat dalam naskah apalagi

dalam tulisan-tulisan kuno yang memuat tentang subak. Tetapi nuansa tersebut dapat dilihat dan dirasakan dalam aktivitas lembaga subak sehari-hari di lapangan. Contoh kongkrit yang dapat dikemukakan menyangkut ketiga sifat/ciri tersebut misalnya :

- Sosial (Sosio)** ; tercermin dari adanya kegiatan gotong royong, sifat tenggang rasa diantara anggota, kerjasama, pengabdian pengurus dan sebagainya. Dalam hal ini harmoni sosial lebih menonjol daripada pandangan komersial rasional
- Agraris** ; terlihat dari aktivitas pokok anggota (*Krama*) subak menyangkut kegiatan-kegiatan pertanian termasuk pengaturan air irigasi
- Religius** ; hal ini mungkin termasuk ciri yang sangat khas untuk lembaga subak yang tidak ada atau mungkin sangat jarang dijumpai pada lembaga sejenis di luar Bali. Masyarakat Bali sebagai penganut Hindu yang tant sangat loyal dan respon terhadap hal-hal yang berbau religius. Hampir semua aspek kehidupan masyarakat tidak lepas dari upacara dan sajen. Termasuk dalam subak, ada berbagai kegiatan upacara yang tidak hanya menambah mantapnya keyakinan



Ir. Sudaratnaja, MS
InP2TP Denpasar

dalam beraktivitas tetapi juga sebagai faktor pengikat antara anggota (*Krama*) yang sangat kuat

Satu lagi hal penting dan spesifik menyangkut kehidupan masyarakat Bali adalah adanya falsafah hidup "*Tri Hita Karana*" artinya secara harfiah, *Tri* : tiga, *Hita* : kesejahteraan dan *Karana* : penyebab. Dengan demikian *Tri Hita Karana* artinya *Tiga Unsur Penyebab Timbulnya Kesejahteraan*. Lalu apa saja unsur-unsur tersebut inilah penjelasannya :

a. Unsur Tuhan (*Parhyangan*)

b. Unsur Alam (*Palemahan*)

c. Unsur Manusia (*Pawongan*)

Harmoni hubungan ketiga unsur tersebut (manusia -Tuhan ; manusia-alam dan manusia-manusia) diyakini mampu mengantar kehidupan masyarakat Bali (baca : *Hindu*) untuk mencapai kesejahteraan hidup.

Konsep diatas berlaku universal dan tercermin dalam semua aspek kehidupan termasuk pada subak. Contoh kongkrit dan implementasinya dalam berbagai aspek kehidupan adalah sebagai berikut

No	Unsur Tri Hita Karana	Implementasinya dalam :		
		Subak	Desa	Rumahtangga
1.	Tuhan (<i>Parhyangan</i>)	* Pura Subak	* Pura/Tempat Suci Desa	* Pura Keluarga
2.	Alam (<i>Palemahan</i>)	* Areal Subak	* Wilayah Desa	* Pekarangan Rumah
3.	Manusia (<i>Pawongan</i>)	* <i>Krama</i> (anggota) Subak	* Warga Desa	* Anggota Keluarga



Perangkat aturan main (*awig-awig*) Subak, Desa, dan sebagainya umumnya mengacu pada hak dan kewajiban seseorang terhadap Tuhan, alam dan sesamanya sesuai dengan konsep Tri Hita Karana di atas.

Subak Sekarang Ini

Tidak ada yang langgeng di dunia ini kecuali perubahan. Demikian ungkapan lama menyebutkan. Subak juga tidak terlepas dari fenomena ini. Sembilan abad bukan waktu yang singkat sehingga tidak berani menjamin subak tidak mengalami perubahan. Ciri tradisional subak tidak cukup hanya dibanggakan sebagai museum, namun subak harus mampu berkontribusi dalam pembangunan khususnya bidang pertanian.

Subak Umabun, di Desa Angantaka yang terletak lebih kurang 15 Km. arah utara kota Denpasar dapat dikatakan mewakili wajah subak dewasa ini. Subak dengan 323 orang anggota (*krama*) dengan luas areal 92 Ha. ini sempat penulis kunjungi bersama ekstensia. Di mata penulis (yang

kebetulan kelahiran Bali asli) tidak ada yang terasa istimewa. yang ada hanya tambahan sentuhan menyangkut manajemen dan administrasi subak yang semakin tertata, akibat pembinaan dalam lomba intensifikasi dewasa ini. Ada **Bale Subak** (Tempat Pertemuan), **Pura Subak**, **Awig-awig** (Aturan Subak) yang sudah ditulis dan tercetak rapi ditambah buku tamu.

Misi pembangunan pertanian modern ternyata mampu diemban oleh lembaga subak yang tradisional. Semenjak diterapkannya program intensifikasi utamanya melalui program insus, subak mampu mengadopsi secara baik. Ikatan sosial yang kuat pada lembaga subak merupakan poin unggulan tersendiri dibandingkan dengan kelompok tani yang baru dibentuk. Penulis teringat pada penjelasan staf Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali sekitar tahun 1980-an lalu. Saat mana program insus baru diperkenalkan, daerah lain masih berkutat dengan rekayasa dan pembentukan kelompok tani, sedangkan provinsi Bali cukup memoles subak yang sudah ada.



I Ketut Ngenteg lelaki setengah baya *Pekaseh* (Ketua) Subak Umabun menyebutkan bahwa dia cukup senang memimpin subak yang dia tekuni sejak tahun 1979. Ditanya imbalannya dengan tersipu dia menyebut "tidak seberapa ya.....hanya Rp. 30.000,-/bulan" (sebagai *Pekaseh* Pemda Tingkat II memberi gaji Rp. 90.000,-/bulan dan ini dibagi tiga bersama dua orang *Kelihan Tempeknnya*). Sebagai pejabat *Pekaseh*, yang dia lebih nikmati hanya kepuasan bathin. Ini terbukti dari lebih 15 tahun memimpin subak belum pernah ada tunggakan KUT di subaknya. Padahal setiap tahun sekitar Rp. 40 juta kredit terserap, tetapi selalu lunas dibayar oleh anggota subak.

Gambaran umum posisi kredit Bimas (KUT) di Bali juga menunjukkan hal yang menggembarakan. Tahun 1984 ke bawah tunggakan nihil, sedangkan 1984 ke atas ada sedikit tunggakan yaitu lebih kurang Rp. 380 juta (1-2% dari total kredit yang terserap), ujar Ir. Komang Ardana staf SPH Bimas Provinsi Bali. Apakah semua gambaran di atas karena rahasia subak. "Oh...*Jelas*" ucapnya mantap. Kalau bukan mantapnya awig-awig subak dapat dibayangkan betapa besarnya tunggakan kredit yang ada.

Membuktikan betapa mantapnya awig-awig subak I Ketut Ngenteg menambahkan bahwa frekwensi terjadi pelanggaran di subak sangat jarang. "Atau mungkin karena sanksinya berat", tanya ekstensia ? justru sebaliknya jawabannya enteng. Sebagai contoh kalau tidak hadir gotong royong besar denda hanya Rp. 500,- sedangkan sebagai buruh kasar bangunan di Desa tersebut dengan mudah seseorang akan mengantongi Rp. 4.000,- - Rp. 5.000,-/hari. Itulah bandingannya secara ekonomis. Lalu kenapa anggota subak taat. Disini ternyata ukurannya tidak semata-mata nilai ekonomi, tetapi malunya itu lho !!! suat mana seseorang menyeter uang Rp. 500,- di forum

Sangkep (Rapat) subak karena kelalaiannya, berarti ratusan pasang mata akan mengamati gerak-geriknya. Wah.....semua itu rasanya sudah lebih dari nilai denda puluhan ribu. Lagi-lagi "Social punish" (Hukuman Sosial) menunjukkan keampuhannya.

"Reward" (Penghargaan) dan "Punish" (Hukuman) dalam teori sosial masyarakat memang harus berjalan seimbang. Di Subak Umabun ini bila ada tunggakan KUT, maka si penagih akan menerima 10% sebagai imbalan kalau terhutang membayarnya.

Berbicara masalah norma sosial, nilai sosial, rasa malu memang sering menimbulkan rasa geli bahkan terkadang apriori, akhirnya kitapun tanpa sengaja lantas membuat batas, bahwa nilai-nilai di atas hanya cocok tumbuh di pedesaan yang peradabannya masih terbelakang. Kalau demikian, orang kota juga sebenarnya tidak usah malu kalau suatu saat harus belajar banyak ke desa soal yang satu ini. Siapa tahu, nilai-nilai tersebut masih ada yang mendambakannya.....semoga.

Sepintas kehidupan Subak Umabun di atas cukup memberi isyarat bahwa betapa lembaga tradisional ini mampu bertahan bahkan juga mampu mengemban tugas pembangunan pertanian dengan baik. Hal ini disebabkan kuatnya falsafah dan pijakan subak, disamping mantapnya awig-awig yang telah disepakati anggota sehingga mempunyai kemampuan kontrol sosial yang dapat mengatasi sikap anggotanya yang menolak program pemerintah yang diemban oleh lembaga subak. Akhirnya harus disadari, bahwa norma tradisional itu bukan sama sekali tidak berguna. Karena dalam banyak kasus justru norma tradisional itulah yang mampu menjaga kestabilan suatu sistem. Contohnya.....ya subak itu tadi.

Merekapun mampu membangun dirinya sendiri

Pengalaman Membina Kelompok Petani / Nelayan Kecil di Kecamatan Banjarejo Kab. Blora Jawa Tengah

Oleh : *Suwito*

Sebelum masalah kemiskinan mencuat kepermukaan dan menjadi bahan perdebatan dimana-mana, sebetulnya Departemen Pertanian telah melakukan langkah-langkah kongkrit dalam upaya mengentaskan kemiskinan yaitu dengan Proyek P4K ini sejak tahun 1989/1990 (Fase II) dimana sasaran pembinaan telah jelas digariskan, yaitu petani yang mempunyai pendapatan kurang dari 320 Kg setara beras/kapita tahun dengan metode Pendekatan Pembinaan Kelompok Tani kecil yang bekerja sama dengan BRI, dengan pola Kredit semi Komersial.

Upaya untuk mengentaskan kemiskinan sudah merupakan tekad pemerintah, dimana sebelum tinggal landas diharapkan sudah tidak ada penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, sedikit-tidaknya sudah jauh berkurang. Upaya itu ditempuh dengan berbagai cara, antara lain oleh Departemen Pertanian dengan Proyek Peningkatan Pendapatan Petani/ Nelayan Kecil (P4K).

Adapun tujuan secara umum proyek ini adalah Pembinaan Kelompok agar anggota kelompok berkemampuan untuk mengembangkan keterampilan dan sikapnya ke arah usaha yang lebih baik. Selain itu juga sekaligus pelayanan sarana permodalan dengan lewat kredit di BRI, dimana modal merupakan faktor yang sangat penting bagi petani/nelayan kecil.

Dari hasil pembangunan Orde Baru selama 5 Pelita (PIPT I), ternyata masih banyak penduduk Indonesia yang hidup di bawah kemiskinan. Secara Nasional memang pendapatan perkapitanya cukup tinggi yaitu kurang lebih 700 \$/

KPT/tahun, tetapi pendapatan yang tinggi itu baru dinikmati oleh sebagian penduduk Indonesia saja, sedangkan yang sebagian lagi masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan kata lain kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin masih cukup menyolok, untuk itu sasaran kita adalah bagaimana yang masih hidup di bawah garis kemiskinan itu bisa meningkat pendapatannya.

Di Kabupaten Blora menurut data statistik terakhir masih terdapat 36% penduduknya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan (kriterianya dari Bappenas dengan parameter rupiah). Kalau di kecamatan Banjarejo terdapat 56.000 penduduk (14.050) maka akan terdapat 5.058 KK yang hidup dibawah garis kemiskinan, inilah sasaran yang kami harapkan bisa tergarap.

Pola Pembinaan Kelompok Petani/ Nelayan Kecil

Pendekatan yang dipakai dalam Proyek P4K adalah dengan pendekatan kelompok kecil yang anggotanya terdiri



Suwito

PPL Pembina P4K
Kab. Blora, Jawa Tengah



Salah satu Pelemban yang diambil semennya untuk dikembangkan kelompok.

dari 8 – 16 orang atau rata-rata 10 orang, dimana kesemua anggota kelompok mempunyai usaha bersama yang dibina oleh petugas (PPL).

Dimana pembiayaan usaha tersebut diarahkan lewat kredit ke BRI dan swadaya kelompok.

Dengan pola ini mempunyai kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan pola proyek-proyek lain yaitu:

1. Petani merasa terikat berkelompok untuk melaksanakan usahanya secara sungguh-sungguh.
2. Petani/anggota kelompok mempunyai tanggung jawab yang tinggi untuk mengelola usahanya dan berusaha semaksimal mungkin untuk berhasil, karena harus mengembalikan kreditnya tepat waktu.

Operasional Pembinaan Kelompok Petani Nelayan Kecil/KPK

1. Pembentukan Kelompok (KPK)

Langkah-langkah yang kami ambil dalam pembentukan KPK adalah sebagai berikut :

- Observasi lapangan, karena sudah terbiasa di Wilayah kerja maka observasi lapangan hanya dilakukan secara sekilas.

- Penyuluhan umum tentang program P4K, dengan penyuluhan umum tersebut maka banyak petani yang ingin bergabung dengan sendirinya dan mereka akan mencari partner masing-masing sesuai dengan keterampilan, kecocokan dan jenis usaha mereka sendiri.
- Tahap berikutnya survey M2, untuk penentuan apakah petani yang bersangkutan, masuk kategori PNK atau tidak dengan menggunakan parameter dibawah 320 Kg setara beras perkapita pertahun. Kadang-kadang terjadi kendala, masalahnya harga beras tidak stabil, misalnya harga pada waktu panen Rp. 550,- sedangkan pada bulan-bulan Nopember, Desember, Januari mencapai Rp. 1000,- per kg, maka langkah yang kami tempuh adalah dengan harga rata-rata.
- Apabila dalam mengelompokkan yang mereka pilih sendiri ternyata tidak termasuk kategori PNK akan dicarikan penggantinya. Dengan cara begitu akan terbentuk kelompok yang kuat dan kompak.
- Tahap berikutnya adalah pembentukan kelompok, sebelum pembentukan kelompok maka perlu konsultasi dengan tokoh atau aparat setempat terutama yang menyangkut karakter calon anggota KPK, hal ini sangat

penting karena anak-anak anggota KPK atau aparat desa yang mendukung demikian dan seterusnya.

2. Kursus-kursus

Untuk Pelaksanaan kursus-kursus, mengingat dananya sangat terbatas maka kadang-kadang yang KPK-nya berdekatan digabung misalnya 2-3 KPK terutama kursus-kursus, keterampilan yang mengundang dari Dinas/ instansi lain, untuk kursus-kursus organisasi dan management dilaksanakan berkelompok oleh petugas dilingkup proyek itu sendiri.

Dalam hal penyusunan RUB hal penting yang kami tekankan adalah:

- Analisa usaha
- Sistematisa penyusunan

3. Pengajuan RUB

KPK - PPL - PPL koordinator (Ex pimpinan BPP) - PPTK - BRI Untuk lebih tepatnya realisasi perlu dilakukan koordinasi yang sebaik-baiknya antara tingkatan penanggung jawab program utamanya dengan BRI. Hal ini penting karena kecepatan realisasi biasanya sangat dituntut oleh anggota KPK.

4. Pengembalian kredit

Jalinan kerjasama yang sangat erat antara perangkat desa dan kontak tani sangat membantu dalam memecahkan masalah kalau terjadi sesuatu misalnya, tunggakan atau setidak-tidaknya informasi misalnya anggota KPK akan meninggalkan desa tersebut (Transmigrasi) sehingga dapat diantisipasi lebih dini untuk tidak terjadi tunggakan.

Petani atau ketua kelompok tani dianjurkan selalu berhubungan dengan Bank baik itu menyangkut tabungan ataupun pengembalian kredit, dengan demikian diharapkan nantinya mereka akan terbiasa berhubungan dengan Bank.

Dengan langkah-langkah yang kami laksanakan untuk wilayah kerja kami telah terbentuk kelompok sebagai berikut:

No	Tahapan	KPK Lk.	KPK Pl.	Jml.
1	KPK belanja realisasi	1	2	4
2	Kredit tahap I	30	25	55
3	Kredit tahap II	16	14	30
4	Kredit tahap III	6	2	8
Jumlah		54	43	97

Total kredit tersalur	Rp. 162.500.000,-
Jumlah pengembalian	Rp. 82.412.200,-
Tabungan di kelompok	Rp. 24.600.500,-
Tunggakan kredit	0 %

Strategi Pembinaan

Dengan semakin banyaknya kelompok petani-nelayan kecil yang terbentuk maka sistem Pembinaan diarahkan kepada kelompok yang sudah lama maka frekuensi pembinaan/kunjungan akan semakin berkurang, diharapkan kemandirian mereka akan semakin tumbuh.

Mengingat sasaran pembinaan kelompok petani kecil, masih cukup besar dimasa yang akan datang, maka kami tempuh dengan 3 strategi dasar dalam pembinaan kelompok petani kecil, yaitu:

1. Tepat Sasaran

Artinya petani yang bergabung dalam kelompok petani kecil harus betul-betul petani yang termasuk dalam kategori petani nelayan kecil karena tujuan kegiatan ini adalah ingin meningkatkan pendapatan mereka, jadi akan sia-sia kalau pendapatannya sudah tinggi.

2. Tepat Usaha Bersama

Proyek P4K adalah proyek pembinaan, bukan hanya sekedar pemberian kredit, jadi tujuan utama adalah bagaimana mereka untuk bisa berusaha lebih baik (usaha bersama) sehingga akan menambah wawasan

berfikir mereka dan keterampilan mereka serta sikap dan perilaku mereka bisa kearah yang lebih baik, sehingga kelompok yang terbentuk betul-betul melaksanakan usaha bersama sesuai dengan keterampilan dasar yang sudah mereka miliki. Kendalanya adalah dana pembinaan untuk kursus-kursus sangat terbatas.

3. Tepat Pengembalian Kredit

Artinya KPK yang sudah waktunya membayar Kredit di Bank harus betul-betul disiplin, karena ini menyangkut kredibilitas KPK terhadap Bank terutama untuk masa-masa yang akan datang.

Dari hasil Pengalaman membina KPK maka :

1. Proyek P4K sangat baik dikembangkan, karena petani kredit pada umumnya sangat sulit untuk mendapatkan kredit, apalagi kredit yang murah dan tanpa agunan.
2. Ternyata anggapan yang selama ini mengatakan kalau petani kecil sulit dibina, kalau diberi kredit menunggak, tidaklah terbukti.
3. Beban operasional petugas semakin berat, diperlukan penunjang sarana dan prasarana yang menunjang.
4. Syarat tabungan di bank dianggap terlalu besar, maka untuk diturunkan, sebagai syarat terutama kredit ke II dan seterusnya.
5. Diberikan insentif yang memadai bagi petugas yang dianggap berhasil

Anggota kelompok sedang memeriksa kambing-kambing di kandang kelompok.



Modal berarti Menggerakkan Masyarakat Tani dalam Koperasi

Oleh : *H. Subani*

Cara pandang yang salah terhadap modal, yang mengartikan bahwa modal hanya kumpulan uang dan benda semata menyebabkan kemelekatan pada benda kasar, untuk mencari, memiliki dan hanya menggunakan benda yang namanya uang. Tiada beda dengan pinjam kredit ini dan itu, yang kemudian menunggak disini dan disitu. Pada ujungnya digulung kumpulan uang yang menerjang seperti terjangan ombak yang meluluh lantakkan.

KUD Trisula. KUD trisula berada di wilayah kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, letaknya berada dialur jalan Bandung Cirebon. Kira-kira 25 Km dari arah Cirebon. KUD ini berdiri sejak tahun 1983. Sekarang mempunyai kurang lebih 3.588 anggota, yang hampir keseluruhannya masyarakat tani dan telah tergabung dalam kelompok-kelompok.

Modal yang dipunyai sekarang lebih dari Rp. 100.000.000,-. Mengelola KUD di tahun 1994 ini mencapai lebih dari Rp. 200.000.000,-, dan kredit lainnya sampai lebih dari Rp. 900.000.000,-. Sejak tahun 1984 hingga tahun 1994 masyarakat tani telah mengambil KUD dan selama sepuluh tahun terakhir ini mampu mengembalikan tanpa menunggak.

KUD ini mekar dan berkembang tidak datang dengan sendirinya, berbagai tantangan, dan perjuangan membangun kesadaran masyarakat tani akan arti penting manfaat koperasi. Dengan kesadaran dari para pengurus bahwa jalan itulah yang harus terlebih dahulu dibangun, yaitu menyusun tenaga lemah yang tersebar, yang terdiri dari para

petani menjadi organisasi yang kuat, yang didasarkan tolong menolong, mendidik dalam kebersamaan tanggung jawab.

Modal, awalnya susah dan macet. Dua belas tahun yang lalu, pada awal KUD ini berdiri, sama saja mencari bakal modal terasa sangat susah. Banyak persyaratan dan birokrasi yang harus ditempuh. Begitupun mencari bank yang memberi modal juga sangat sulit.

Pada modal yang diperoleh dari fasilitas KUT, pengalaman pahit pun pernah teralami, dengan macetnya kredit KUT yang direalisasikan. Banyak petani yang terlibat belum mengembalikan. Sedang pengalaman kami pada saat itu masih nol besar. Tindakannya pun tidak didasarkan pada strategi yang tepat. Pada waktu itu kami langsung membentuk tim penagih yang terdiri dari unsur KUD, unsur aparat desa, unsur koramil dan kepolisian. Tim bergerak dari desa ke desa dengan jelajah enam desa, menagih langsung pada petani yang menunggak. Hasilnya memang ada, dalam sehari itu dapat Rp. 60.000,-, tetapi biaya menagihnya pun membengkak menjadi dua kali lipat

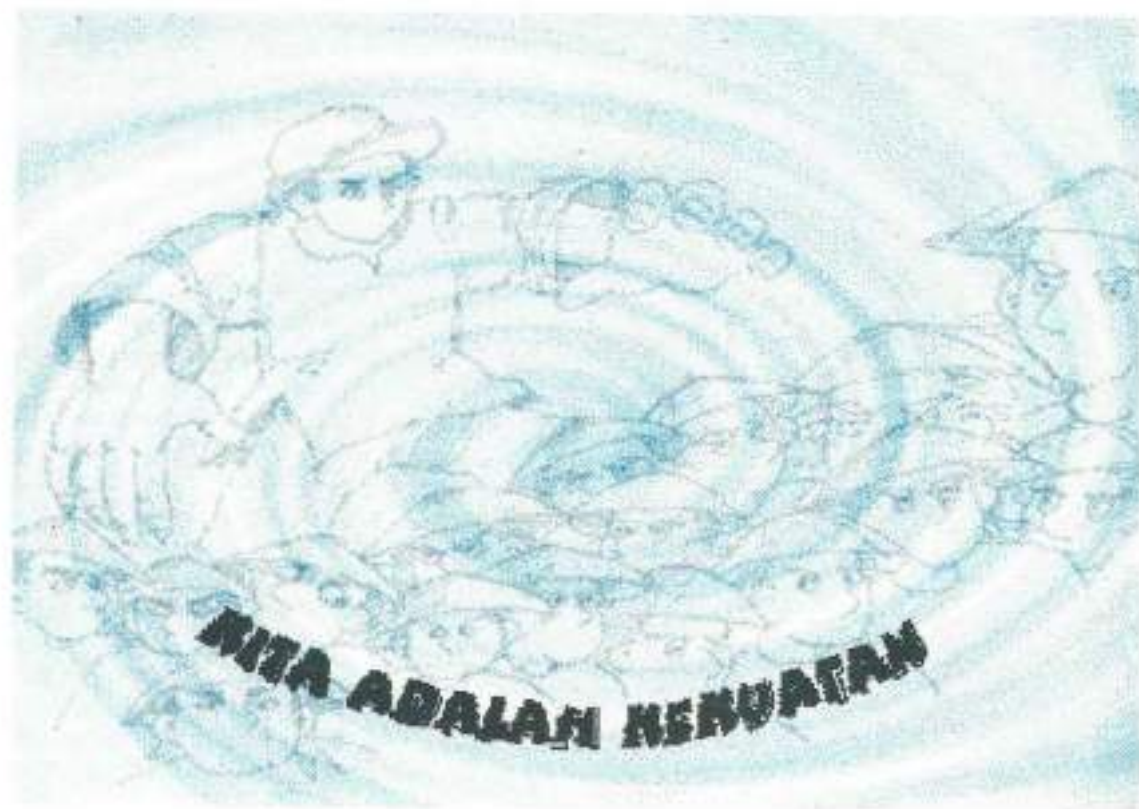
H. Subani

Ketua KUD Trisula
Kec. Palasah,
Majalengka

hasil tagihan Rp. 120.000,-. Celaka ! kalau terus menerus begitu, bisa bangkrut KUD Trisula ini. Maka sejak itu pola penagihan demikian dihentikan. Terlalu mahal biayanya, apalagi cara demikian tidak mendidik bagi siapa pun cenderung memaksa si pengutang. Mending kalau ada uang bisa membayar mereka, tetapi kalau tidak, kasihan mereka.

Kelompok tani adalah seumpama daya hidup KUD. Karena sebagian besar anggota KUD ini adalah petani, maka pada dasarnya daya hidup KUD ini ada ditangan petani. Di dinding ruangan KUD ini ada tulisan yang berbunyi "Kelompok tani kuat, KUD sehat". Bagi orang yang belum memahami KUD ini barangkali tulisan itu hanya kalimat pemanis saja, hanya pengisi dinding yang kosong. Tetapi sesungguhnya bagi KUD trisula kalimat itu merupakan tekad yang menjadi tatanilai setiap gerak kegiatan KUD trisula.

Jika tidak ada kegiatan petani, maka KUD Trisula pun akan lumpuh. KUD Trisula tidak dekat dengan petani, tidak melihat kebutuhan petani, maka KUD ini akan kering dari kegiatan. Karena itulah segala kegiatan KUD trisula selalu diarahkan pada kegiatan kegiatan yang bernafaskan kegiatan petani di wilayahnya. Tidaklah mengherankan kalau pada tahun belakangan ini pengurus KUD yang juga adalah para petani, selain mengembangkan minapadi, juga memelihara ternak sapi dan domba. Model ini dilaksanakan untuk memberikan contoh model usaha yang beraneka ragam. Selain itu dapat dibayangkan jika petani telah selesai dengan segala urusannya di sawah, maka waktu senggang mereka digunakan untuk mengurus ternak. Pulang dari sawah mereka membawa rumput, berangkat ke sawah mereka pun membawa kotoran ternak sebagai pupuk bagi tanamannya di sawah.



Dengan begitu seluruh waktu telah mereka manfaatkan dengan seksama. Hasil panen pun tidak akan pernah mengecewakan. Tambahan hasil dari memelihara ternak domba saja, jika dihitung dengan lebih rinci maka untung satu ekor domba bisa mencapai Rp. 500 tiap hari, jadi jika memiliki 10 ekor domba akan setiap hari akan memperoleh hasil bersih sampai Rp. 5000,- menjadi milik petani. Membangun kemandirian petani yang demikian itulah, yang menjadi tujuan KUD Trisula. Adanya usahatani yang menguntungkan, adanya prakarsa dari kelompok, adanya kerjasama menyatukan tenaga yang tersebar menjadi kebersamaan yang dilandasi tolong menolong dan tanggung jawab bersama pula. Tata nilai demikian sebenarnya diperoleh dan didasarkan pada proses pengalaman seringkali menghadapi kredit macet.

Seperti diungkap terdahulu bahwa pola penagihan melalui tim penagih sudah tidak efisien lagi. Lalu kita berpikir, bahwa sebenarnya yang pinjam kredit adalah petani. Yang menggunakan kredit adalah juga petani. Demikian pula yang merencanakan pengembalian kredit adalah mereka pula. Jadi yang harus bertanggung jawab sepenuhnya bila terjadi kemacetan pengembalian, sudah seharusnya tidak siapa siapa lagi, kecuali petani itu sendiri. Jadi inti semua berpulang pada petani itu sendiri, pada prakarsa dan swadaya petani itu sendiri agar tumbuh kekuatan dari kalangannya sendiri untuk mengatasi kemacetan kredit yang tidak berkesudahan.

Maka bermusyawarah dan bersepakatlah kelompok-kelompok tani yang ada di wilayah KUD Trisula untuk mengentaskan tunggakan kredit. Dari 42 kelompok dibagi menjadi enam gabungan kelompok yang bekerja sama dan bersepakat melakukan tindakan mengantisipasi tumbuh dan berkembangnya kemacetan kredit.

Cara kerja enam gabungan ini, agak unik. Dengan strategi silang mereka bergerak bersamaan, dimana kelompok yang terdiri dari orang-orang desa Palasah bergerak menuju desa Majasuka, sebaliknya kelompok yang terdiri dari orang-orang desa Majasuka bergerak menuju desa Palasah demikian seterusnya, diaduk silang di enam desa yang termasuk wilayah kerja KUD trisula. Taktik komunikasi pun diskenario dan di tiap forum musyawarah kelompok di tingkat desa, selalu tim penagih orang-orang dari desa lain (misal desa Palasah) mengatakan pada masyarakat tani desa tersebut (misal desa Majasuka), bahwa para petani di desa Palasah tidak dapat dan tidak boleh mendapat pinjaman kredit, hanya karena orang-orang desa Majasuka pada menunggak.

Demikian sebaliknya yang dilakukan oleh tim penagih orang-orang desa Majasuka mengatakan hal yang serupa di desa Palasah.

Taktik tersebut, ternyata cukup jitu, karena mampu menyentuh *harga diri* orang desa yang didatangi dan menumbuhkan budaya malu. Sehingga pinjaman kredit yang dilaksanakan oleh KUD trisula dapat dikembalikan dengan lancar.

Demikian, tampak pada kita sekalian bahwa kekuatan yang ada pada kelompok tani itu sungguh luar biasa. Mereka bisa mengatasi persoalan mereka oleh tenaga yang ada pada mereka itu sendiri. Dan pengelolaan modal melalui pinjaman kredit ini pun berjalan lancar dari waktu ke waktu, hingga sepuluh tahun terakhir ini lunas tanpa tunggakan. Ini semua hanya karena anggota masyarakat tani yang terpencah-pencar itu mulai menyadari manfaat koperasi dan bergerak dalam kerjasama yang saling menguntungkan membangun KUD trisula hingga masih bisa berdiri dan berkembang sampai sekarang ini.

Kelompok pun berencana. Untuk memperoleh kredit kelompok tani diwajibkan membuat rencana usaha (RDK/RDCK). Rencana yang dibuat bukanlah sekedar lembaran-lembaran berisi tulisan. Tetapi rencana yang di buat berdasarkan kebutuhan usahatani kelompok agar dapat dilakukan sesuai anjuran, dan kredit yang diajukan semata mata hanya untuk mewujudkan agar perencanaan usahatani mereka dapat dilakukan dengan baik dan benar.

Untuk tujuan itu kembali, tanggung jawab berada pada kelompok. Musyawarah kelompok lah yang menentukan berapa luas yang akan digarap oleh kelompok tani, jumlah orang yang terlibat dan siapa-siapa orang yang akan mengajukan kredit atau pinjaman. Langkah berikutnya kelompok sendirilah yang memilih dan menyeleksi orang-orang dalam anggotanya yang layak mendapat pinjaman kredit. Seleksi ditentukan pada pengamatan terhadap perilaku, situasi rumah dan terlebih lagi pada situasi usahatannya. Usahatani lah yang kemudian menjadi pangkal tolak berputarnya modal. Salah seleksi terhadap usahatani, maka modal pinjaman kredit itu akan terhenti alias macet. Tegasnya petani akan terlibat hutang, menunggak!

Karena itu sudah menjadi tatanilai pengurus KUD yang bersama-sama dengan rekan penyuluh pertanian, selalu ingin tahu kebutuhan-kebutuhan para petani yang dituangkan dengan sebenar-benar pada rencana-rencana usahatani mereka di masa yang akan datang.

Membangun citra, meningkatkan pelayanan dan mendidik anggota. Disadari bahwa citra KUD banyak yang menunjukkan citra yang tidak baik. KUD Trisula memang mekar di sela sela seribu tantangan membangun kesadaran dan kepercayaan masyarakat tani akan manfaat koperasi. Masyarakat tani tidak akan bergerak dalam wadah koperasi, jika koperasi itu sendiri tidak dapat



Rencana dibuat berdasarkan musyawarah

menunjukkan manfaatnya secara lebih nyata. Anggota pun akan sia-sia menuntut pelayanan manfaat dari koperasi, jika para anggota yang sebenar memiliki koperasi itu sendiri tidak mempunyai kegiatan-kegiatan yang produktif, tidak membangun kekuatan yang ada pada diri mereka dalam satu wadah organisasi yang kuat baik antar anggota yang tersebar, antar gabungan kelompok atau dalam wadah koperasi yang terdapat di wilayahnya.

Karena itulah disetiap peluang yang ada KUD trisula selalu membangun citra koperasi yang mampu menampilkan manfaat secara nyata terhadap kebutuhan anggotanya. Untuk tujuan ini, dimulsi dari hal-hal yang kecil. Misalnya membangun citra bahwa KUD trisula mempunyai disiplin yang tinggi, yang tidak kalah dengan disiplin pegawai lainnya, maka KUD Trisula selalu menyelenggarakan pertemuan tepat pada waktunya. Disiplin ini selalu ditegakkan. Tidak peduli siapa pun yang terlambat datang menghadiri pertemuan akan selalu ditinggalkan.

Tapi di balik itu KUD trisula pun tidak lupa untuk menyediakan oleh-oleh bagi keluarga yang ada di rumah. Walau pun oleh-oleh kecil, hanya sekedar teh dan gula, tapi tampaknya meninggalkan

kesan yang dalam. Sehingga kemelekatan mereka untuk hadir pada setiap pertemuan yang diadakan KUD Trisula selalu hampir mencapai 100% dan mereka datang tepat pada waktunya. Inilah sesuatu yang sangat berharga, yang dimanfaatkan oleh KUD Trisula, yang dapat membangun forum musyawarah yang dimiliki dengan kemelekatan yang tinggi oleh seluruh anggotanya. Sungguh peluang emas tak ternilai, sebab hanya dengan kondisi forum seperti itulah maka koperasi dapat menggerakkan anggotanya kemana mereka mau, sesuai dengan tuntutan kebutuhannya.

Pelayanan terhadap pengajuan kredit pinjaman dibuat secara bersama-sama dengan kesepakatan terhadap jadwal dan besar pinjaman serta aturan main untuk memperolehnya. Jadwal pelayanan kredit disepakati harus tepat waktu, tidak membolak-balikkan orang, mengulur-ulur waktu. Ditetapkan bahwa jangka waktu realisasi kredit/pinjaman tidak lebih dari dua minggu terhitung dari jadwal pengajuan kredit/pinjaman. Dan realisasi selalu dilakukan pada hari Senin.

Pada mereka yang mengajukan hari Selasa sampai dengan jum'at, maka realisasi pinjaman akan dilaksanakan hari Senin yang akan datang. Tetapi pada mereka yang mengajukan pinjaman pada hari Sabtu maka realisasi kredit akan dilakukan pada hari Senin kedua yang akan datang. Demikian jadwal ini disepakati, dan dilaksanakan dengan taat azas, menjadi nilai masyarakat koperasi KUD trisula.

Untuk mendidik anggota, bahwa pinjaman bukan sekedar pinjaman. Pinjaman sekedar minta lancar pada saat meminjam dan merasa dirampok pada saat mengembalikan, maka kepada anggota diwajibkan untuk menabung. Anggota yang menabung mencari adanya niat baik untuk secara bersama-sama mengembangkan KUD ini. Dilain pihak menabung juga adalah membiasakan diri pada anggota agar mampu memupuk modal, dengan menyimpannya serta menyisihkannya sedikit demi sedikit. Kelak ini akan terbukti, sebagai cara mendidik menyimpan uang sedikit demi sedikit sebagai bayaran untuk mencicil pinjaman kreditya.

*KUD Palesah
mekar disela seribu
tantangan*





Upayakan kegiatan produktif yang menghasilkan

Besar tabungan pun dijadikan dasar untuk menetapkan besar pinjaman. KUD Trisula menetapkan besar pinjaman adalah sebesar sepuluh kali besar tabungan yang disimpannya. Jadi jika anggota memiliki tabungan sebesar Rp. 10.000,- maka besar pinjaman yang dapat diajukan adalah sebesar Rp. 100.000,-. Aturan ini akan memberikan iklim yang semakin menggairahkan untuk menabung.

Begitu pula dalam proses pengelolaan pengembalian, semuanya terjadwal. Biasanya peminjam diwajibkan mengangsur pinjamannya dalam waktu sepuluh kali jadwal pengembalian. Memang ada saja anggota yang *lucak lecek* tidak taat pada jadwal pengembalian, menangani perilaku demikian, tim penagih yang telah ditumbuhkan dari kalangan mereka tetap melakukan tindakan yang bersifat mendidik. Betapa pun kadang anggota berbohong. Pendekatan pertama selalu bersifat lunak dan secara bersama-sama mencari jalan keluar untuk tetap melunasi hutangnya, demikian seterusnya tindakan diarahkan untuk selalu membangun

kesepakatan untuk melunasi hutang, dengan mengupayakan kegiatan-kegiatan produktif yang menghasilkan, agar mereka mampu melunasi hutangnya.

- Pernah ada anggota kelompok tani, yang bertanya, bagaimana seandainya usahatani yang dilakukannya mengalami kegagalan total, fuso berat, apakah hutang kredit masih tetap harus dilunasi? Kita pun balik tanya, menggugah nilai-nilai agama yang dianutnya, apakah ada pula agama yang mana pun yang mengajarkan bahwa hutang boleh untuk tidak dibayar? Bahkan seandainya kita meninggal pun, bukankah hutang masih tetap saja melekat dan kemudian menjadi tanggung jawab ahli waris? Apalagi hanya sekedar kegagalan usahatani dan kitanya masih tetap sehat, maka hutang tetap hutang yang wajib hukumnya untuk dilunasi. Jadi pada dasarnya kembali pada niat baik kita, cara pandang kita bahwa modal/kredit pinjaman hanyalah sekedar alat untuk mencapai tujuan, tujuan usahatani yang lebih menguntungkan. Penggunaannya,

pengadaannya adalah sepenuhnya ada pada kekuatan kita sendiri.

Taktis yang manis, agar kredit dapat lunas dan dikembalikan tepat pada waktunya adalah strategi menagih pada saat anggota mempunyai uang. Itu berarti dilakukan ketika masyarakat tani sedang ada pada musim panen, saat petani menjual hasil usahatani. Untuk tujuan itu, kita selalu merancang dari awal sejak para anggota mengajukan akad kreditnya. Pada saat anggota yang terdiri dari kelompok tani mengajukan kredit, disana sudah mulai dicatat kapan mereka mulai tanam, berapa luas yang akan tanam, kapan mereka mulai panen, kapan mereka menjual hasil usahatani. Kesemuanya itu memberikan gambaran yang sangat jelas, sehingga tim penagih dapat menentukan skenario tindakan pengamanan kelancaran pengembalian kredit, yang menentukan kapan saat mereka bergerak melakukan tindakan.

Yang penting usahatani kelompok itu harus selalu berkembang. Pikiran bahwa dinamika koperasi selalu berkaitan erat dengan dinamika kelompok, sedang dinamika kelompok itu hidup dan berkembang hanya jika

usahatani pun hidup dan berkembang pula, tidak mandeg apalagi terhenti tanpa mampu mengembangkan usahanya. Karena itu kita berpikir, untuk selalu mencari, menciptakan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan usahatani yang ada di kelompok. Sehingga kelompok selalu tetap berkemampuan untuk memanfaatkan dan mengembalikan modal usaha yang dibutuhkannya.

Peran untuk menggerakkan dan mengembangkan usahatani kelompok ini, ada pada peran penyuluh pertanian, yang memang sudah sejak dari awal membangun dan memandu kelompok tani ke arah usaha tani yang lebih baik. Kegiatan-kegiatan yang diciptakan para penyuluh pertanian bersama sama dengan KUD Trisula, adalah penciptaan kegiatan percontohan model usahatani yang tepat di wilayah KUD Trisula. Dari percontohan ini diharapkan petani tidak berkatat pada usahatani yang itu itu juga, usahatani yang ytidak berubah dari waktu ke waktu.

Model percontohan yang dikembangkan bersama, di antaranya minapadi, usaha ternak domba dan sapi potong. Lokasi model ini ditempat pada tempat yang strategis agar dapat dilihat oleh



Model Kandang Domba
KUD Palasah



*Keyakinan Kami
"Kelompok tani Kuat KUD Mantap"*

para petani di seputarnya, agar mereka dapat pula mengikuti pola pola penerapan yang dicontohkan pada lahan usahatani mereka sendiri. Jika petani/ kelompok tani semakin bergairah dalam melaksanakan usahatannya, maka kerjasama diantara mereka pun akan semakin hidup, karena dari waktu ke waktu mereka selalu mempunyai tujuan dan mau tidak mau mereka dihadapkan pada proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan tersebut.

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang selalu dinamis dan berkembang mengikuti tuntutan kebutuhan yang tidak pernah terpuaskan, maka modal menjadi kebutuhan yang penting sebagai alat untuk mewujudkan segala keinginan itu. Tetapi segala kesulitan mewujudkan modal, menjadi tidak

berarti sebab daya hidup kelompok telah tumbuh. Gerakan menabung dari anggota KUD, yang menggali modal dari kekuatan sendiri, ditambah dengan berbagai kepercayaan dari bank pemerintah atau pun swasta telah mencukupi modal yang dibutuhkan petani. Sehingga KUD Trisula, yang merupakan lembaga ekonomi di pedesaan ini tidak sekedar terdiri dari kumpulan uang dan barang semata, tetapi di dalamnya terdapat **gairah kerja dan kerjasama** dari kekuatan masyarakat tani yang bersatu dalam kebersamaan tanggung jawab.

Tepatlah keyakinan KUD Trisula, bahwa kelompok tani Kuat, KUD sehat dan Modal berarti adalah **mengerakkan masyarakat tadi dalam wadah koperasi**.

Wawasan tanpa batas

Dunia pertanian kita telah berubah, PJP I telah mampu mengubah wajah pertanian kita. Indikator yang paling mencolok hasil perjuangan PJP I adalah di tahun 1984, dimana petani kita dan seluruh jajaran masyarakat pertanian dalam kiprahnya telah mampu menghantarkan negara tercinta ini pada era swasembada beras. Seiring dengan itu, produksi pada berbagai komoditas pun meningkat.

Tetapi penjelajahan dinamis kita lantas bertanya, apakah peningkatan produktivitas petani nelayan tersebut juga menampilkan peningkatan pendapatannya? Apakah peningkatan produksi tersebut adalah juga mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat tani pada umumnya? Selayaknya dan memang seharusnya peningkatan produksi adalah juga menampilkan peningkatan pendapatan dan sekaligus juga mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat tani nelayan itu sendiri.

Namun di sisi lain, mungkin di sebahagian kecil masyarakat kita, ternyata bahwa peningkatan produksi tidak selalu berkorelasi erat dengan peningkatan pendapatan dan apalagi dengan peningkatan kesejahteraan! Bagaimana itu bisa terjadi dan mengapa bisa terjadi demikian, inilah petikan kejadian yang menunjukkan proses dimana peningkatan produksi tidak menampilkan peningkatan pendapatan.

Kubis di recah petani yang menanamnya. Di daerah dataran tinggi, dimana berbagai jenis sayuran dari kentang, tomat, kubis, jagung, cabe dan jenis sayuran dataran tinggi lainnya tumbuh subur, masyarakat tani yang menanamnya memiliki respon yang tinggi. ketika musim tomat tiba, maka beramai-ramai mereka menanam tomat. ketika musim kentang tiba mereka pun beramai-ramai pula menanam kentang. demikian seterusnya produksi pun melimpah pada pedagang pengumpul yang memang sudah ada sejak lama menjadi mitra usaha masyarakat tani di wilayah itu. Hingga pada suatu ketika terjadi pada musim menanam kubis, menjelang panen dimana produksi kubis melimpah ruah dimana mana. Harga pun anjlok jauh dibawah harga biaya untuk memproduksinya. Kerugian yang diderita masyarakat tani pun sangat memberatkan, karena memang biaya usahatani sayuran ini tergolong cukup tinggi. Pada kondisi demikian ada diantara mereka yang hilang pengendalian dirinya, dan dari ramai-ramai menanam kubis, maka berubah menjadi ramai-ramai merecah tanaman kubisnya, dibiarkan saja membusuk di pertanamannya!

Kejadian-kejadian serupa sering terulang dan terulang lagi, komoditas seperti cengkeh, susu, jahe, jeruk, kencur, dan udang pernah juga terpuruk pada harga yang sangat rendah,



jauh dibawah dari biaya produksi yang harus dikeluarkannya. sehingga kalau pun dijual, jangankan kembali mendapat untung, kembali modal pun sukar diharapkan.

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya kondisi demikian. Sifat mudah rusak dan tidak tahan lama dari rata-rata komoditas pertanian merupakan satu diantara faktor penentu, selain sudah barang tentu luputnya penginderaan situasi pangsa pasar dan juga kompleksitas sistem agribisnis yang menuntut kecermatan - ketelitian masyarakat tani untuk mengambil keputusan-keputusan menjalankan usahatani.

Jawaban semua itu, ada pada misteri wawasan tanpa batas, wawasan yang mampu mengantisipasi dan membaca berbagai fenomena serta peluang yang melintas dari berbagai informasi yang dinamis; yang kemudian harus dibaca lebih integratif dan menyeluruh sebagai dasar untuk mengambil keputusan-keputusan menetapkan komoditas pilihan bagi usahatani, dengan tidak mengabaikan penginderaan situasi pasar terlebih dahulu.

Memahami wawasan tanpa batas adalah tantangan dan tuntutan kebutuhan pada era PJP II ini, Perjuangan untuk meraihnya merupakan gairah tersendiri, apalagi bagi seorang penyuluh yang dituntut untuk tanpa henti mendidik dan memandu petani nelayan dan keluarganya dalam mengambil keputusan-keputusan bagi pengembangan usahatani. Tentu, tidaklah diharapkan keputusan pilihan komoditas yang diprioritas akan terpuruk diharga yang tidak rasional untuk dijual. Yang kita inginkan adalah, apapun komoditas yang dipilih, maka keberlimpahan hasil produksinya adalah juga keberlimpahan peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan bagi keluarganya.

Nah, rekan penyuluh pertanian kami yakin sebagian besar dari anda pernah mengalami dan menyelami pada wawasan tanpa batas. Karena pernah terdengar bahwa tradisi lelang ikan di wilayah lahan pantai pernah menaikkan harga harga komoditas ikan laut hasil tangkapan

nelayan. Sementara di balik dataran tinggi pernah disentuh oleh pengaturan pola tanam untuk mencegah melimpahnya produksi melebihi permintaan pasar. Di lain pihak sistem kontrak usahatani, pola PIR, pola bapak angkat pun telah mampu mewujudkan kebersamaan yang didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan, tolong menolong dan tanggung jawab bersama.

Pengalaman pengalaman tersebut tentunya telah mengisi hari-hari anda sebagai penyuluh yang selalu dekat dengan petani nelayan, Ekstensia sangat mengaharapkan kesediaan siapa pun yang menamakan dirinya penyuluh pertanian untuk saling bercengerama pada wawasan tanpa batas, lewat karya tulis yang kita baca bersama, kita kaji bersama. Semoga pancaran inovasinya mencerahi rekan penyuluh pertanian di seluruh pelosok tanah air ini.

(as)

**DI DUNIA INI,
DICARI PETANI
YANG PANDAI
BERDAGANG.....!**





Jonhan Boer

Antara Teori, Agama dan Tradisi

Sampai dengan di perguruan tinggi ia mengaku termasuk orang yang sulit bicara dan mengemukakan pendapat serta amat pemalu. Tapi berkat kemauan untuk menggali kemampuan dirinya, ia berhasil keluar dari beban itu. Bahkan predikat sebagai penyuluh pertanian teladan pun kini disandangnya.

Hari nyaris senja. Semburat merah tembaga menghiasi langit Batusangkar sore itu saat ekstensi bertandang ke tempat kediaman Jonhan Boer. Tapi Jonh -begitu ia akrab dipanggil- belum kembali dari tempat kerjanya. Lewat isya barulah ekstensi bisa menemui Jonh di rumahnya.

Berbincang-bincang dengannya seakan tak menyangka kalau dulunya Jonh pernah sulit bicara dan sulit mengemukakan pendapat serta amat pemalu. Sampai dengan di sekolah lanjutan tingkat atas, Jonh merasakan jiwanya tertekan. Ia berkembang menjadi pemuda yang minder, pemalu dan sulit bicara. Kondisi ini berlanjut sampai

ia menjadi mahasiswa. Tapi di sinilah rupanya perjalanan hidupnya berubah. Sebagai mahasiswa ia dihadapkan pada sederet tugas rutin yang mesti diselesaikannya: menulis paper, diskusi, dan bahkan seminar. Kesemuanya itu menuntut suatu kemampuan di dalam mengorganisasikan gagasan, mengemukakan pendapat dan mempertahankan argumentasi. Sementara Jonh? "Tengok orang seminar saja saya yang gemetar," ujarnya mengengang saat-saat itu.

Karena tuntutan itu, Jonh berusaha memperbaiki diri. Tapi karena ia minder dan pemalu, maka ia tak sanggup bertanya pada temannya atau orang lain yang ahli dalam hal itu. Cara satu-satunya ialah dengan mencari bahan bacaan yang mampu memberi saran guna mengatasi kelemahannya. Dalam pencariannya ia menemukan buku berjudul Teknik Menghilangkan Cemas. Lewat buku inilah ia tergugah untuk terus membaca dan mengatasi rasa minder serta kelemahan lainnya. Kebiasaan membaca itu berlanjut terus sampai sekarang. Bahkan setiap ia melakukan perjalanan dinas ke Padang, paling tidak ada beberapa judul buku yang dibawanya untuk dibaca. Menurut istrinya, Dian Fitri, yang dinikahinya pada tahun 1986, karena kesibukannya Jonh bahkan punya kebiasaan mendengarkan siaran berita lewat radio sambil mandi.



Tetap di jalur penyuluhan

Jonhan Boer dilahirkan di Bukittinggi, 44 tahun yang lalu. Ia adalah anak ke-7 dari sembilan bersaudara yang terdiri dari 6 putra dan 3 putri. Jonh merasa agak terlambat masuk sekolah dasar, yaitu pada tahun 1959, saat ia sudah berumur delapan tahun. Sementara itu sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas diselesaikannya di Bukittinggi. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Andalas tahun 1972 dan diselesaikannya pada tahun 1979.

Dengan gelar Sarjana Ekonomi Pertanian yang disandanginya Jonh kemudian melamar ke berbagai instansi dengan harapan dapat mengisi salah satu formasi jabatan struktural yang lowong. Namun ketika ia dipanggil oleh Dinas Pertanian Daerah Tingkat I Sumatera Barat, ia justru ditempatkan sebagai tenaga penyuluh pertanian spesialis di daerah transmigrasi Sitiung.

Sejujurnya ia mengaku, "*Sejak mula saya tidak punya bayangan bahwa saya akan berkecimpung dalam dinamika kerja penyuluhan pertanian.*" Namun setelah dialami, dipahami dan dihayati,

Jonh merasa tertarik dan cocok dengan jalur kerja yang dipilihnya. Bahkan ia sudah memantapkan pilihannya itu, "*Bagaimanapun dan sampai kapanpun saya akan mempertahankan jalur fungsional saya sebagai penyuluh pertanian,*" tekadnya mantap. Karena tekadnya itulah Jonh merasa perpindahan tempat kerja bukanlah persoalan yang serius, asalkan masih tetap dalam jalur yang dipilihnya.

Semasa di Sitiung, tahun 1984, Jonh memperoleh kesempatan untuk mengikuti program pasca sarjana di Universitas Gajah Mada yang diselesaikannya pada tahun 1986. Setelah lulus sebagai Sarjana Utama, Jonh ditarik ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat. Dari sini kemudian ia dimutasikan lagi ke kabupaten Lima Puluh Kota, sebelum akhirnya ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanah Datar sampai sekarang.

Perjalanan karirnya selama 15 tahun sebagai penyuluh pertanian telah membuahkan hasil yang senantiasa diidamkan oleh setiap penyuluh pertanian. Kelompok tani binaannya



"Bagaimanapun dan sampai kapanpun saya akan mempertahankan jalur fungsional saya sebagai penyuluh pertanian."



Memandu petugas/PPL dalam mengukur pH sampel tanah untuk lebih memahami kondisi wilayah kerja

memperoleh penghargaan di tingkat propinsi, antara lain dalam bidang pola tanam dan pemanfaatan lahan pekarangan. Tahun 1993 ia terpilih sebagai Penyuluh Pertanian Berprestasi, suatu penghargaan yang diberikan oleh Menteri Pertanian. Setahun kemudian, 1994, Jonh bahkan terpilih sebagai Penyuluh Pertanian Teladan yang memungkinkannya berjabat tangan dengan Presiden Soeharto.

Membangun motivasi ala Jonh

Setelah malang-melintang sebagai penyuluh pertanian, Jonh sampai pada satu kesimpulan bahwa salah satu kelemahan yang dimiliki para penyuluh pertanian di Indonesia adalah kurangnya mereka menguasai ilmu menghadapi orang dewasa. Banyak di antara mereka yang kurang mampu membangun motivasi petani. Untuk yang satu ini Jonh punya kiat yang telah teruji bertahun-tahun: kombinasi pendekatan baik dari sisi teori, agama, maupun tradisi. Menurut Jonh motivasi itu

mutlak harus muncul dalam diri petani, sehingga mereka secara sadar menerima dan menerapkan anjuran yang kita sampaikan. Dalam konteks ini, dari sisi teori kita harus paham betul tentang anjuran yang akan diberikan. Apa, mengapa, dan bagaimana anjuran itu harus kita kuasai betul. *"Bagaimana kita bisa berharap petani mampu melakukan sesuatu teknologi, sementara kita sendiri belum paham betul dengan teknologi itu?"*

Sementara itu dari sisi agama perlulah ditanamkan pemahaman bahwa kita ini tidak cukup hanya dengan akal, melainkan kita perlu juga keyakinan. Dengan ini orang akan sanggup berserah diri meskipun apa yang telah dilakukan berbuah kegagalan. Kemudian dari sisi tradisi, Jonh memanfaatkan kekayaan tradisi Minang akan pepatah guna membangun motivasi petani. Menurutnya banyak pepatah-pepatah yang amat berguna di dalam misi merubah perilaku petani ke arah yang lebih progresif. Ia memberi salah satu contoh: ada pepatah



Bersama Miss Hang dari World Bank dalam rangka meninjau demplot usahatani konservasi lahan kritis kawasan Danau Singkarak

Allah; syariat yang mengatur, adat melaksanakan. Contoh lainnya adalah pepatah yang bisa menimbulkan keyakinan orang agar mau berusaha dulu, barulah memperoleh hasilnya. Makna pepatah itu kira-kira adalah sebagai berikut; untung sabut itu terapung, untung batu itu terbenam, kita sebagai manusia harus memilih mau terapung atau terbenam.

Ayah dari Elfadhilla (8 th) dan Hardiyanti Putri (4 th) ini mengaku, "*Janganlah saya disuruh berpidato, tetapi kalau disuruh memotivasi petani, saya senang.*" Termasuk kesenangannya juga adalah tidak suka merokok sejak tahun 1985. Pria bertinggi-berat 156 cm-53 kg yang menyukai warna coklat ini juga punya kegemaran lain, yakni mengurus bonsai dan *cross coun-*

try. Itulah pasalnya barangkali ia tidak begitu kikuk sewaktu diterjunkan di daerah lahan kritis, yang menuntut bukan saja kesiapan mental, tetapi juga kesiapan fisik.

Kepada para penyuluh pertanian Jonh berpesan, "*Dalam bekerja kita harus tahu betul apa fungsi kita, apa tugas kita, dan sampai di mana wewenang kita. Itu harus kita pahami betul,*" tandasnya mengakhiri bincang-bincangnya dengan **ekstensi**.

*Alamat Jonhan Boer
Jl. Imam Bonjol No.82
Kubu Rajo Lima Kaam - Batusangkar
Sumatera Barat
Telepon 0...71942*

basuki seliabudi

Peranan Penyuluh dalam KUT Pola Khusus

Ada kabar baik untuk para PPL. Sejak 1 April 1995 ini, setiap akhir bulan Maret dan September, para PPL ini akan menerima imbalan berupa dana. Imbalan ini akan dibayarkan oleh KUD. Pasalnya, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/4/Kep/DIR tanggal 17 April 1995 tentang Kredit Usaha Tani Pola Khusus ditetapkan bahwa suku bunga kredit sebesar 14 % pertahun. Ternyata suku bunga yang 14 % ini dibagi bagi untuk imbalan bank sebesar 9 %, imbalan KUD sebesar 2 %, imbalan PPL sebesar 1 %, kas Kelompok tani sebesar 2 %.

Jadi setiap bulan Maret dan September, para PPL mungkin akan sibuk menghitung imbalannya. Imbalan ini menggunakan rumus : $1\% \times \text{baki debet} \times \text{hari bunga} \times (\text{angsuran yang dibayar} : \text{angsuran yang seharusnya dibayar})$.

Menteri Pertanian Dr. Sjarifudin Baharsjah pada Konperensi Pers pada tanggal 8 Juni 1995 menyambut dengan gembira adanya imbalan ini. "*Adanya imbalan ini sangat penting, oleh karena dapat membangkitkan motivasi dan gairah kerja para penyuluh. Walaupun saya tidak menyangsikan peranan mereka, akan tetapi lebih baik kalau ada imbalannya*", kata Menteri Pertanian.

APA yang harus DIKERJAKAN PPL

Tapi, harus disadari oleh para PPL, bahwa imbalan ini tidak diberikan secara cuma-cuma. Dalam Kredit Usaha Tani Pola Khusus ini para PPL mempunyai tugas dan fungsi. Yaitu

meningkatkan partisipasi petani dalam setiap tahapan kegiatan intensifikasi. Menumbuhkan dinamika dan kepemimpinan anggota Kelompok tani. Menyampaikan anjuran teknologi tepat guna kepada petani dan membina penerapannya dalam rangka peningkatan mutu intensifikasi. Membina dan mendorong berkembangnya organisasi dan kemampuan petani dalam pengamalan 5 jurus kemampuan Kelompok Tani. Mendorong terciptanya hubungan melembaga antara kelompok tani dengan KUD dan berkembangnya hubungan kemitraan antara kelompok tani, KUD dan perusahaan pembimbing. Membina pelaksanaan rancang bangun dan rekayasa usaha tani intensifikasi sesuai dengan kondisi setempat. Menyiapkan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian dan menyusun rencana kerja penyuluh pada tingkat WKPP.

Lalu bagaimana caranya untuk mengetahui baki debet yang merupakan imbalan bagi PPL. ybs ? Ada tugas konkrit PPL, yaitu membantu Kelompok Tani untuk membuat RDKK. Yang dinamakan RDKK atau kepanjangannya Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani adalah rencana per-tahun kebutuhan kelompok tani sebagaimana diatur secara berkala dalam SK Mentan. RDKK ini memuat nama petani, tanaman yang akan dibiayai, luas areal, biaya sarana produksi yang dibutuhkan, jumlah kredit, jadwal pencairan dan jadwal pengembalian kredit dari setiap anggota kelompok tani. RDKK inilah yang berfungsi untuk permohonan kredit dari kelompok tani kepada Bank Pemberi Kredit melalui KUD. RDKK ini harus ditandatangani oleh masing

masing anggota kelompok tani pemohon kredit, Ketua Kelompok tani dan diketahui oleh PPL.

KELOMPOK TANI harus punya TABUNGAN dan KAS

Dalam KUT Pola Khusus ini, untuk menumbuhkembangkan minat menabung maka kelompok tani/petani wajib membentuk tabungan. Tabungan Kelompok tani ini adalah dana yang dimiliki kelompok tani yang diakumulasikan dari sebagian bunga yang dibayar oleh anggota kelompok tani. Besarnya 8 % pertahun, dihitung dari pinjaman yang diterima.

Tabungan ini disimpan pada bank pemberi kredit dan mendapat bunga menurut suku bunga tabungan yang berlaku di bank yang bersangkutan. Tabungan ini sepenuhnya menjadi hak dari Kelompok tani. Tabungan dapat dicairkan oleh kelompok tani setelah kredit lunas. Apabila pada saat jatuh

tempo masih terdapat sisa tunggakan, bank berhak menggunakan tabungan kelompok tani untuk pelunasan tunggakan tsb.

Penggunaan uang ini terserah kelompoknya, namun dianjurkan digunakan sebagai modal untuk membiayai kegiatan simpan-pinjam diantara anggota kelompok. Besarnya tabungan ini adalah $8\% \times \text{baki debet} \times \text{hari bunga} \times$ (angsuran yang dibayar : angsuran yang seharusnya dibayar).

Di samping tabungan kelompok tani, kelompok tani juga mempunyai kas, yang didapatkan dari imbalan suku bunga kredit yang besarnya 2 %. Imbalan kas ini diterima setiap penerimaan angsuran yang dihitung berdasarkan rumus $2\% \times \text{baki kredit} \times \text{hari bunga} \times$ (angsuran yang dibayar : angsuran yang seharusnya dibayar).

Kas kelompok tani dapat digunakan oleh kelompok tani untuk biaya administrasi dan biaya-biaya lain dalam rangka kegiatan kelompok tani.



KUD dan KELOMPOKTANI harus BERTANGGUNGJAWAB

Sebenarnya Direksi Bank Indonesia telah mengeluarkan SK Nomor 27/9/KEP/DIR tanggal 15 April 1994 tentang Kredit Usaha Tani. Dengan SK ini ternyata ada KUD yang tidak memenuhi persyaratan untuk menerima KUT. Di segi lain, dalam rangka meningkatkan produksi pangan untuk mendukung pelestarian swasembada pangan peranserta KUD dan kelompok tani diperlukan. Maka dengan SK No.28/4/KEP/DIR ini, kelompok tani berkesempatan mendapatkan modal kerja melalui KUD yang tidak memenuhi persyaratan tadi. Karenanya disebut dengan KUT Pola Khusus.

Komoditas yang dibiayai adalah padi palawija dan hortikultura. Untuk hortikultura, kredit hanya diberikan untuk pembiayaan komoditas yang belum mendapat fasilitas kredit program melalui Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) dan yang pemasaran hasilnya cukup terjamin. Khusus untuk tanaman markisa, jeruk dan salak hanya diberikan untuk pemeliharaan tanaman yang sudah menghasilkan. Komoditi lainnya adalah nenas, pisang, pepaya, cabe merah, kentang, bawang merah dan jabe.

Namun KUD yang dapat diikutsertakan dalam pemberian KUT Pola Khusus harus memenuhi persyaratan berupa berbentuk badan hukum, memiliki pengurus yang aktif dan mempunyai AD/ART.

Salah satu tugas KUD adalah menyeleksi Kelompok Tani. Agar pemberian kredit lancar dan aman, maka penyeleksian petani harus memperhatikan keragaan petani dalam pembayaran kembali kredit yang pernah diterimanya. Kalau sudah terseleksi lalu diusulkan kepada bank. Kelompok tani ini lalu memberikan kuasa kepada KUD untuk menandatangani akad kredit dengan

bank. Melaksanakan administrasi kredit, membantu bank dalam menyalurkan, mengawasi penggunaan dan menagih pengembalian. Di samping itu berperan membina kelompok tani dalam aspek kelembagaan dan mengembangkan kelompok tani dalam kegiatan simpan pinjam.

Kelompok tani yang dapat menerima KUT Pola Khusus harus sudah anggota KUD, ada komoditas yang dapat dibiayai, pengurusnya aktif ada aturan yang disepakati kelompok, mengadakan pertemuan secara teratur, bersedia mengadakan Tabungan kelompok, mempunyai pembukuan sederhana, tunggakan untuk satu tahun sebelumnya tidak melebihi 8 % dari pinjaman dan harus sudah dilunasi maksimum 4 bulan setelah jatuh tempo. Kelompok tani perlu memperhatikan bahwa tunggakan seorang petani, menjadi tanggungan bersama kelompok tani.

Tugas dan fungsi pengurus kelompok tani adalah mengadakan seleksi; menyusun kebutuhan kredit para anggota dalam RDKK, memberi surat kuasa kepada KUD untuk menandatangani akad kredit, menerima dan menyalurkan KUT Pola khusus, bertanggungjawab terhadap pengembalian, mengelola kegiatan simpan pinjam dan membina kerjasama dan kesatuan anggota kelompok.

CARA MENGAJUKAN KREDIT

Kelompok tani dengan bantuan PPL harus menyusun RDKK. Berdasarkan RDKK ini kelompok tani mengajukan kredit kepada bank melalui KUD. KUD menyeleksi kelompok tani yang telah ditetapkan. Menilai kebenaran atas isi RDKK. Lalu membuat rekapitulasinya. RDKK dibuat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya.

Selanjutnya KUD membuat Surat Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh pengurus KUD untuk

disampaikan kepada kantor bank setempat. Dilampiri dengan rekapitulasi RDKK dan RDKK masing masing kelompok tani. Tidak perlu harus menunggu semua RDKK kelompok tani. Dapat diajukan secara bertahap.

Bank melakukan penilaian atas permohonan KUT. Jika bank ragu terhadap KUD yang mengajukan dapat meminta rekomendasi dari Kantor Depkop dan PPK. Jika disetujui oleh bank, maka Bank dan KUD melakukan penandatanganan akad kredit atas nama seluruh kelompok tani penerima kredit.

Setelah penandatanganan akad kredit, Bank membuka rekening pinjaman atas nama masing masing kelompok tani, rekening KUD untuk menampung imbalan KUD, rekening tabungan A atas nama masing masing kelompok tani untuk menampung tabungan kelompok tani dan rekening tabungan B atas nama masing masing kelompok tani untuk menampung kas kelompok tani.

Secara berkala Bank harus menyampaikan kepada KUD salinan rekening pinjaman dan rekening kas Kelompok Tani yang menjadi anggotanya.

BAGAIMANA PENGEMBALIANNYA

Harus diperhatikan bahwa pengembalian kredit sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kelompok tani, dan dapat dilakukan dengan mengangsur setiap panen. Besarnya angsuran disesuaikan dengan besarnya pendapatan dan kebutuhan pembiayaan tanaman berikutnya.

Seluruh kredit harus lunas pada saat jatuh tempo. Seandainya ada tunggakan harus sudah dilunasi selambat-lambatnya 4 bulan. Jika tidak dilunasi, maka bank berhak mempergunakan tabungan kelompok tani sebagai pelunasan tunggakan kelompok tani ybs.

Ada yang perlu diingatkan kepada PPL, agar adanya imbalan ini, tidak mengurangi minatnya untuk memberikan penyuluhan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Awas, jangan sampai sibuk menghitung imbalan saja, tetapi sibuklah membantu Kelompok tani menyusun RDKK dan menyediakan berbagai informasi untuk mensejahterakan petani.

Godlim Panggabean

Forum Diskusi Ekstensia Mengapa Tidak ?



Apa yang dijanjikan *ekstensia*, sehingga berani hadir di tengah media cetak lainnya yang sudah lama eksis? Manfaat apa yang ditawarkan *ekstensia* sebagai majalah ilmiah populer di bidang keilmuan penyuluhan pertanian, agar dapat diterima dan menjadi dan menjadi tuntutan kebutuhan pelanggannya, khususnya para penyuluhan pertanian yang bertebaran di pelosok tanah air tercinta ini? Tantangan seperti itulah, yang terbayang dibenak para pengelola *ekstensia*, ketika *ekstensia* edisi pertama dipersiapkan.

Sebagai majalah ilmiah populer, dengan segmentasi sasaran yang terbatas, *ekstensia* mengemban misi agar dapat tampil sebagai media belajar secara otodidak para pelanggan dengan segmentasi terbatas khususnya para penyuluh pertanian terhadap berbagai substansi materi yang berkaitan erat dengan dunia penyuluhan pertanian sehingga *trend demi trend* yang berkaitan dengan dunia penyuluhan dapat digali dan diungkap

Investigasi penjelajahannya secara komprehensif merambah pada kebijakan program, wawasan teoritis, implementasi program, ungkapan pengalaman, dan berbicara apa saja mengenai hal-hal yang esensial yang tak pernah mencuat di forum-forum formal, namun mempunyai arti yang sangat penting bagi perubahan dunia penyuluhan pertanian itu sendiri.

Misi *ekstensia* dengan tujuan yang telah dipancarkan tersebut, memang seumpama mimpi indah, yang mungkin bisa hilang ketika terbangun !. Karena kalau memandang ke depan dan dengan menyadari segala keterbatasan kekuatan yang ada pada ruang redaksi *ekstensia*, maka alangkah skeptisnya dan alangkah berat misi yang diemban *ekstensia* untuk mencapai tujuannya tersebut.

Namun ternyata ruang itu tidak sesempit ruang redaksi *ekstensia* belaka, dunia penyuluhan pertanian ini maha luas menembus *barier-barier* diri seluas bentangan tanah air tercinta ini. Secara tak disangka misi *ekstensia* yang tadinya serupa mimpi belaka, ternyata mendapat sambutan yang hangat dan jabat tangan yang justru sangat erat, dari mereka-mereka nun jauh di sana.

Idenya mula-mula muncul dan diprakarsai dari rekan-rekan penyuluh pertanian provinsi Bali, yang kemudian berlanjut pada rekan-rekan penyuluh pertanian provinsi Sumatera Barat, berupa ide untuk menumbuhkan dan membentuk **Forum Diskusi** sebagai mitra yang memberikan sumbangsih materi pada majalah *ekstensia* yang baru lahir ini.



Jabat tangan yang erat dan hangat ini, sungguh merupakan jalan keluar yang sangat memudahkan ekstensi mencapai tujuannya. Bukankah dinamika respon masyarakat pertanian sangat beragam pada kondisi lokal spesifik? Dengan adanya forum diskusi para penyuluh pertanian yang menjadi mitra kerja ekstensi, keragaman dinamika respon itu akan tergal! Belum lagi keberadaan forum diskusi di provinsi satu akan di perkaya oleh forum yang ada di provinsi yang lainnya. Bahkan makin sering forum diskusi ekstensi menggali, berbicara, saling memberi pengalaman dalam kebersamaan, tanggung jawab, kepedulian dan kecintaan yang tulus terhadap dunia penyuluhan pertanian yang menjadi pilihannya, maka tentu makin tajam dan saling memperkaya penguasaan yang akan dihasilkannya nanti.

Seandainya hanya seandainya, apa yang kemudian dihasilkan oleh forum diskusi ekstensi akan memberi warna dan apalagi mampu menghidup hidupan dunia penyuluhan pertanian, tidak saja terjadi di provinsinya masing masing belaka, tapi mungkin bergema ke seluruh penjuru tanah air, suara penyuluh pertanian dalam wadah forum diskusi ekstensi tersebut akan mampu menggetarkan dunia penyuluhan, maka mengapa tidak! kita menumbuhkan forum diskusi ekstensi di seluruh pelosok tanah air ini.



Karena siapa lagi yang harus tampil dan peduli menghidup-hidupkan dunia penyuluhan pertanian, memandang jauh ke depan mengabstraksi cita-cita penyuluhan yang belum tercapai dan melihat kondisi nyata pada saat sekarang, kalau tidak dimulai oleh penyuluhnya itu sendiri, untuk menyusun kekuatan yang tersebar dalam wadah organisasi yang kuat serta berbicara dan berbuat dalam kegiatan nyata membangun tanah tercinta ini? Jawabannya mengapa tidak dalam wadah forum diskusi ekstensi ini! Setuju?

(es)



Keberadaan Penyuluh dan Petani di Perkotaan

Dalam keberhasilan pembangunan pertanian di Indonesia, tidak lepas dari keberadaan peran aktif antara penyuluh pertanian dan petani yang disertai adanya program pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Pertanian. Disamping itu adanya peran aktif dari instansi-instansi terkait baik pemerintah maupun swasta, sehingga keberhasilan pembangunan pertanian tidak berdiri sendiri, tetapi diperlukan adanya keterkaitan berbagai pihak.

Penyuluh Pertanian sebagai ujung tombak pembangunan pertanian, mereka bertugas di lapangan baik di pedesaan (desa-desa) maupun di perkotaan (kelurahan-kelurahan). Kalau menurut sistem LAKU (Latihan & Kunjungan), seorang penyuluh harus mempunyai 16 buah kelompok tani, setiap kelompok tani wajib dikunjungi dua kali dalam satu minggu sehingga dalam 1 bulan mereka harus berkunjung 32 kali, dengan materi kunjungan yang berbeda dan materi yang berkelanjutan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan pada saat itu. Disamping itu juga tidak lepas dari rencana/program yang telah dibuat setiap tahunnya, dan itu diselenggarakan dengan adanya kebijaksanaan pemerintah, tetapi tidak diharuskan bahwa misi tersebut harus dilaksanakan sepenuhnya, dengan berasumsi melihat

keadaan di lapangan, sehingga misi atau materi tersebut bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan diharapkan hasil yang optimal. Maka dari itu peranan penyuluh dan petani serta aktivitas kelompok tani harus benar-benar dimiliki dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

Menurut kenyataan, keberadaan penyuluh dan petani di perkotaan khususnya di DKI Jakarta, sangat jauh berbeda dengan keberadaan yang ada di daerah pedesaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya, keadaan petani/kelompok, lahan/hamparan usahatani, komoditas, transportasi, pemasaran produksi, dan lain-lain. Di lain pihak kebijaksanaan penyuluhan kita saat ini masih sama dalam arti tidak ada bedanya antara kebijaksanaan penyuluhan untuk daerah pedesaan, semi perkotaan ataupun perkotaan. Di perkotaan jumlah petani/kelompok tani maupun luas lahan pertaniannya relatif lebih kecil atau lebih sempit dibanding di pedesaan, demikian juga orientasi usahanya. Karena transportasi maupun pemasarannya relatif lebih mudah dibanding di pedesaan, sehingga orientasi usahanya sudah lebih menjerus ke Agribisnis. Dengan keadaan yang demikian, para

Kita berceloteh tentang opini, harapan, kondisi faktual, komentar terhadap kiprah penyuluhan pertanian baik itu yang terjadi di lapangan maupun hal-hal lain yang kiranya perlu untuk diketahui oleh pembaca *ekstensi*, *elastis* menerima celoteh para pembaca untuk dapat dimuat dalam rubrik CELOTEH.

Tulisan bersifat ringkas dan dikirimkan ke *ekstensi* dengan dilengkapi identitas penulis (foto copy KTP/SIM/Karpeg dll). *ekstensi* akan memuat tulisan yang lengkap dan berwenang untuk memuluskan tulisan yang akan dimuat.

penyuluh di perkotaan (terutama penyuluh yang tugasnya ke lapangan) dalam menjalankan tugasnya sehari-hari semakin mengalami kesulitan terutama yang berkaitan dengan pengumpulan angka kredit, sehingga untuk naik pangkat perlu perjuangan yang berat. Namun hal tersebut berbeda dengan penyuluh yang pangkatnya telah II/d (Ajun Penyuluh Pertanian Muda) ke atas, mereka tidak begitu merasakan kesulitan karena tidak dituntut harus berhadapan langsung dengan petani, mereka bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan lain seperti, membuat karya tulis, seminar, dan lain lain.

Dengan melihat masalah tersebut di atas, kiranya kebijaksanaan penyuluhan

untuk daerah perkotaan ataupun semi perkotaan harus dibedakan dengan daerah pedesaan, sebagai contoh yang menyangkut penyuluhnya antara lain : masalah kredit point, UKB dan sebagainya. Sedangkan yang menyangkut kelompok tani antara lain: jumlah kelompok, dasar pengelompokannya, dan sebagainya. Dasar pengelompokan tersebut bisa berdasarkan kegiatannya sebagai contoh: kelompok pemotong ayam buras, kelompok pemotong iuk, kelompok pedagang daging, kelompok pembuatan sari buah, kelompok pedagang tanaman hias, dsb.

Oso Sumarja

PPL Peternakan DKI Jakarta

Desan untuk Rekan-rekan Penyuluh

1. Tugas Penyuluhan ini adalah tugas yang sangat mulia karena menyangkut sumberdaya. Manusia dan Alam yang sangat diperlukan untuk melanjutkan pembangunan. Para petani/masyarakat pedesaan betul-betul akan kita jadikan bukan hanya sebagai objek, tapi juga sebagai subjek. Untuk itu kita harus betul-betul memahami dan menghaysi fungsi tugas dan tanggung jawab kita serta selalu meningkatkan kemampuan dan kemauan kita untuk menolong dirinya sendiri untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.
2. Untuk dapat berbuat lebih banyak, karena menang kita harus bangga terhadap apa yang kita dapat, maka kita harus betul-betul mencintai profesi kita yaitu sebagai penyuluh.
3. Untuk rekan-rekan PDS, kita tidak cukup hanya melihat petugas/PPL, tapi kita juga harus terjun ke lapangan untuk membantu petugas untuk lebih memahami petani dan wilayahnya, karena kemampuan petugas kita untuk benar-benar memahami petani dan keluarganya serta usaha dan potensi wilayahnya masih terbatas.

Ir. Jonhar Boer, SU

PPS Dinas Tanaman Pangan Kab. Tanah Datar
Sumatera Barat

Totok Mardikanto

PENYULUHAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

Sebelas Maret University Press, Juni 1993
(401 halaman)



Dalam percakapan sehari-hari sering dikatakan : "Itu hanya teori saja, prakteknya pasti lain." Sehingga istilah teori kerap dianggap sebagai perkiraan atau spekulasi saja. Ini tidak aneh terutama yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial, termasuk di dalamnya ilmu penyuluhan. Sebab selain menjelaskan hubungan antara gejala sosial dan arti dari observasi yang dilakukan, teori dalam ilmu sosial juga bertujuan untuk meramalkan fungsi dari gejala-gejala yang diobservasi berdasarkan pengetahuan yang secara generalisasi telah dipersoalkan oleh teori.

Buku Penyuluhan Pembangunan Pertanian ini memang tidak berbicara tentang teori ilmu sosial atau mengungkap gejala-gejala sosial, tetapi sedikit banyaknya menyangkut tentang sejumlah teori yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan. Buku ini, seperti yang dikatakan penulisnya pada Kata Pengantar, dimaksudkan sebagai acuan tentang ilmu penyuluhan pembangunan yang dapat digunakan oleh para praktisi, pengambil kebijakan, penyuluh, pekerja sosial, maupun pelajar dan mahasiswa yang diharapkan mampu menambah perbendaharaan buku penyuluhan dalam kepastakaan kita.

Buku dua puluh bab ini memuat tentang penyuluhan pertanian yang

diawali dengan arti pembangunan, yang lalu menghubungkan dengan pentingnya pembangunan pertanian bagi sebuah negara, terutama negara berkembang seperti halnya Indonesia. Dalam kaitan ini, berbeda dengan A.T. Mosher yang memandang pendidikan pertanian atau penyuluhan pertanian sebagai faktor pelancar pembangunan pertanian, Mardikanto menyatakan bahwa penyuluhan pertanian harus mendapat perhatian terbesar sebagai *Primadona*. Hal ini menurutnya selaras dengan pembangunan nasional Indonesia pada PJPT II yang menekankan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Maksud Doktor di bidang penyuluhan ini adalah, perlu untuk mengutamakan kegiatan penyuluhan yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat (petani) agar selalu siap dan mampu menguasai serta menerapkan setiap alternatif inovasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas usahatani dan pendapatan petani demi perbaikan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Walaupun bukan berarti penyuluhan pertanian merupakan satu-satunya upaya yang akan menjamin keberhasilan pembangunan pertanian.

Kelengkapan merupakan kelebihan buku ini. Masalah penyuluhan pertanian diurai dari dasar sampai pada evaluasi

penyuluhan pertanian dengan dilengkapi gambar dan tabel yang mendukung. Ada dua lampiran yang memuat ragam metode/teknik diskusi dan ragam grafik dan chart yang dapat dipakai dalam kegiatan penyuluhan. Selain itu gaya bahasanya yang lancar dan mudah dicerna, namun tetap menjaga diri untuk menjadi sebuah buku acuan. Kelengkapan ini didukung pengalaman penulisnya yang juga praktisi penyuluhan, menjadikan buku ini mendekatkan teori dengan praktek di lapangan.

Buku ini tidak memuat hal-hal yang sangat baru. Bagi pembaca buku-buku penyuluhan maupun komunikasi pedesaan, akan banyak menemukan kutipan dari buku-buku tersebut. Sehingga buku ini merupakan kumpulan teori penyuluhan yang diramu menjadi satu buku yang menarik dan lengkap. Ini bukan kelemahan buku ini, tetapi

menjadi semacam kekuatan karena wawasan yang ditawarkannya menjadi luas dan komprehensif. Bagi penyuluh yang jarang membeli buku, memahami buku ini sudah dapat menjelaskan tentang penyuluhan pembangunan pertanian. Walaupun belum banyak berbicara tentang perkembangan terakhir seperti agribisnis dan peran penyuluh dalam era ini. Hal ini mungkin karena buku tersebut terbit pertama Februari 1993, atau karena penyusunnya punya pertimbangan lain untuk tidak memasukkan masalah tersebut.

Kehadiran buku acuan ini dalam khasanah ilmu-ilmu penyuluhan perlu kita sambut, karena kita memang memerlukannya. Walaupun selain menguasai metode dan materi penyuluhan, seorang penyuluh juga harus mencintai petani dan masyarakatnya.

Normansyah (APP Magelang)

efisiensi menerima resensi buku yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian, pengembangan masyarakat dan dinamika sosial yang ditulis pembaca untuk dimuat dalam rubrik WACANA.

Tulisan dikik dalam 2 spasi maksimal 3 halaman kuarto atau dikik menggunakan program WS4 (Disket dikem ke ekstensi). efesiensi akan menentukan tulisan yang akan dimuat bagi yang tidak dimuat akan dikembalikan.



BPP KU SAYANG BPP KU MALANG

Pagi itu cuaca mendung berkabut sebagaimana biasanya di daerah kami yang pegunungan apalagi sekarang bulan Februari musim penghujan. Di meja ada surat ijin dari petiugas tata usaha sedangkan petugas kebun tidak kelihatan batang hidungnya maklum sudah 10 tahun belum diangkat menjadi PNS.

Rencana ku hari ini akan mengunjungi seorang kontak tani, aku melangkah keluar kukunci pintu BPP tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya.

Kutunda niatku lalu aku masuk kembali hujan semakin deras, aku mondar mandir seorang diri lalu kuhampiri almari arsip kuambil bundel lama Programa Penyuluhan WKBPP masih tertata rapi sejak tahun 1979/1980, lalu kuambil bundel lama yang lain jadwal kunjungan, laporan kegiatan, monografi dan lain-lain semua masih tertata rapi.

Tiba-tiba aku teringat teman-teman ku dulu, Purwanto, B Sc yang sekarang menjadi penyuluh perkebunan di kabupaten Purworejo, Sugiyono sekarang menjadi staf sekretariat Bimas di Kabupaten Demak, Sutomo, B Sc sekarang menjadi Mantri tani di kabupaten jepara.

Anch memang kenapa mereka sekarang menjauhi BPP, Wahai teman-teman aku aku ingin katakan padamu bahwa hasil karyamu masih tersimpan rapi, aku ingin katakan padamu bahwa meja kursi tempat kita berkumpul, berlatih, berdiskusi dan bergurau masih tertata rapi seperti dulu.

Aku ingin katakan padamu bahwa klengkeng dan durian yang kau tanam

dulu sekarang telah berbuah. Mengapa engkau tinggalkan BPPmu yang dulu telah bersusah payah kita bangun bersama.

Lihatlah foto-fotomu dulu ketika kita bersama-sama membangun BPP ini, mengapa sekarang kau tinggalkan.

Tiba-tiba airmataku jatuh membasahi foto-foto perjuangan teman-temanku, hujan di luar masih rintik-rintik udara semakin dingin. lalu aku berkata bukan salahmu teman, bukan salahku jua mungkin sudah suratan takdir kita.

Lalu aku bangkit dan berteriak *"wahai teman-teman ku singsingkan lengan bajumu kembali marilah kita bangun BPP kita untuk menyongsong masa depan yang semakin penuh dengan tantangan"*

Hujan di luar sudah berhenti aku keluar kukunci pintu BPP, dengan Honda Trail butut kuarahkan motorku sesuai rencana semula, dengan tiba-tiba aku dihentikan oleh Pak Camat, *"ada kabar untuk anda"* katanya lalu beliau melanjutkan *"berdasarkan informasi dari Pemda Tk. II ada rencana pemindahan terminal bus keluar kota tepatnya di kompleks BPP dan sekitarnya"*.

Bagaikan disambar petir aku mendengarnya, aku tertegun kakiku gemetar mataku berkunang-kunang tidak terasa teracap dari mulutku *Innalillahi Wainna Ilaihi Roji'un*, Selamat tinggal BPP ku sayang.

Endrogini HS

PPL Tanaman Pangan

Gerbu Ala Majudi

Sabtu malam langit penuh gemintang. Orkestra cengkerik menghidupkan malam yang nyaris sepi. *Kungfu The Legend Continues* baru saja muncul di layar televisi. Jumadi bangkit dan beranjak ke depan ketika didengarnya suara orang mengetuk pintu. Ternyata Majudi.

"Eh, tumben kamu, malam Minggu kemari."

"Kok sepi?" bukannya menjawab Majudi malah balik bertanya.

"Tuh di dalam, pada nonton tivi. Mau ikutan?"

"Nggak ah, aku di sini saja."

"Sendiri?"

"Ya nggak, dong, ditemani kamu, Jum."

"Jud, Jud, kamu kok kayak anak kecil begini, pake merajuk lagi. Kamu pasti lagi marahan sama Inten, ya?" Jumadi menarik kursi dan duduk menemani Majudi.

"Nggak ada kamus marahan dalam hubungan aku dengan Inten. Selalu oke, jeh!"

"Terus?"

"Wakuncar sedang *off*, sebab Inten lagi pulang ke Cirebon."

"Jadi gantinya kamu ngapeli aku, gitu?" Jumadi terbahak.

"Jangan gitu, ah. Aku kemari karena punya info bagus."

"Paling-paling soal tamah. Aku nggak berminat, takut bermasalah."

"Bukan itu. Kamu tahu, nggak, BPP mana yang bangunannya paling bagus?"

"Jud, Jud, kamu makin kesini kok jadi sering aneh-aneh. Kemarin kamu berteka-teki soal agen 007, sekarang soal BPP, besok apa lagi? Lama-lama singkatan PPL-mu jadi berubah: pelan-

pelan linglung!"

"Terserah kamu bilang apa, Jum. Tapi ngomong-ngomong kamu tahu, nggak?"

Jumadi geleng kepala. Seingatnya Balai Penyuluhan Pertanian di seluruh Indonesia dibangun dengan standar gedung yang sama. Jadi sulit untuk menentukan mana yang paling bagus.

"Memang, kamu pasti nggak tahu. Dengar, bangunan BPP yang paling bagus itu ada di kecamatan Binong, kabupaten Subang, Jawa Barat."

"Apa dasarnya?" Jumadi jadi ingin tahu juga.

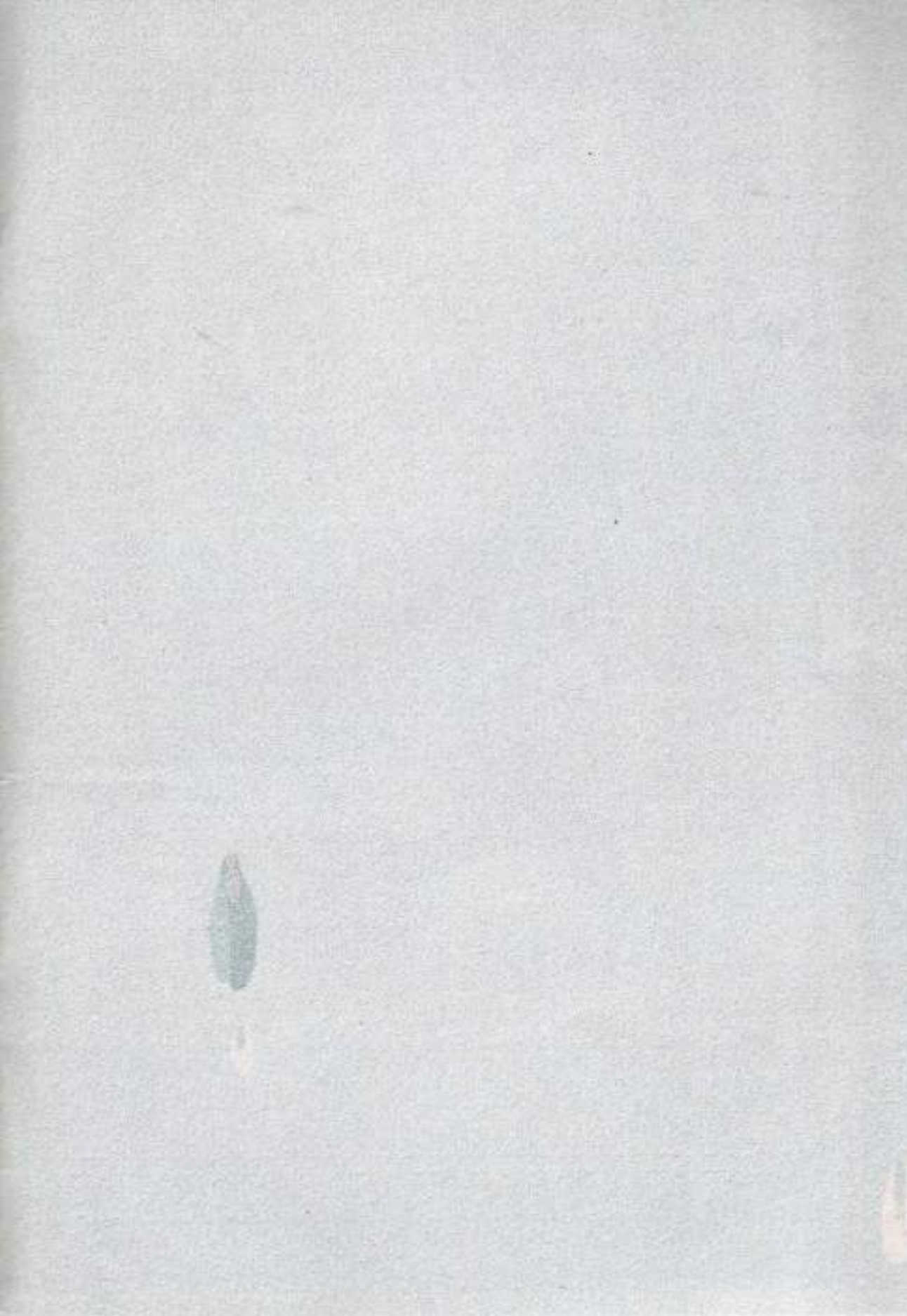
Lantas Majudi pun bercerita. Menurutnya BPP di kecamatan Binong itu patut dibilang bagus. Pertama karena dibangun atas swadaya para petani. Kedua dari segi bangunannya memang tergolong bagus untuk ukuran bangunan BPP. Untuk membangun BPP tersebut para petani di kecamatan Binong melakukan Gerbu alias Gerakan Seribu. Dari setiap hektar sawah setiap panen disisihkan dana sebesar seribu rupiah. Terkumpul dana sebanyak 35 juta rupiah. Maka jadilah bangunan BPP paling bagus di Indonesia!

"Kalau petani bisa, mengapa kita para penyuluh tidak bisa melakukan gerakan seribu semacam itu. Jumlah kita tidak kurang dari 30 ribu orang. Kalau setiap bulan seribu, terkumpul 30 juta rupiah. Setahun 300 juta, dan sepuluh tahun 3 milyar, dan"

Majudi tidak sempat melanjutkan, sebab Jumadi sudah terburu-membekap mulutnya, sambil menyodorkan segelas kopi panas yang dibawa istrinya dari dalam.

"Jud, mendingan kita ngopi dulu, biar segar."

Basuki Selabudi





Perpustakaan Badan Pe
Pengembangan Sumber
Pertanian

Ekstensi / BPPSDMP



M0722026